



Islamic Review

Jurnal Riset dan Kajian Keislaman

Perkembangan Wakaf Asuransi Syariah di Indonesia Pasca Terbitnya Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016

Muh. Luthfi Hakim & Siti Asiyah

Parenting Styles of Fishermen and Female Migrant Workers (TKW) Families in Instilling Religious Characters for the Children's

Nailul Ghufron Aziz

The Effectiveness of Shadow Puppet Media (an Experimental Study at MAK Zidny Ilma Warzuqny Fahma)

Amalia Nabilah Al-Dama & David Rizal

Pendidikan Ibadah Anak Usia Dini dalam Kitab *Fasalatan* Karya KHR.Asnawi

Nur Khosiin

Volume IX Nomor 2 Oktober 2020

Diterbitkan oleh

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati

Tim Editorial

Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman

Editor In-Chief

[Nur Khoiriyah](#), Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati

Managing Editor

[Siti Asiyah](#), Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati

Editor

[M. Sofyan Alnashr](#), Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati

[Isyrokh Fuaidi](#), Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati

[Ah. Dalhar Maarif](#), Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati

[Kunarti](#), Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati

Mitra Bestari

[Syamsul Ma'arif](#), (Scopus ID 57196279085) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

[Khoirun Niam](#), (Scopus ID: 57200652037) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

[Al Makin](#), (Scopus Author ID: 38162109000) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

[Moch Nur Ichwan](#), (Scopus ID: 39361628400) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

[Andar Nubowo](#), Nahyang Technological University, Singapore

[Muhammad Syafiq](#), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

[Muhyar Fanani](#), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

[A. Dimyati](#), Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati

[Agus Waluyo](#), Institut Agama Islam Negeri Salatiga

[Nur Said](#), Institut Agama Islam Negeri Kudus

[A. Zaenurrosyid](#), Universitas Islam Sultan Agung Semarang

[Inayatul Ulya](#), Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati

Alamat Redaksi

Lantai 1 Kampus IPMAFA, Jl. Raya Pati-Tayu KM 20, Purworejo Margoyoso Pati Jawa Tengah 59154, Telp.: 0295-5501999, Hp: 085 743 602 083, Fax: 0295-4150081, Website: <http://journal.ipmafa.ac.id>, Email: islamicreview@ipmafa.ac.id

DAFTAR ISI

Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman
Volume IX Nomor 2 Oktober 2020

Perkembangan Wakaf Asuransi Syariah di Indonesia Pasca Terbitnya Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016	
Muh. Luthfi Hakim & Siti Asiyah	191-208
Parenting Styles of Fishermen and Female Migrant Workers (TKW) Families in Instilling Religious Characters for the Children's	
Nailul Ghufroon Aziz	209-224
The Effectiveness of Shadow Puppet Media (an Experimental Study at MAK Zidny Ilma Warzuqny Fahma)	
Amalia Nabilah Al-Dama & Daviq Rizal.....	225-244
Pendidikan Ibadah Anak Usia Dini dalam Kitab <i>Fasalatan Karya KHR. Asnawi</i>	
Nur Khosiin	245-266
Implementasi Manajemen Metode Qiro'ati dalam Meningkatkan Baca Tulis Al-Qur'an (Studi pada TPQ di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati)	
Eni Rohmawati	267-280
Partisipasi Perempuan Desa Karangsari dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusif	
Tri Hariyono.....	281-298
Studi Terhadap Program <i>Housing</i> bagi Kawasan Terdampak Perusahaan Tambang	
Zainal Fadri	299-320

Perkembangan Wakaf Asuransi Syariah di Indonesia Pasca Terbitnya Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016

Muh. Luthfi Hakim

Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati

hakim@ipmafa.ac.id

Siti Asiyah

Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati

sitiasiyah@ipmafa.ac.id

Abstract

This research aims to explain how the development and potential of Waqf of Islamic insurance in Indonesia after published the fatwa by DSN-MUI in 2016 concerning the Waqf of insurance benefits and investment benefits in Islamic life insurance. This study uses a qualitative approach and use documentation methods as a data collection technique. All data will be analyzed by describing and making a general sense of the all data about the development of Waqf of Islamic insurance. The results of this research show that Waqf of Islamic insurance developed positively and has potential in the next future with a provision of conceptual and concrete constraints that can impede the development of Waqf of Islamic insurance can be responded to by the management of Waqf and public in general.

Keywords: Development of Waqf; Waqf of Islamic Insurance; DSN-MUI Fatwa.

Abstrak

Tulisan ini bermaksud menjelaskan bagaimana perkembangan dan potensi wakaf asuransi syariah di Indonesia setelah diterbitkan fatwa DSN-MUI pada tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan. Data-data yang terkumpul dianalisa dengan cara mendeskripsikan dan membuat gambaran menyeluruh (general sense) terhadap keseluruhan data yang berkaitan dengan perkembangan wakaf asuransi syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf asuransi syariah berkembang dengan positif dan memiliki potensi besar di masa depan dengan catatan kendala-kendala konseptual maupun konkret yang dapat menghambat laju perkembangan wakaf asuransi syariah dapat direspon secara baik oleh pengelola wakaf dan masyarakat secara umum.

Kata Kunci: Perkembangan Wakaf; Wakaf Asuransi Syariah; Fatwa DSN-MUI.

A. Pendahuluan

Sebagai salah satu jenis filantropi Islam, pada masa kejayaannya wakaf memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan dan kemajuan ekonomi umat Islam. Sejarah mencatat pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriah, lembaga wakaf yang

dikelola oleh Sultan dan Amir berada pada puncak kejayaannya. Pengelolaan yang profesional menjadi kunci utama pencapaian jumlah aset wakaf yang sangat besar. Pencapaian inilah yang kemudian dapat didistribusikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi.¹

Setelah melewati era keemasan di atas, lembaga wakaf terus mengalami kemunduran dari masa ke masa. Sadar akan begitu pentingnya peran yang diberikan, sejumlah negara berpenduduk (mayoritas) muslim di belahan dunia ingin kembali mengulang torehan “tinta emas” yang pernah dicapai oleh lembaga wakaf. Indonesia tidak diam begitu saja, merespon hal tersebut Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf sebagai legalitas lembaga perwakafan. Undang-Undang ini merupakan penyempurna bagiregulasi-regulasi yang telah ada sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Buku III (Hukum Perwakafan).

Terlepas dari pro-kontra yang berkembang, kebijakan pemerintah Indonesia untuk menyempurnakan regulasi wakaf melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 membawa nuansa baru terhadap praktik wakaf yang ada, termasuk di dalamnya disebutkan peraturan wakaf uang (*cash waqf*) yang memungkinkan pengelolaan wakaf secara produktif dengan menjaga nilai aset wakaf dan mendistribusikan hasilnya sebagai upaya perwujudan kesejahteraan umum.

Berkembangnya konsep wakaf uang dan wakaf produktif lainnya, melahirkan modifikasi-modifikasi baru di bidang perwakafan, termasuk yang sedang menjadi fokus penelitian ini yaitu wakaf dalam bentuk asuransi syariah. Wakaf model ini mulai beroperasi bersamaan dengan lahirnya fatwa DSN-MUI No: 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah. Wakaf asuransi syariah atau yang dikenal

¹Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia, Sejarah, Landasan Hukum Dan Perbandingan Antara Hukum Barat, Adat Dan Islam* (Malang : Setara Press, 2017).

dengan wakaf manfaat asuransi syariah memunculkan daya tarik tersendiri dan potensial pada era sekarang mengingat kemudahanyang ditawarkan oleh wakaf ini dapat diterapkan oleh siapa pun. Sejalan dengan hal tersebut, ketua BWI menyatakan bahwa strategi pengelolaan wakaf ke depan adalah investasi, wakaf jenis ini dapat menjadi *problem solving* perekonomian umat.²

Namun di sisi lain, keberadaan regulasi wakaf secara umum maupun lebih spesifik wakaf asuransi syariah belum menampakkan hasil signifikan berdasarkan potensi yang dimiliki dengan realisasinya. Sebagai contoh, Luas tanah wakaf di Indonesia (memiliki sertifikat tanah wakaf dari BPN) mencapai 111.481.173 M²,³ belum mampu dimaksimalkan secara baik. Begitu juga dengan wakaf uang, potensinya setiap tahun yang mencapai Rp. 3 triliun hanya mampu dihimpun dan dikelola sebesar Rp. 400 miliar oleh Badan Wakaf Indonesia.⁴

Sama halnya dengan potensi wakaf uang, wakaf asuransi syariah juga dinilai memiliki masa depan cerah dalam rangka menggali potensi wakaf yang belum sesuai dengan ekspektasi wakaf saat ini. Setidaknya jika dilihat dari faktor perkembangan industri keuangan asuransi syariah yang berkembang saat ini dapat memberikan gambaran hipotesis awal bahwa wakaf sebagai produk asuransi syariah akan berjalan seirama dengan tumbuh berkembangnya perusahaan asuransi syariah itu sendiri. Tulisan ini bermaksud mengeksplorasi lebih jauh tentang perkembangan wakaf asuransi syariah dan menjelaskan kemungkinan potensi yang dapat dicapai melalui sinergi wakaf dan perusahaan asuransi syariah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini berusaha mengeksplorasi dan memahami bagaimana perkembangan dan potensi wakaf asuransi syariah dengan dengan mengacu pada besarnya potensi industri asuransi syariah saat ini. Menggunakan pendekatan kualitatif⁵, tulisan ini akan mendeskripsikan persoalan wakaf asuransi syariah

²"Badan Wakaf Indonesia."

³"Badan Wakaf Indonesia."

⁴Khadijah Hasim, Deni Lubis, and Khalifah Muhammad Ali, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang Di Indonesia (Pendekatan Analytical Network Process)', *Jurnal Al-Muṣṣara'ah Vol.4, No.2, 2016, 4.2* (2016).

⁵John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

secara komprehensif dan menafsirkannya untuk kemudian menarik kesimpulan dan hasil penelitian.

Metode dokumentasi⁶ digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Dokumen-dokumen dimaksud berupa data-data yang memuat permasalahan wakaf asuransi syariah, yang terfokus pada peluang serta potensinya ke depan dalam dunia filantropi Islam di Indonesia.

Selanjutnya teknik analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan membuat gambaran menyeluruh (*general sense*)⁷ atas keseluruhan data yang diperoleh berkaitan dengan wakaf dan asuransi syariah, menganalisa data-data tersebut secara induktif, serta melakukan interpretasi atau pemaknaan data berupa kesimpulan yg diperoleh berdasarkan perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yg bersumber dari literatur yang berbicara mengenai wakaf dan asuransi syariah. Dengan demikian dalam penelitian ini akan ditemukan kesimpulan yang menggambarkan perkembangan dan potensi yang dimiliki oleh wakaf asuransi syariah.

C. Perkembangan Wakaf

Sebelum sampai pada pokok pembahasan potensi wakaf asuransi syariah, terlebih dahulu dipaparkan gambaran umum wakaf dan asuransi syariah. Wakaf dalam kajian hukum Islam berasal dari bahasa Arab al-waqf yang merupakan mashdar dari kata waqafa-yaqifu-waqfan. Secara bahasa wakaf diartikan sebagai al-habs (menahan), bentuk mashdar dari habasa-yahbisu-habsan. Fuqaha mengartikan wakaf dengan menahan harta tertentu yang bisa dipindah milikkan, mungkin untuk dimanfaatkan tanpa mengurangi fisiknya, dan memutus hak tasharruf pada harta tersebut karena ditujukan untuk ditasharrkan di jalan kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Penggunaan kata al-waqf dibatasi pada obyek tertentu berupa benda wakaf, sehingga kata al-waqf memiliki kesamaan arti dengan al-habs. Mausu'ah Fiqh Umar Ibn Khottab mendefinisikan kata al-waqf dengan menahan asal harta dan menjalankan hasilnya.

⁶Arikunto Suharsimi, "Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)," *Jakarta: Rineka Cipta* (2013).

⁷Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*.

Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat (1) mendefinisikan wakaf sebagai “perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”. Tidak jauh berbeda, Hukum Wakaf Indonesia dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan dalam pasal 1 ayat (1) bahwa “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Wakaf merupakan salah satu filantropi Islam yang berbentuk aktiva tetap, misalnya wakaf tanah dan bangunan yang diperuntukkan sebagai pengembangan lembaga pendidikan, masjid, serta lembaga sosial-keagamaan yang lain. Pada perkembangannya, wakaf yang semula hanya terbatas pada benda-benda tidak bergerak, kemudian mengalami modifikasi dengan munculnya konsep wakaf tunai “cash waqf” sebagaimana yang terjadi pada masa khalifah Utsmaniyyah.

Berbeda dengan filantropi Islam lainnya (seperti Zakat, dsb), wakaf memiliki syarat-rukun yang terbilang ketat. Wakaf dianggap sah (boleh) apabila memenuhi ketentuan-ketentuan berikut. Pertama, mauquf (harta yang diwakafkan) adalah berupa barang yang dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi fisik barang tersebut, dan kemanfaatan diperbolehkan oleh syara'. Kedua, wakaf harus diperuntukan pada asal (mauquf alaih pertama) yang ada dan far' (mauquf alaih berikutnya) yang tidak akan terputus. Ketiga, wakaf tidak dilakukan pada hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Islam. Tidak berhenti di sana, akad wakaf juga menghendaki terpenuhinya 4 (empat) rukun. Pertama, orang yang berwakaf (waqif). Kedua, benda yang diwakafkan (mauquf). Ketiga, ikrar wakaf atau dikenal dengan istilah sighat wakaf. Keempat, orang yang menerima manfaat/peruntukan wakaf (mauquf 'alaih).

Bentuk wakaf dalam praktik perwakafan pada periode awal Islam telah dikenal dua jenis wakaf, yaitu wakaf yang diperuntukkan untuk orang-orang

tertentu saja dan wakaf untuk umum. Wakaf yang disebutkan pertama dalam istilah fiqh disebut dengan wakaf ahly, misalnya wakaf yang diperuntukkan untuk para cucu atau untuk kerabat. Asal mula wakaf ahly adalah peristiwa wakaf yang dilakukan oleh sahabat Abu Talhah dengan dengan petunjuk Rasulullah, Abu Talhah memberikan sebidang tanah untuk diwakafkan kepada kerabatnya. Berbeda dengan wakaf ahly, wakaf yang diperuntukkan untuk umum dikenal dengan sebutan wakaf khoiry. Contoh wakaf khoiry adalah yang pernah dipraktikkan salah seorang sahabat dari Bani Ghifar. Sahabat tersebut mewakafkan sebuah mata air (mata air rawmah) untuk keperluan kaum muslim secara umum. Pada dasarnya kedua bentuk wakaf ini tidak berbeda kecuali dalam hal peruntukannya, wakaf ahly diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, sementara wakaf khoiry diperuntukkan bagi umum.

Melihat kedua jenis wakaf di atas, maka wakaf khoiry yang diperuntukkan untuk kemaslahatan bersama memberikan keleluasaan bagi pengelola wakaf untuk mengembangkannya, baik dalam bentuk investasi atau usaha-usaha lainnya yang sejalan dengan prinsip Islam.

D. Asuransi Syariah dan Wakaf Asuransi Syariah

Kemunculan wakaf tunai memberikan peluang bagi setiap orang dari segala lapisan masyarakat dapat mewakafkan harta bendanya tanpa harus menunggu memiliki sebidang tanah atau bangunan. Demikian halnya, wakaf tunai secara tidak langsung menjadi pembuka bagi munculnya model-model lain di bidang perwakafan, salah satunya wakaf manfaat asuransi syariah. Wakaf yang disebutkan belakangan masih belum banyak dikenal oleh masyarakat muslim di Indonesia.

Berbeda dengan wakaf yang sudah dikenal pada masa Nabi Muhammad, dalam sejarah tidak ditemukan literasi yang membuktikan adanya asuransi pada masa Nabi, sahabat, dan bahkan era tabi'in. Mengutip apa yang ditulis oleh Arif Effendi, dijelaskan bahwa asuransi baru ada sekitar tahun 1182 M. Kemunculan konsep yang mirip dengan asuransi tersebut dilatarbelakangi oleh pengusiran negara Perancis terhadap orang-orang Yahudi untuk menjamin resiko barang-

barang bawaan mereka yang diangkut melalui jalur laut. Pada tahun 1680 M di London diadakan lembaga asuransi kebakaran sebagai imbas kebakaran pada tahun 1666 yang telah menghancurkan sekitar 13.000 rumah dan 100 buah gereja.⁸ Istilah asuransi adalah saduran yang diambil dari berbagai bahasa yakni bahasa Inggris *assurance* yang berarti jaminan, bahasa Italia *insurensi* yang berarti jaminan dan dari bahasa Belanda *assurantie* yang memiliki arti pertanggungan. Sedangkan dalam bahasa Arab kata asuransi dikenal dengan tiga sebutan yakni *at-ta'min* (ketenangan, rasa aman, perlindungan dan bebas dari rasa takut), *at-takaful* (menjamin atau saling menanggung) dan *tadhamun* (saling menanggung).⁹ Asuransi-asuransi di atas masih bersifat konvensional dan belum menggunakan konsep asuransi syariah sebagaimana yang kita pahami saat ini.

Asuransi syariah mempunyai kesamaan dengan beberapa akad dalam bahasa Arab, yaitu *takaful*, *ta'miin* dan *tadlaamun* yang berarti saling menolong dan menanggung. Istilah ini selaras dengan pengertian yang dipaparkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwanya Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, di sana disebutkan bahwa Asuransi Syariah (*Ta'min*, *Takaful*, atau *Tadhamun*) adalah “usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *Tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariat Islam”.¹⁰ Istilah Syariah mengantarkan pada pemahaman yang berbeda dengan asuransi konvensional. Instrumen dalam asuransi syariah mengacu pada penanaman modal pada perusahaan atau lembaga yang bebas dari hal-hal yang dilarang oleh Islam. Definisi tersebut mengindikasikan adanya prinsip dasar ekonomi Islam yang mengarah pada upaya untuk menolong satu sama lain dalam bingkai kemaslahatan bersama sebagai hamba Allah.

⁸Afif Effendi, “ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA (Studi Tentang Peluang Ke Depan Industri Asuransi Syariah),” *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 3, no. 2 (2016).

⁹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep Dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).

¹⁰Dewan Syariah Nasional MUI, ‘Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah’, 2001.

Konsep asuransi syariah sendiri mengacu pada konsep masalah mursalah, dimana terdapat dua pihak yang melakukan interaksi sosial, satu pihak berperan sebagai penolong dan pihak lainnya sebagai pihak tertolong. Proses interaksi ini penting karena setiap individu memperoleh jaminan dan perlindungan baik jiwa maupun harta bendanya.¹¹

Asuransi syariah menjadi “pengganti” terhadap sistem konvensional yang dalam praktiknya menggunakan akad pertukaran yang tidak sesuai dengan konsep Islam. Pola yang diterapkan asuransi syariah mendorong kepada setiap peserta untuk saling membantu dan tolong menolong satu sama lain dengan mengalokasikan sebagian dana asuransinya dalam bentuk *tabarru'* (untuk kebaikan bersama/kebajikan). Dana *tabarru'* tersebut akan disalurkan untuk siapa pun diantara peserta asuransi yang mendapat risiko (musibah) secara tidak terduga. Definisi ini menarik pada satu kesimpulan bahwa akad dalam asuransi syariah adalah akad untuk saling menolong (*takafuli*), bukan akad pertukaran.¹²

Pada praktiknya, dana iuran premi yang terhimpun dari semua peserta akan dikelola oleh perusahaan asuransi syariah untuk diinvestasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah dimaksud adalah akad (investasi) yang di dalamnya tidak mengandung unsur penipuan (*gharar*), perjudian (*maysir*), riba, penganiayaan (*dhulm*), suap (*risywah*), investasi pada barang haram, dan untuk tujuan maksiat. Prinsip-prinsip inilah yang membuatnya berbeda dengan sistem asuransi konvensional.¹³

Sama halnya seperti asuransi secara umum, asuransi syariah juga terbagi ke dalam dua jenis, pertama asuransi keluarga/jiwa dan kedua dikenal dengan istilah asuransi umum. Terdapat konsep yang hampir sama antara jenis asuransi syariah dengan jenis wakaf yang terdiri dari wakaf *ahly* dan wakaf *kehoiry*. Tidak hanya terbatas pada kemiripan jenis, keduanya juga mempunyai tujuan (*ghayah*) yang serupa. Wakaf dan asuransi syariah sama-sama bertujuan untuk saling tolong dan

¹¹Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariaah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

¹²Ali, *Hukum Asuransi Syariaah*

¹³Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.”

membantu meringankan beban sesama hamba Allah untuk mencapai kemaslahatan umum. Namun, keduanya sudah pasti memiliki aturan main berbeda dalam hal syarat, rukun, dan mekanisme operasional.¹⁴

Perbedaan dalam hal ketentuan syarat dan rukun tidak serta merta menghalangi keduanya saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang “sama”. Pada konteks ini, lembaga asuransi syariah dapat menempati peran sebagai penerima sekaligus pengelola wakaf uang sebagaimana bank-bank syariah (LKS-PWU). Baik bank syariah maupun asuransi syariah mengemban tanggung jawab yang sama agar bersinergi dengan nadzir untuk menerima wakaf uang sebagaimana yang diharapkan oleh Negara melalui Undang-undang.¹⁵

Terdapat tiga model konsep wakaf dalam asuransi syariah. Pertama, wakaf sebagai model asuransi. Wakaf sebagai model asuransi merupakan wakaf yang menjadikan *tabarru' fund* yang ada pada asuransi syariah sebagai dana wakaf. Salah satu praktiknya antara lain perusahaan membentuk dana wakaf sebelum peserta asuransi *ber-tabarru*, selanjutnya dana tabarru tersebut dialokasikan ke dalam dana wakaf *fund*, bukan *tabarru' fund*. Kedua, ada model wakaf yang dikenal dengan wakaf polis. Manfaat Polis yang sudah dipegang oleh pemegang polis diwakafkan kepada nazhir wakaf. Model ketiga adalah wakaf sebagai fitur produk asuransi syariah. Wakaf sebagai produk adalah produk yang dibuat perusahaan asuransi syariah di mana manfaat investasi dan manfaat asuransi diniatkan untuk diwakafkan.¹⁶

Terbitnya fatwa DSN MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah membawa lompatan baru bagi munculnya potensi-potensi wakaf di Indonesia. Namun sayangnya, lahirnya fatwa tersebut belum banyak diketahui dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Minimnya pengetahuan masyarakat muslim Indonesia tentang adanya konsep wakaf yang berkolaborasi dengan asuransi syariah secara tidak langsung menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi belum ada perkembangan signifikan pada akad wakaf asuransi syariah.

¹⁴“Badan Wakaf Indonesia.”

¹⁵“Badan Wakaf Indonesia.”

¹⁶“Badan Wakaf Indonesia.”

E. Perkembangan Wakaf Asuransi Syariah di Indonesia

Sebagai negara yang penduduknya mayoritas muslim, Indonesia memiliki potensi wakaf uang yang sangat besar. Menurut Rusydiana sebagaimana Nasution bahwa jumlah muslim dermawan di Indonesia diperkirakan sebanyak 20 juta umat dan mewakafkan hartanya dengan bentuk uang dengan nominal 1 juta pertahun, sehingga potensi wakaf uang yang terkumpul mencapai 20 Triliun.¹⁷

Perkembangan wakaf uang di Indonesia dan negara-negara muslim pada umumnya, menunjukkan pertumbuhan positif dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan salah satunya oleh adanya sifat fleksibel dalam arti bahwa orang tidak perlu menunggu memiliki sebidang tanah atau bangunan untuk diwakafkan. Konsep wakaf uang tersebut memungkinkan seseorang dengan nominal uang berapa pun dapat dengan mudah mengikrarkan wakaf. Kemudahan ini mulai berlaku sejak terbitnya legalitas wakaf uang. Hal ini secara tidak langsung berdampak pada modifikasi-modifikasi baru terhadap konsep wakaf uang tersebut, di antaranya adalah kemunculan wakaf asuransi syariah yang sedang penulis bahas dalam penelitian ini. Selain wakaf uang sebagai embrio bagi kemunculan wakaf asuransi syariah, pertumbuhan asuransi syariah dalam beberapa tahun ini juga akan mempengaruhi seberapa cepat wakaf asuransi syariah berkembang.

Industri keuangan syariah termasuk di dalamnya asuransi syariah di Indonesia berpotensi besar menjadi pesaing di tingkat global dalam bidang keuangan syariah. Peluang tersebut dapat dilihat dari beberapa hal berikut: Pertama, Indonesia dengan mayoritas muslim melebihi 230 juta jiwa¹⁸ menjadi potensi tersendiri bagi pertumbuhan nasabah industri keuangan syariah; Kedua, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di Indonesia, di mana ekonomi mengalami pertumbuhan cukup baik yaitu sekitar 6,0%-6,5%. Ketiga, perubahan *sovereign credit rating* Indonesia menjadi *investment grade* dapat menjadi daya

¹⁷ Aam Rusydiana and Solihah Sari Rahayu, "Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia?," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 5, no. 1 (2019).

¹⁸ KNKS, "Menangkap Peluang Tren Wakaf Produktif," *Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)*, no. 4 (2019), [https://knks.go.id/storage/upload/1569306459-KNKS Edisi Keempat - September](https://knks.go.id/storage/upload/1569306459-KNKS%20Edisi%20Keempat%20-%20September.pdf).

tarik bagi investor melakukan investasi di Industri keuangan domestik. Keempat, anugerah kekayaan sumber daya alam dapat dijadikan sebagai *underlying* transaksi industri keuangan syariah.¹⁹

Besarnya potensi asuransi syariah sebagaimana disebutkan di atas, tidak kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa potensi wakaf asuransi syariah juga besar, mengingat ia hanya bagian kecil dari perjalanan pertumbuhan wakaf asuransi syariah. Potensi wakaf asuransi syariah di Indonesia dapat dipetakan setelah ditemukan peluang dan juga tantangan yang dihadapi dalam perjalanan wakaf sebagai produk dari asuransi syariah.

Sama seperti halnya wakaf uang, wakaf asuransi syariah juga berdampak pada mobilisasi dana dari masyarakat menjadi lebih fleksibel.²⁰ Beberapa alasan yang menjadi kekuatan bagi perkembangan wakaf asuransi syariah adalah:

- a. Waqif sebagai pemberi wakaf memiliki ruang lingkup (segmentasi) yang lebih luas jika dibanding dengan wakaf biasa.
- b. Industri Asuransi syariah yang berkembang signifikan di Indonesia secara berangsur-angsur menjadikan wakaf sebagai produk di dalam industri asuransi syariah.
- c. Jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim mencapai 87% atau sekitar 230 juta jiwa²¹ menjadi pasar yang menjanjikan dalam pengembangan wakaf asuransi syariah.
- d. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi syariah kepada nasabah dengan produk wakaf akan memberikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat muslim untuk berwakaf melalui perusahaan asuransi syariah.

Pemetaan potensi wakaf asuransi syariah tidak dapat dipisahkan dari potensi wakaf secara umum, terutama potensi wakaf uang. Jumlah penduduk Indonesia 268 juta jiwa, yang mayoritas beragama Islam (BPS, 2019)²² merupakan aset luar

¹⁹Effendi, "ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA (Studi Tentang Peluang Ke Depan Industri Asuransi Syariah)."

²⁰"Badan Wakaf Indonesia."

²¹KNKS, "Menangkap Peluang Tren Wakaf Produktif."

²²BPS, "Statistik Indonesia 2020 Statistical Yearbook of Indonesia 2020," *Statistical Yearbook of Indonesia*, no. April (2020).

biasa dalam rangka penghimpunan dan pengembangan wakaf uang termasuk di dalamnya wakaf asuransi syariah. Melalui pengelolaan yang tepat, dana yang terkumpul akan sangat berpengaruh dan dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat.

Perhitungan potensi wakaf harta bergerak berupa uang sangat beragam tergantung asumsi dan argumentasi yang digunakan. Pertama, berdasarkan data Susenas tahun 2014, yang memperkirakan jumlah penduduk Muslim di Indonesia mencapai 197 juta jiwa dan tersebar di 33 provinsi. Kedua, didasarkan pada tingkat pendapatan penduduk, yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu penduduk dengan pendapatan menengah dan penduduk dengan pendapatan tinggi, kemudian tingkat pendapatan inilah yang dijadikan dasar atas perhitungan wakaf harta bergerak berupa uang. Ketiga, potensi wakaf uang dihitung dengan membedakan 3 asumsi, yaitu:

- a) Rendah, yaitu penduduk yang berwakaf (wakif) diperkirakan hanya sebesar 10 persen saja dari jumlah penduduk Muslim dengan wakaf senilai Rp. 10.000 per orang setiap bulan;
- b) Moderat, yaitu wakif diperkirakan sebesar 25 persen dari jumlah penduduk Muslim dengan wakaf senilai Rp. 10.000 per orang setiap bulan;
- c) Tinggi (optimis), wakif sebesar 50 persen dari jumlah penduduk Muslim dengan wakaf senilai Rp. 10.000 per orang setiap bulan.

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa sekitar 98,89 persen potensi wakaf uang berasal dari penduduk Muslim dengan pendapatan menengah, sementara sisanya merupakan potensi wakaf uang dari penduduk Muslim yang memiliki penghasilan tinggi. Jika 10 persen saja setiap penduduk Muslim mengeluarkan wakaf uang setiap bulan senilai Rp10.000, maka akan terkumpul wakaf uang senilai Rp. 197,0 miliar dalam satu bulan atau sekitar Rp. 2,36 triliun setiap tahunnya. Apabila lebih dari 10 persen dari penduduk muslim yang mengeluarkan wakaf uang, maka potensinya akan semakin tinggi dan besar.²³

²³Muhammad Afdi Nizar, *Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia: Potensi dan permasalahan*, dalam "Penguatan Fundamental Sektor Keuangan dalam Mendukung Stabilitas Perekonomian" (Jakarta: Nagakusuma Media Kreatif, 2017).

Selain memiliki keterkaitan dengan wakaf uang, wakaf asuransi syariah juga sangat bergantung pada instrumen asuransi syariah. Asuransi syariah sebagai perusahaan penyedia produk wakaf sekaligus menjadi pengelola dana wakaf yang terkumpul dalam rekening *tabarru'* peserta asuransi untuk diinvestasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dijelaskan di muka.

Perkembangan yang dimiliki oleh asuransi syariah selama 5-10 tahun terakhir, mengantarkan pada suatu kesimpulan bahwa perkembangan wakaf yang terintegrasi dengan perusahaan asuransi memiliki prospek dan potensi besar di tahun-tahun mendatang. Memang masih terlalu dini untuk menyimpulkan hal tersebut, mengingat wakaf yang terintegrasi dengan asuransi syariah baru diperkenalkan selama 4 tahun terakhir. Akan tetapi berpikir optimis merupakan pilihan tepat sebagai langkah awal mengembangkan wakaf sebagai produk yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah.

Dalam angka, perkembangan asuransi syariah di Indonesia mengalami peningkatan baik dari perusahaan asuransi maupun dari asuransi luar negeri yang hampir mayoritas memiliki produk asuransi syariah. Setidaknya pada tahun 2012 ada sejumlah 46 perusahaan asuransi dan reasuransi syariah. Total premi asuransi syariah juga menunjukkan perkembangan yang positif di tengah *market share* kontribusi asuransi syariah yang hanya 3.96% terhadap total asuransi. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan.²⁴ Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan hal yang sama, berdasarkan data Asuransi syariah, perusahaan Asuransi dan reasuransi syariah yang telah beroperasi telah mencapai lebih dari 40 perusahaan.

Terbitnya fatwa DSN-MUI No: 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah merupakan peluang yang dapat ditangkap oleh Badan Wakaf Indonesia mengembangkan wakaf uang melalui instrumen perusahaan asuransi syariah di samping wakaf uang yang sudah berjalan melalui LKS-PWU selama ini. Beberapa perusahaan asuransi yang sudah memiliki produk wakaf yang terintegrasi, di antaranya Takaful Keluarga

²⁴Ahmad Rodoni, *Asuransi Dan Pegadaian Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015).

dengan produk Takafuling Salam Wakaf yang diluncurkan pada tahun 2017²⁵, Allianz yang menambahkan fitur Wakaf pada produk Asuransinya²⁶, dan yang terbaru adalah AXA Mandiri unit Syariah meluncurkan produk wakaf.²⁷ Perusahaan-perusahaan asuransi tersebut merupakan sebagian dari sejumlah perusahaan asuransi di Indonesia yang memiliki produk wakaf, baik wakaf manfaat asuransi, maupun wakaf manfaat investasi.

Namun demikian, di samping peluang dan potensi yang dimiliki, wakaf asuransi syariah juga tidak lepas dari tantangan dan kekurangan. Menurut penulis beberapa tantangan tersebut di antaranya:

- a. Sosialisasi yang kurang intensif menjadi penghambat bagi pertumbuhan penghimpunan dana wakaf di sektor tersebut.
- b. Segmentasi wakaf asuransi syariah terbatas pada mayoritas waqif yang berdomisili di kota-kota besar, sementara waqif yang berada di kota kecil belum banyak yang menjadi peserta asuransi syariah, sehingga mereka belum mengenal wakaf model ini.
- c. Tantangan klasik yang tidak kalah penting adalah kesadaran masyarakat untuk beralih dari berwakaf secara konvensional (wakaf tanah, dsb) ke model wakaf produktif, termasuk wakaf manfaat investasi asuransi syariah.

Sosialisasi inilah yang menjadi penyebab utama pemahaman masyarakat mengenai wakaf masih terbilang rendah. Berdasarkan laporan BWI, nilai Indeks Literasi Wakaf (ILW) secara Nasional baru mencapai skor 50,48%. Angka tersebut dikategorikan rendah, terdiri dari Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Dasar sebesar 57,67 dan Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Lanjutan sebesar 37,97 yang berbicara tentang konsep wakaf produktif, wakaf uang, dan termasuk juga wakaf asuransi syariah.²⁸

Sejumlah tantangan di atas akan menghambat perkembangan wakaf asuransi syariah yang memiliki potensi begitu besar. Apabila ketiga hambatan

²⁵“Takaful Asuransi Keluarga.”

²⁶“Allianz Syariah.”

²⁷“AXA-Mandiri Asuransi Jiwa Syariah.”

²⁸Badan Wakaf Indonesia, ‘Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf 2020’, 1 (2020).

tersebut dapat diselesaikan dan dipetakan dengan baik, bukan tidak mungkin wakaf jenis ini akan memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan umat di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan infrastruktur negara.

Keberlangsungan wakaf asuransi syariah juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan wakaf secara umum belum mampu berkontribusi dalam program pemberdayaan umat. Pertama, pemahaman publik tentang hukum wakaf. Masyarakat belum banyak yang memahami hukum wakaf selain hanya terbatas pada wakaf tanah, wakaf bangunan untuk masjid, madrasah, dan sebagainya. Kedua, aspek internal manajemen wakaf belum sesuai dengan yang diharapkan dalam mengelola wakaf. Akibatnya, sejumlah harta benda wakaf banyak yang ditinggalkan, bahkan ada beberapa harta wakaf hilang. Ketiga, adanya pengawasan yang ketat terhadap lembaga pengelola wakaf untuk memastikan bahwa harta benda wakaf dikelola sebaik-baiknya dan seproduktif mungkin.²⁹

F. Kesimpulan

Wakaf asuransi syariah merupakan salah satu model wakaf yang sedang berkembang dengan diperkuat oleh fatwa DSN MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah membawa lompatan baru bagi munculnya potensi-potensi wakaf di Indonesia. Akan tetapi di pihak lain, fatwa tersebut belum mampu memberikan daya dorong maksimal bagi pertumbuhan wakaf asuransi syariah. Melihat instrumen perkembangan asuransi syariah yang demikian pesat, harusnya dapat menjadi peluang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan wakaf melalui industri asuransi syariah untuk menyeimbangkan antara potensi yang ada dan realisasi di lapangan.

Beberapa permasalahan internal maupun eksternal yang perlu diselesaikan bersama guna meningkatkan realisasi potensi yang dimiliki wakaf asuransi syariah adalah dengan peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat mengenai konsep wakaf ini. Pasar peserta asuransi syariah yang terbatas pada masyarakat

²⁹Abd. Kadir Arno, 'Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potensi Dan Tantangan)', *Dinamis- Journal of Islamic Management And Bussines*, 1.2 (2018).

perkotaan menjadi kendala lain yang berdampak langsung bagi jumlah masyarakat yang berwakaf melalui perusahaan asuransi syariah. Di samping itu *mindset* publik untuk berpindah dari pola berwakaf secara konvensional ke arah wakaf produktif menjadi persoalan klasik yang masih menjadi kendala sampai saat ini.

Daftar Pustaka

- Al-Bajury, Ibrahim. *Haasyiyah Al-Bajury*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2007.
- Al-Bantany, Imam An-Nawawi. *Nihayat Al-Zain Fi Irsyad Al-Mubtadiin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Arno, Abd. Kadir. "WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI INSTRUMEN KESEJAHTERAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT (POTENSI DAN TANTANGAN)." *DINAMIS- Journal of Islamic Management And Bussines* 1, no. 2 (2018).
- Badan Wakaf Indonesia. "Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf 2020" 1 (2020): 7–8.
- BPS. "Statistik Indonesia 2020 Statistical Yearbook of Indonesia 2020." *Statistical Yearbook of Indonesia*, no. April (2020): 192.
- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Dewan Syariah Nasional MUI. "Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah" (2001): 1–7.
- Effendi, Afif. "ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA (Studi Tentang Peluang Ke Depan Industri Asuransi Syariah)." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 3, no. 2 (2016): 71.
- Haq, Ahmad Faishal. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Hasim, Khadijah, Deni Lubis, and Khalifah Muhammad Ali. "Analysis of Factors Affecting The Level of Cash Waqf Raising in Indonesia (Analytical Network Process Approach) (Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang Di Indonesia (Pendekatan Analytical Network Process))." *Jurnal Al-Muṣṭarā'ah Vol.4, No.2, 2016* 4, no. 2 (2016): 127–141.
- Kencana, Ulya. *Hukum Wakaf Indonesia, Sejarah, Landasan Hukum Dan Perbandingan Antara Hukum Barat, Adat Dan Islam*. Malang : Setara Press, 2017.
- KNKS. "Menangkap Peluang Tren Wakaf Produktif." *Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)*, no. 4 (2019). [https://knks.go.id/storage/upload/1569306459-KNKS Edisi Keempat - September.pdf](https://knks.go.id/storage/upload/1569306459-KNKS%20Edisi%20Keempat%20-%20September.pdf).

- Rodoni, Ahmad. *Asuransi Dan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Rusydiana, Aam, and Solihah Sari Rahayu. "Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia?" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 5, no. 1 (2019): 15.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Suharsimi, Arikunto. "Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)." *Jakarta: Rineka Cipta* (2013).
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Syariah, Dewan, and Nasional Mui. "Fatwa Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah." *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia* NO: 106/DS, no. 19 (2016): 6.
- Zaenurrosyid, A. "Sengketa Wakaf Dan Penyelesaian Dalam Perspektif Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004." *Journal Islamic Review*, no. 41 (2013).
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- "Allianz Syariah." <https://www.allianz.co.id/produk/asuransi-syariah/fitur-wakaf>.
- "AXA-Mandiri Asuransi Jiwa Syariah." <https://www.axa-mandiri.co.id/axa-mandiri-unit-syariah-ajak-nasabah-berwakaf-melalui-asuransi-jiwa-syariah/#>.
- "Badan Wakaf Indonesia." <https://www.bwi.go.id/4174/2019/12/berita/ketua-bwi-jelaskan-potensi-wakaf-dalam-pembukaan-rakornas/>.
- "Badan Wakaf Indonesia." www.data.bwi.go.id/wakaf-tanah.
- "Badan Wakaf Indonesia." <https://www.bwi.go.id/529/2010/12/artikel/sinergi-wakaf-dengan-instrumen-asuransi-syariah/>.
- "Badan Wakaf Indonesia." <https://www.bwi.go.id/1531/2017/02/berita/berita-wakaf/wakaf-manfaat-asuransi-ini-fatwa-dsn-mui/>.
- "Badan Wakaf Indonesia." <https://www.bwi.go.id/783/2012/05/artikel/aplikasi-wakaf-uang-di-indonesia>.
- "Takaful Asuransi Keluarga." <https://takaful.co.id/2017/09/14/ajak-masyarakat-untuk-berasuransi-sambil-berwakaf-takaful-keluarga-luncurkan-takafulink-salam-wakaf/>.

Parenting Styles of Fishermen and Female Migrant Workers (TKW) Families in Instilling Religious Characters for the Children's

Nailul Ghuftron Aziz
Socio-Religious Researcher
nailulghuftron1995@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the types of parenting for the families of fishermen and Female Migrant Workers (TKW) as well as the driving and inhibiting factors in the formation of religious character in children. This research is a field research using a qualitative approach. The data in this study were obtained through interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that: First, the parenting styles used by several mothers in fishermen families are authoritarian, militaristic, democratic, purposeful, and paternalistic. The parenting styles used by fathers in TKW families are role-transfer, laissez-faire, transactional, and affiliation. Second, there are several driving and inhibiting factors in the formation of religious character in children. These factors are the structure of the physical environment, social environment, educational environment, psychological atmosphere in the family, socio-culture in the family, and parental control of their children. The success of these factors is influenced by parent's attention. Parents who care about their children tend to have success in all elements of environmental structures. On the other hand, parents who are indifferent to their families tend to fail in all elements of structures.

Keywords: Parenting; Fisherman Family; TKW Family; Religious Character.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui jenis pola asuh pada keluarga Nelayan dan Pekerja Migran Wanita (TKW) serta faktor pendorong dan penghambat pembentukan karakter religius pada anak. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, pola asuh yang digunakan oleh beberapa ibu dalam keluarga nelayan adalah otoriter, militeristik, demokratis, bertujuan, dan paternalistik. Pola asuh yang digunakan ayah dalam keluarga TKW adalah alih peran, laissez-faire, transaksional, dan afiliasi. Kedua, adanya beberapa faktor pendorong dan penghambat pembentukan karakter religius pada anak. Faktor-faktor tersebut adalah struktur lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan pendidikan, suasana psikologis dalam keluarga, sosial budaya dalam keluarga, dan pengawasan orang tua terhadap anaknya. Keberhasilan faktor tersebut dipengaruhi oleh perhatian orang tua. Orang tua yang peduli pada anaknya cenderung sukses di semua elemen struktur lingkungan. Di sisi lain, orang tua yang acuh tak acuh terhadap keluarganya cenderung gagal di semua elemen struktur.

Kata kunci: Orang Tua; Keluarga Nelayan; Keluarga TKW; Karakter Religius

A. Introduction

The Indonesian nation is currently faced with the problem of moral decay that has occurred among its young generation. There is a lot of evidence that shows that this moral decay is done by children who are still in school, such as cheating, truancy, drugs, promiscuity, and brawls between students. In this case, there needs to be provisioning from an early age to control children's behavior to minimize delinquency in the future. The most important party in this matter is family.

The first education a child gets is education from the family. A good family education has a great potential to produce a qualified generation that will provide a positive impact on the society.¹ According to Jalaluddin, family is the first field of education and the educators are his own parents.² Parents (father and mother) are natural educators whom Allah has mandated to nurture, supervise, and guide their children, as Imam al-Ghazali, a Persian Muslim philosopher and theologian said:

والطفل كما قال الإمام الغزالي أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهره نفيسة خالية من كل نقش وصورة فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه ابواه³
"A child is a mandate or a gift from Allah to both mother and father. The child's heart is still clean, like a precious jewel, devoid of all kinds of paintings and images. When the child is accustomed to good things, taught to him good things, the child will grow up to be a good human being and will find happiness in this world and the hereafter. Both parents also get rewarded too."

Parents (father and mother) have the same responsibility in caring for children. The responsibility of a mother is as great as a father. Rasul SAW. has said:

والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها (رواه البخاري ومسلم)⁴
"A man is a shepherd (leader) in his family and he is responsible for that shepherding. And a woman is a shepherd (leader) in her husband's house and she is responsible for shepherding (whatever she leads)."

¹ M. Sofyan Al-Nashr, "Pendidikan Keluarga Dalam Pemikiran Sahal Mahfudh," *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender dan Anak* 1, no. 2 (December 30, 2016): 99.

²Jalaluddin, *Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-prinsip Psikologi*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, 255.

³Musthafa al-Ghalayini, *Idzab an-Nasyi'in: Kitab Akhlak wa Adab waj Timaa'*, Cet. V, Bairut: at-Thab'ah al-Wathaniyah, 1936, 189

⁴ Nashih Ulwan, *Tarbiyah al-Aulaad fi al-Islam*, Juz I, Kairo: Daar as-Salaam, 1996, 145.

Thus, it is clear that the role of parents can no longer be ignored in family education. Education is the process of humanization.⁵ A harmonious family education from father and mother will help children achieve their development. Therefore, a father and mother need to determine the right family parenting style as a guide in educating their children. In Indonesian, parenting styles consists of three words, namely the pattern, foster and family. According to a Large Indonesian Dictionary (KBBI), Pattern means a fixed style, model, system, work method, form (structure).⁶ Meanwhile, the word foster includes all aspects related to maintenance, care, support, and assistance so that people can stand and live their lives in a healthy manner.⁷ While the definition of family is as follows:

والأسرة: عشيرة الرجل وأهل بيته⁸

Family: someone's relatives, residents of his house.

والأسرة: أهل الرجل وعشيرته، والجماعة يربطها أمر مشترك⁹

Family: residents of a person's house, their relatives and groups with whom they have a cooperative relationship

From this explanation, it can be understood that parenting style means the habits of parents (father and mother) in leading, caring for, and guiding children in the family. That the family has a role in educating, teaching knowledge, and evaluating every attitude and behavior of elementary school students as long as he was in the scope of the family, school, and community.¹⁰ Parenting style to create a generation that is aware of moral values is inseparable from religious signs. Islam in this case has provided limits on human behavior in all aspects, both from the social, cultural, economic, and moral aspects that have been regulated by Allah in his holy word which

⁵Zuhri, "Aksiologi Nilai Pendekatan dan Strategi Penanaman Nilai dalam Pendidikan Islam (Keadilan, Tolong Menolong, Tanggung Jawab)", *Jurnal Islamic Review*, Vol. 9 No. 1 (April 2020), 142.

⁶Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet IV, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, 1029

⁷ Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, 50-51

⁸Abul Fadhal Jamaluddin Muhammad ibn Makram ibn Manzur al-Afriqi al-Misri, *Lisan al-Arab*, Jilid 4, Beirut: Daru Sadir, 1405 H, 20.

⁹Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wariz*, Kairo: Dar al-Tsaqafah, 1411 H, 16.

¹⁰Hidar Amaruddin, dkk., "Peran Keluarga Dan Media Sosial Dalam Pembentukan Karakter Santun Siswa Di Sekolah Dasar", *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. 10 No. 1 (April 2020), 33.

is then used as a guide for human life. As has been confirmed by Allah SWT. in his words Sura Al-Jasiyyah verse 20 which reads:

هٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ٢٠

Translation: "These are clear evidences to men and a Guidance and Mercy to those of assured Faith (Sura Al-Jasiyyah verse: 20)"¹¹

so that the cultivation of religious character is very necessary to achieve a good personality of the children.

Thomas Lickona argues that character contains three main elements, namely knowing the good, desiring the good, and acting the good.¹² Character education is the process of providing guidance to children or students to become fully human beings who have character in the dimensions of heart, mind, body, taste and intention.¹³ Meanwhile, the root word of 'religious' is a religion which comes from a foreign language *religion* as a form of a noun which means religion or belief in the existence of something natural power above humans. "Religious connected with religion or with a particular religion".¹⁴ So, religious character is a strong attitude in embracing and carrying out religious teachings and as a reflection of his obedience to the teachings of his religion.

But what happens when the role of one parent (father or mother) is neglected. As happened in the family of fishermen in the village of Bendar Juwana Pati and the families of female migrant workers (TKW) in Sundoluhur Kayen Pati. In general, the fishermen of Bendar Juwana Pati are large fishermen (modern fishermen) who work to catch fish using purse seine (in Indonesian = *pukat cincin*), long bag set net (in Indonesian = *pukat labuh*), and bottom long line (in Indonesian = *rawai dasar*). They go and return home uncertainly for months spending the night at sea with their shipmates. A father who works as a fisherman rarely meets his children because of

¹¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013, 500.

¹² Thomas Lickona, *Educating for Character: How Our Schools Can Respect and Responsibility*, New York: Bantam Books, 1991, 16

¹³ Nailul Ghufron Aziz, "Relevansi Konseptual Model Hadits Pendidikan Karakter dalam Keluarga Perspektif Kitab *Adab Al-Mufrad* dan *Tarbiyah Al-Aulad Fi Al-Islam* Terhadap Konteks Kekinian," *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* (2019).

¹⁴ Martin H Manser, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, New York: Oxford University Press, 2006, 357.

his busy life at sea. They can come together as a whole family for only a few days. The same is felt by the families of TKW in Sundoluhur Kayen Pati. In general, the female migrant workers (TKW) of Sundoluhur Kayen Pati work in Taiwan, Korea, Singapore, and Hong Kong. They go and return home for uncertain time, togetherness as a whole family of course does not happen. This makes the environment less conducive to build character for children.

The problem that will be revealed in this research is how is the parenting style of the families of fishermen in Bendar Juwana Pati and TKW in Sundoluhur Kayen Pati in instilling religious character in children and what are the driving and inhibiting factors of the parenting style of the families of fishermen in Bendar Juwana and TKW Sundoluhur Kayen in instilling religious character in children? The purpose of this study was to determine the parenting style and the factors inhibiting and encouraging the families of fishermen in Bendar Juwana Pati and the families of TKW in Sundoluhur Kayen Pati in instilling religious character in children. So far, there have been many studies that examine character education. However, this research focuses on the parenting style of the families of fishermen in Bendar Juwana Pati and TKW in Sundoluhur Kayen Pati in instilling religious character in children, so this research is deemed necessary.

B. Method

This study used a qualitative approach which aimed to describe and analyze the phenomena, events, social activities, attitudes, beliefs, perception, people's thoughts individually or in groups¹⁵, where data which is presented not in the form of numbers but in the form of words and representation¹⁶, so that the results of the research are in the form of descriptions and interpretations. The population in this study were the families of the fishermen in Bendar Village and the families of TKW Kayen Village. Determination of data sources in this study was carried out using snowball sampling. Snowball sampling is a technique of taking data sources, which at

¹⁵Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010, 60-61.

¹⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005, 103.

first are small, in number, over time they become larger.¹⁷ The data in this study were obtained through interviews, observation, and documentation. This research is a qualitative research, so that the data analysis is in the form of data reduction, data display, and conclusion drawing and verification.

C. Results and Discussion

Based on the results of the data that the researcher obtained about the parenting style of the families of fishermen and female migrant workers (TKW) in instilling religious character in children, it is stated that each family has different parenting styles and driving and inhibiting factors in instilling religious character in children. This can be seen from the results of interviews with the families of fishermen in Bender Village and TKW from Kayen Village with the following explanation:

1. The Parenting Style of Fishermen and Female Migrant Workers Families

There are several types of parenting that is applied by the fishermen families in Bender Village. The types of parenting include authoritarian, militaristic, democratic, purposeful, and paternalistic.

a. Authoritarian parenting

One of the parents who applies authoritarian parenting in instilling a religious character in their children is Mrs. Ning Tias Warastuti (Mrs. Tutik). He has two daughters named Ane and Trevi. The responsibility for educating children is fully delegated to Bu Tutik. This is because her husband goes sailing and is rarely home. Parents with this authoritarian type tend to be controllers, always impose their will on their children, are not open to children's opinions, find it difficult to accept suggestions and tend to impose their will on differences, too trusting in themselves so that they close the discussion.¹⁸

This is reflected in the results of the interview with Mrs. Tutik that she manages everything related to her children, especially in terms of fulfilling his obligations as a Muslim. In everyday life, Mrs. Tutik has rules that Ane and

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2010, 300.

¹⁸Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua...*, 60.

Trevi must obey. If these rules are violated by them, then Mrs. Tutik will punish Ane in the form of confiscating her favorite bicycle for one week and confiscating her motorbike for one week as punishment for Trevi.

b. Militaristic parenting

One of the parents who applies militaristic parenting in instilling a religious character in their children is Mrs. Hj. Endang Setyorini (Mrs. Rini). She and her husband handle the responsibility of educating children. Because it happened that her husband had not gone sailing. He has children named Rida, Dina, and Krishna. This militaristic type of parent likes to rule. Without much dialogue, the children must obey their orders. It cannot be denied, must obey the orders and prohibitions. In certain circumstances, there is a threat, in a dangerous situation, this type is very appropriate to be used to move a child, because the child must quickly make the right decisions for his safety.¹⁹

This is shown from the results of the interview with her. She explained that her children always obeyed the rules and orders of her and her husband. Her children never violated the rules she applied, so she and her husband didn't need to punish them. In addition, they are always polite and gentle with their parents. Punishment is only given when they fight, whoever starts the fight will be punished.

c. Democratic parenting

Parents who apply democratic parenting in instilling a religious character in their children, namely Mrs. Muthmainnah (Mrs. Muth). He has three children named Naya, Qila, and Vano. Parents with this democratic type always prioritize common interests over individual children's interests. This type of democratic parenting expects children to share responsibilities, be able to develop their leadership potential, tolerate when children make mistakes and provide education to children so they don't make mistakes by not reducing the creativity of the child's initiative.²⁰

¹⁹Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua...*, 67.

²⁰Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua...*, 61.

The results of the interview conducted by the researcher with Mrs. Muth stated that she still gave rules to her children, at least rules regarding time discipline. Even so, she still gave freedom to his children to develop their potential as long as this did not violate religious norms. As for if they violated, Bu Muth did not immediately punish them. She only reminded and admonished them so that the mistakes that happened did not happen again.

d. Purposeful parenting

One of the parents who applies the pattern of purposeful parenting in instilling a religious character in their children is Mrs. Anik Widarti (Mrs. Anik). Mrs. Anik and Mr. Wagiyo have three children, namely Cindy, Yongky, and Amira. Mr. Wagiyo, who works as a fisherman, makes him rarely at home, so that the responsibility for educating children is entirely delegated to Mrs. Anik. In educating children, Mrs. Anik applies the pattern of purposeful parenting, namely if she wants to move her child to do something, then there is a reward for her services in material form. So, because they want to get a fee, the child is motivated to do something that is ordered by his parents. This type of parenting is called purposeful (in Indonesian = *pamrib*) (in Sundanese = *gentong ngumes*), because every work done has a material value.²¹

The results of the interview proved that Mrs. Anik's children were very difficult to control or command, such as orders to study, pray in congregation, go to the TPQ for reciting Qur'an, and get up early to pray at dawn. These orders will be carried out by her children when she has given a reward such as an additional allowance.

e. Paternalistic parenting

Parents with this paternalistic type act as fathers to their children in the form of educating, caring for, teaching, guiding, and advising. This type of parenting is called paternalistic because the parenting used is paternally.²² The

²¹Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua...*, 66.

²²Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua...*, 62.

character of the child formed from education in a family without a father is an independent child, not spoiled, and obedient.²³

Parents who apply this parenting style in instilling a religious character in their children are all mothers from Bendar Village, Juwana District, Pati Regency whose husbands work as large fishermen or modern fishermen. So because the father is busy at sea for a long time, so that he rarely meets his child, the one who is tasked with educating, caring for, teaching, guiding, and advising the child in their daily life is the mother. The mother uses the influence of fatherhood to move the child towards the desired goal, although sometimes the approach taken is sentimental (easily influenced by feelings).

Similar to the families of fishermen, the families of TKW also have different parenting styles for each family. The parenting styles are:

a. Role-transfer parenting

This type of role-transferring model delegates the authority and responsibility of parents to children. This parenting style is used by parents to provide opportunities for children to carry out certain tasks and roles. Parents only facilitate and help when the solution to the problem is not found by the children. Although they are not given detailed instructions on what to do, the responsibility and decision-making process is largely left to the children.²⁴

One of the parents who adopted the role-transferring parenting style in instilling a religious character in their children, namely Mr. Kusnadi. Mr. Kusnadi and Mrs. Istianah have two children named Ghifari and Ghazali, both of whom are schooled at the Islamic boarding school. Directly, the responsibility of parents in educating their children at home is completely transferred to the boarding caregiver.

b. Laissez Faire parenting

²³Novia Nusti Nurlatifah, dkk., “Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Pada Keluarga Tanpa Ayah”, *Jurnal Edukids*, Vol. 17 No. 1 (April 2020), 42.

²⁴Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua...*, 65.

The laissez faire parenting is not based on rules, freedom of choice is open to children with little parental interference so that the freedom given is controlled. If there is no control from parents, then the child's behavior is uncontrollable, unorganized, and apathetic, because the child feels he does not have the goals and objectives to be achieved. Communication from parents tends to act as a connector that links the contribution of thoughts from family members.²⁵ Parent who practices parenting laissez faire in instilling a religious character in his children is Mr. Muh. Zainudin. Mr. Muh. Zainudin and Mrs. Mustaqimah have one daughter Maihun Rizqina (Maihun) class X of SMA Rifaiyah Sundoluhur and one son named Wildan Dwika Mahendra (Wildan) class VI of MI Miftahul Muhtadin Sundoluhur.

The results of the interview indicated that his two children tended to disobey his orders. This is due to the lack of intensive control from parents to children. Besides Mrs. Mustaqimah who works as a TKW, he also admits that he has not been able to give examples to his children directly. The main reason is because he works as a farmer who has to be in the fields all day long, so he has very limited time to keep the children.

c. Transaction parenting

This type of transaction parenting always makes an agreement (transaction), between the parent and the child to make an agreement of every action that is taken. Parents want their children to comply in the form of carrying out the agreed agreement. There are certain sanctions imposed on children, if at any time the child violates the agreement.²⁶ One parent who applies transaction parenting in instilling a religious character in his child is Mr. Rustam Santiko. Mr. Rustam Santiko and Mrs. Hefi Kristiana only have one daughter, Naura Arsyafatur Rahma (Naura) class XI at SMA Rifaiyah Sundoluhur.

²⁵Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua...*, 62.

²⁶Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua...*, 64.

The results of the interview showed that Mr. Rustam's family entrusted Naura to her uncle and aunt. Mrs. Hefi works as a TKW and Mr. Rustam works as a distributor driver who often leaves the house for several days to deposit goods outside Java, so Naura has to be entrusted to his uncle and aunt. When Mr. Rustam and Mrs. Hefi went to carry out their work, they made an agreement with Naura to obey the rules given by her uncle and aunt. If the rule is punished, then Mr. Rustam will punish her himself or hand over the punishment to her uncle and aunt.

d. Affiliation parenting

The affiliation parenting is a type of parental leadership that promotes harmony, relationships, and builds cooperation with children through merging. This type tries to build a strong bond between parent and child, seeks to create feelings of love, builds trust and loyalty between parent and child. The intimacy between parents and children is very harmonious.²⁷ One of the parents who applies this parenting in instilling a religious character in his child is Mr. Solikin. Mr. Solikin and Mrs. Nuriah only have one daughter, Selly Alfionika (Selly) class IX at MTs Miftahul Muhtadin Sundoluhur.

From the results of the interview conducted by the researcher, it can be understood that the family structure created by Pak Solikin shows an era of relationship between parents and children. It can be said that Mr. Solikin and Selly have a high emotional bond. This can be proven by the existence of tolerance between the two as well as a sense of mutual understanding, so that Selly never objected when Mr. Solikin ordered something. As a result, it will be very easy for Mr. Solikin to form a religious character in Selly according to what he hopes.

2. Driving and Inhibiting Factors of Parenting Styles for the Families of Fishermen and TKW in Instilling Religious Character in Children

Parenting styles in instilling religious character in their children are factual and essential in life as a whole (entity). Therefore, the data selection was carried

²⁷ Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua...*, 63.

out for the sharpness of the analysis for the sake of theoretical and practical guidance.²⁸ Based on the results of interviews and observations that the researcher has done, the families of fishermen and TKW have the same driving and inhibiting factors in instilling religious character in children. The factors are:

a. The structure of the physical environment

The home environment which is decorated with Islamic identities such as calligraphy, prayer places, and the location of the house close to the mosque or musola can motivate family members to be more active in carrying out worship. This was exemplified in the families of Mrs. Rini, Mrs. Muth, Mrs. Tutik, Mr. Kusnadi, and Mr. Solikin where an Islamic atmosphere was created in their houses.

On the other hand, a house that does not create an Islamic atmosphere, does not have a place of worship, is located far from the mosque or musola and far from the TPQ will make family members feel discouraged to worship, besides that the children are also not motivated to go to the TPQ for reciting Qur'an. This condition is reflected in the families of Mrs. Anik, Mr. Zainudin, and Mr. Rustam.

b. The structure of the social environment

Good interaction within the family will foster a sense of mutual understanding. In this case, parental figures are needed in everyday life. Good interactions that exist in a family can create mutual respect, so that they can help parents in shaping the religious character of their children. As has been implemented in the family of Mrs. Rini, Mrs. Muth, Mrs. Tutik, Mr. Kusnadi, and Mr. Solikin who are always there when the child is in need. Even if they have limited time, they will try to spend that quality time hanging out with their families. Apart from that, the social environment also influences the inculcation of religious character. A religious environment can facilitate the formation of religious character in children. Meanwhile, an environment that is not religious, even an environment with a population that often deviates

²⁸Shochib, *Pola Asuh Orang Tua*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, 56.

from religious norms, will inhibit efforts to form a religious character in children.

On the other hand, the absence of interaction between family members because each other's busyness will make the meeting feel awkward and strange. As a result, the messages and rules from the parents will be difficult to convey. This is what will inhibit the formation of religious character in children. This condition is experienced by the families of Mrs. Anik, Mr. Zainudin, and Mr. Rustam. It is very difficult for them to determine the time to gather with the family, so that there are only a few meetings between family members.

c. The structure of the educational environment

The educational environment in an organized family will help to form religious characters. For example, teaching children how to pray and read and write Qur'an from an early age. This will make it easier for children to deepen their religious knowledge when they are adults. On the other hand, children who are not familiar with the religion knowledge since childhood will find it very difficult to start learning religion from start when they reach adulthood. In addition, school mates also influence the formation of religious character. A good friend will bring the child to a good personality, on the other hand, a bad friend will bring the child to a bad personality as well. This is because a child will easily imitate the behavior of their peers. Like what Shaykh Az-Zarnuji has said in his poem:

.... # فان القرين بالمقارن يبيقتدي²⁹

Which means that "*in an association, the follow-up behavior often occurs.*"

d. The structure of the psychological atmosphere in the family

The psychological atmosphere of the family that can create attachment, intimacy, and high emotional ties will foster a high sense of empathy and sympathy, so that the process of forming the moralization of attachment can occur well. This process is the process of establishing good emotional bonds

²⁹Az-Zarnuji, *Ta'lim Al-Muta'allim*, Surabaya:Nurul Huda, n.d, 15.

in family relationships. This makes a child realize that he has a moral obligation, namely a sense of empathy and sympathy to obey all the rules and orders of the parents. On the other hand, the failed attachment moralization process will result in the child having a rebellious, selfish, and angry personality.

e. The structure of the socio-cultural in the family

Daily habits with Islamic nuances, such as time discipline in carrying out worship will help to form religious character properly. This is because children are accustomed to carrying out religious activities in daily life, so that these habits will turn into a necessity. On the other hand, Islamic culture that has never been applied in everyday life will be difficult if done immediately. As a result, the child feels that he has been dictated when performing worship. He did not feel that it was a habit, especially a necessity, and even felt that it was an order to burden them.

f. Parent control

Direct parental control will be more helpful in cultivating character. Like what Mr. H. Darmanto and Mrs. Rini's family has done, they both closely monitor their children's activities, so that all their children's activities are well controlled. On the other hand, parental controls that are only carried out periodically and indirectly can inhibit the formation of religious character in children. Like what happened to Mr. Zainudin's family where both parents are busy with their work, so that the children's behavior cannot be controlled properly.

D. Conclusion

The results of this study indicate that: First, the parenting styles used by several mothers in fishermen families are authoritarian, militaristic, democratic, purposeful, and paternalistic. The parenting styles used by fathers in TKW families are role-transfer, *laissez-faire*, transaction, and affiliation. Second, there are several driving and inhibiting factors in the formation of religious character in children. These factors are the structure of the physical environment, social environment, educational

environment, psychological atmosphere in the family, socio-culture in the family, and parental control on their children. The success of these factors is influenced by parents' attention. Parents who care about their children tend to have success in all elements of environmental structures. On the other hand, parents who are indifferent to their families tend to fail in all structural elements.

References

- Al-Ghalayini, Musthafa. *Idzab an-Nasyi'in: Kitab Akhlak wa Adab waj Timaa'*, Cet. V. Bairut: at-Thab'ah al-Wathaniyah, 1936.
- Al-Misri, Abul Fadhal Jamaluddin Muhammad ibn Makram ibn Manzur al-Afriqi. *Lisan al-Arab, Jilid 4*. Beirut: Daru Sadir, 1405 H.
- Al-Nashr, M. Sofyan. "Pendidikan Keluarga Dalam Pemikiran Sahal Mahfudh." *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender dan Anak* 1, no. 2 (December 30, 2016): 99.
- Amaruddin, Hidar, dkk. "Peran Keluarga Dan Media Sosial Dalam Pembentukan Karakter Santun Siswa Di Sekolah Dasar." *Jurnal Pendidikan Karakter* 10 (2020): 33.
- Aziz, Nailul Ghufon. "Relevansi Konseptual Model Hadits Pendidikan Karakter Dalam Keluarga Perspektif Kitab *Adab Al-Mufrad* dan *Tarbiyah Al-Aulad Fi Al-Islam* Terhadap Konteks Kekinian." *Islamic Review : Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* (2019).
- Az-Zarnuji. *Ta'lim Al-Muta'allim*. Surabaya: Nurul Huda, n.d.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Djamarah, Bahri. *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Jalaluddin. *Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-prinsip Psikologi*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.
- Lickona, Thomas. *Educating for Character: How Our Schools Can Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books, 1991.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah. *al-Mu'jam al-Wariz*. Kairo: Dar al-Tsaqafah, 1411 H.
- Manser, Martin H. *Oxford Advanced Learne's Dictionary*. New York: Oxford University Press, 2006.

- Nurlatifah, Novia Nusti, dkk. "Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Pada Keluarga Tanpa Ayah." *Jurnal Edukids* 17 (2020): 42.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet IV*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Shochib. *Pola Asuh Orang Tua*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Ulwan, Nashih. *Tarbiyah al-Aulaad fi al-Islam, Juz I*. Kairo: Daar as-Salaam, 1996.
- Zuhri. "Aksiologi Nilai Pendekatan dan Strategi Penanaman Nilai dalam Pendidikan Islam (Keadilan, Tolong Menolong, Tanggung Jawab)." *Jurnal Islamic Review* 9 (2020): 142

The Effectiveness of Shadow Puppet Media (an Experimental Study at MAK Zidny Ilma Warzuqny Fahma)

Amalia Nabilah Al-Dama

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Email: 4malyaa@gmail.com

Daviq Rizal

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Email: daviqr@gmail.com

Abstract

This research aims to use shadow puppet media, which will be used to improve speaking skills in narrative text learning material. The subjects of this study were at MAK Zidny Ilma Warzuqny Fahma students. The sample in this study were students of tenth grade at MAK Zidny. This quantitative study focused on student's achievement in the use of shadow puppet media to increase the student's speaking skills in narrative text. The finding of this study shows that shadow puppet media significantly gives effects on student's learning. The conclusion is based on the significance value calculation of the T count > T table, so H₀ is rejected; therefore, H_a is accepted. It means that there was a significant difference between student learning outcomes taught by using a shadow puppet media through English speaking skill.

Keywords: Shadow Puppet; Speaking Skill; Narrative text.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memanfaatkan media shadow puppet, yang akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan berbicara Bahasa Inggris pada materi pelajaran narrative text. Subjek dari penelitian ini adalah siswa MAK Zidny Ilma Warzuqny Fahma (ZIWF). Sampel dalam penelitian ini adalah kelas 10 dari MAK Zidny. Studi kuantitatif ini berfokus pada prestasi siswa dalam penggunaan media shadow puppet untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa dalam narrative text. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media shadow puppet memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembelajaran siswa. Kesimpulan tersebut berdasarkan pada nilai signifikansi dari T hitung > T table, sehingga H₀ ditolak. Oleh karena itu, H_a diterima. Artinya, ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang diajarkan dengan menggunakan shadow puppet dengan siswa yang tidak menggunakan shadow puppet.

Keywords: Shadow Puppet; Kemampuan Berbicara; Teks Naratif.

A. Introduction

Speaking as one of the communication elements, learners need to acquire the communication skill of speaking to get the respective success fields. According to Harmer and Gilkani¹, states that human communication is a complex process. When a person wants to say something and transmit information, it means that they need communication. Speakers use a connection when they are going to inform someone about something. Speakers apply language according to their own goals.

Thus, to acquire excellent communication skills and speaking skills, the classroom is a unique platform to get proper exercise in communication. The educators should be able to understand the problem of the learners and try to implement teaching strategies in the classroom to develop the students speaking skills in the English class. This implementation strategy will be possible for the teachers to get student attention when the teacher has an excellent method to teach the material, and the proper techniques followed by good media selection.

Regarding some difficulties and problems in learning speaking skills, the researcher tried to observe the English teaching and learning problems among tenth grade at MAK Ziwfa Purwodadi. The question which comes from the teaching situation is that the teacher does not select appropriate media for teaching speaking skill. The teacher only uses an LKS (Lembar Kerja Siswa), then the students were not interested in learning the material taught by the teacher. Another problem comes from the learners that they have difficulties in speaking performance. The students feel worried, could not express ideas, not speak fluently, not use the right structure, and lack of producing appropriate vocabulary. They uncomfortable speaking English in the class, so they spoke by using mother tongue language. The students feeling caused by inappropriate learning methods or the media that use by the teacher does not increase the student's motivation to practice the English language.

¹ LM Leong, SM Ahmadi - Diario de investigación en educación en inglés, and undefined 2017, 'Un Análisis de Los Factores Que Influyen En La Capacidad de Hablar Inglés de Los Estudiantes', *Ijreeonline.Com*, 2017, 34–41

Following the problems faced by the students of MAK Ziwfa, it found that the use of an appropriate method in learning is essential. Besides, the teacher should not only focus on using the proper manner in teaching speaking skill, but also must be considered to select some exciting medium for learning. The right media will increase the student's interest and make the student quickly get the concept of the material.

In the al-Qur'an also has said that:

با البيانات و الزبر، وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون ﴿٤٤﴾

By bringing the details (miracles) and the books. And We bring down unto the Qur'an, that you shall explain to humankind what has handed down unto them and that they think (an-Nahl: 44)

The ayat above was talking about the media in education. The media used by a teacher must represent a portion of the material that previously taught. This explanation was seen in the lafadz (*to explain to humanity what has handed down to them*). Besides, the use of a medium should also be able to provide the right image for the students. Students had the desire to rethink the material they learned in class. They wanted to think about everything about the equipment and apply the application. It is seen from the word (*found at the end of the passage*). Namely, Allah uses the Qur'an as a medium in conveying something that has been received by human beings so that they think.

According to Toledo ², puppetry started to gain it is popular in the world of education as a helpful and useful educational tool. One of many new media that may allow students to interest in learning is puppet media. There are kinds of puppets that can use in this research, namely; shadow puppet, hand puppet, finger puppet, string puppet, and rod puppet.

Many findings indicate that using puppets can have an impact on young learner's speaking, gives student motivation positively, and indicate that using puppets does impact young learners' spoken interactions and motivation

² Flor Toledo and Steven Hoit, 'Developing Speaking Skills in First Grade: The Impact of Puppets on Young Learners' Spoken Interactions and Motivation', *Cambridge University Press. Teacher Research Program*. 2016.

positively. The puppetry creates an engaging and exciting atmosphere, which leads to fun learning. The finding eventually reduces the student's anxiety and develops their confidence to speak in English. When learners have the confidence to speak English, they tend to practice the language, and ultimately, it will enhance their speaking skills. It is an excellent chance for the teachers to create a pleasant atmosphere in learning speaking activities by a puppet.

Based on the statement above, the writer chooses a shadow puppet media for an experimental study at the tenth grade of MAK Ziwfa to improve their speaking skill. Shadow puppets are figures that put between light and wall. Changing position them creates the illusion of moving pictures on the wall. It is a simple media and one of the different media that may improve students speaking skills in learning.

This shadow puppet will teach for narrative material. In the narrative, students have to develop their ability to speak by exploring and expressing ideas, opinions, and experiences. It has moral values to be shared with other students. It is also taught the student about good things and shows the wrong thing, and things should be done. The narrative is one of the most powerful ways of communicating with others. When students can communicate with others, they will develop their ability in speaking class.

Based on the explanation above, this paper sheds light on the importance of speaking skills in English classrooms. First, this paper discloses the importance of using appropriate media for teaching speaking ability in English class. Furthermore, this paper suggests and explains the improvement of using shadow puppet media in lesson speaking skills among the learners in the English classroom.

B. Literature Review

1. Speaking and Teaching Speaking

According to Bygate ³, there are two aspects to reach the communicative goal in speaking. First is language knowledge, and after the instruction is a skill

³ Erik Vilímec, "Developing Speaking Skills" (2006): 1–89.

in using this knowledge. The two elements are not enough to possess a certain amount of language knowledge, but the ability is using the knowledge in different situations is needing for the speakers.

According to Tarigan⁴, the indicator of speaking skill is the ability to pronounce the articulation sounds or words to express thoughts, ideas, and feelings. It can be said that speaking is a system of signs that can be heard and visible which utilizes muscle tissue of the human body for the purpose and goal of the idea that combined. And it can be said that someone able to speak when they can pronounce the articulation sounds, or explain their ideas and feelings.

Furthermore, speaking is the term that uses for verbal communication between people. When two people are engaged in talking to each other, they are doing communication. Communication between people is an extremely complex and ever-changing phenomenon⁵. According to Bygate⁶ both speakers and listeners should be good communicators at processing spoken words. The communicators should be able to possess interaction skills to say something that makes the listeners understand with the speaker's means.

The vital key to improving student's ability in speaking skills is interaction⁷. As far as learning, the function of spoken language is interactional⁸. Through interaction, students can learn verbally and nonverbally as well as to create a discourse that conveys their intention in real-life communication.

Several keys to teaching speaking class should be applied to teaching a speaking class⁹. The first key is to make sure the teaching takes place in an intended way is motivation. Motivation is the combination of effort to achieve

⁴ Erik Vilímec, "Developing Speaking Skills".

⁵ Leong, inglés, and 2017, "Un Análisis de Los Factores Que Influyen En La Capacidad de Hablar Inglés de Los Estudiantes."

⁶ G. Raja Sekhar and Sujata Chakravorty, *TESL/TEFL: Teaching English as a Second or Foreign Language, ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, vol. 7, 2017.

⁷ Michael Sautter, "High-Impact Approaches to Teaching and Learning" (2019): 39–46.

⁸ Molly Zhou and David Brown, *Educational Learning Theories: 2nd Edition, Education Open Textbooks*, 2017.

⁹ Yulia Shinta K, Dwi Rukmini, and Sri Wuli Fitriati, 'Children ' s Production of Interlanguage in Speaking English As The Foreign Language', 8.4 (2018), 452–60.

the learning goal towards learning the language. That is the critical consideration in determining the preparedness of learners to communicate.

The second key is that teachers can create interest in the topic by talking about the topic and by communicating enthusiasm. The teacher can ask the student if they know about the topic. Ask them to tell their friends before the main activity begins. Also, teachers can ask students to make guesses about the content and to discuss what happens, which inspires student's curiosity, and they want to find out the truth. So, they have a reason to attend to the lesson and talk for themselves. Additionally, teachers can ask several guiding questions before the activity and provide the necessary information without telling what students have already known to create stronger motivation.

The third key is creating a relaxed atmosphere in learning. Motivation is raised in a lesson also by the fact that teachers help to create a relaxed atmosphere that helps even weak and reluctant students. This motivation can be done through some activities such as playing guessing games, doing rehearsal in small groups before speaking in front of many people, or practicing speaking under the guidance of the teachers through drills, repetition, mechanical exercises first.

The fourth key to improve student's ability in speaking skills is interaction. As far as learning, the function of spoken language is interactional. Through interaction, students can learn verbally and nonverbally as well as to create a discourse that conveys their intention in real-life communication.

Therefore, the teacher should provide learners opportunities for meaningful communication about relevant topics by using an interaction between one learner to the other learners. Teachers also give students communication devices that help to teach them how to listen, to talk, and negotiate meaning in a shared context.

Some other activities are telling stories, telling jokes, describing a person and place in detail, recounting the plot of a film, a play, a book, giving a short talk, or arguing a case, and all of the activity for the intermediate and upper

language activities. Furthermore, maybe to provide them with extensive exposure to authentic language through audiovisual and with the opportunities to use the language.

2. Media as a Tool for Learning

In the teaching and learning process, the teacher may need a component which will help, and it is a media. The medium involved in the teaching and learning process hopefully can make the students getting more comfortable and more interested in the learning process. Therefore, the teacher should formulate an excellent medium for their teaching class¹⁰.

According to Harmer¹¹, media is an aid of the teaching and learning process, which makes the students understand better to the material. Media is the basis of the material itself, and it can relate to the whole of the material topic and content¹². Media is an essential motivator in the teaching and learning process. Besides, Baidawi¹³ states that media in teaching English as a foreign language is a physical device that is being tools in the teaching and learning process. It has also had a significant influence in delivering material to the students.

According to Palmer¹⁴, using more media is useful. When teachers speak and collaborate, their utterance makes the listeners (students) more engaging. So, when speaking class uses media, it can help the visual one. Media help the teacher to motivate students by bringing a slice of real-life into the classroom and by presenting language in its more complete communicative context. The

¹⁰ Nur Rohmah Hayati, 'Peran Pesantren Menghadapi Konstelasi Era 4.0', *Islamic Review : Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 2019

¹¹ The British Council, 'The Use of the Media in English Language Teaching', *ELT Documents*, 1979, 117

¹² G. Amaral et al., No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title, *Journal of Petrology*, vol. 369, 2013.

¹³ Achmad Baidawi, "OKARA Journal of Languages and Literature , Vol . 1 , Tahun 1 , Mei 2016 OKARA Journal of Languages and Literature , Vol . 1 , Tahun 1 , Mei 2016," *OKARA Journal of Languages and Literature* 1, no. 1 (2016): 54–65.

¹⁴ Ester Aflalo and Eyal Gabay, 'Learning Approach and Learning: Exploring a New Technological Learning System', *International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning*, 7.1 (2013)

media can also provide a density of information¹⁵, and richness of cultural input not otherwise possible in the classroom¹⁶. The media can help students process information and free the teacher from the excessive explanation, provide contextualization, and a solid point of departure for classroom activities.

Media for learning is not only one type, but it has many types.¹⁷ The types are:

a. Visual Media

Visual media may be used in any subject matter, especially presenting texts through visuals such as data presented through graphs, tables, and illustrations like a pie chart and project these through PowerPoint presentations. Visual media is essential because it can develop learner's visuals¹⁸. Visuals are essential since it is known as one of the most used in senses. Most studies show that visual media is the most effective since it is available and can be easily perceived.

b. Audiovisual Media

Audiovisual media is media which a combination of audio and visual or can be called the media of hearing. For example, silent films, videos, television, television program, and sound slides.

c. Multimedia

Multimedia is the media that will be present a whole media part. For example, is animation video. Multimedia is usually identic with computers, internet, and computer-based learning.

d. Media Reality

¹⁵ Syahrizal Fauzi, "Sosiologi Ekonomi Islam," *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* VI, no. 1 (2017): 136–138.

¹⁶ Nguyen Thituyetanh, "The Key Principles for Development of Speaking," *International Journal on Studies in English Language and Literature (IJSELL)* 3, no. 1 (2015): 49–53.

¹⁷ The British Council, "The Use of the Media in English Language Teaching."

¹⁸ Zhou and Brown, *Educational Learning Theories: 2nd Edition*.

The real media that exist within the whole natural environment and applied to a state of living or preserved. For example, animals, specimens, herbarium.

Moreover, the teacher must be wise in using the media. Media that they used must fulfill this requirement: media should be affordable or inexpensive (easy to reach), should be appropriate with the topic or material which is discussing. It should be appropriate with the learner's condition and characteristics and should have the power to engage students' attention and interest.

In this research, the researcher uses visual media by using a shadow puppet for teaching a narrative text. This media may be appropriate with the learners at MAK Ziwfa for learning narrative text so that the students can improve their speaking skills.

3. Shadow Puppet as a Media for Learning

The puppet is one of the visual media. Based on the Cambridge Advanced Learner's Dictionary (¹⁹2012), puppet means a kind of toy which shaped like other creatures, humans, or animals, and it can move by strings, the fingers, or when we took the hand inside.

There are many types of puppets ²⁰ like the marionette, stick puppet, shadow puppet, and hand puppet. This research is to use shadow puppet media. Using the puppet as an alternative medium of teaching young learners could be considered as the best way. Furthermore, it is a valuable source to develop learner's abilities in speaking skills. By using the media, it is hoping that the learners can enjoy the teaching and learning process.

The use of puppets can enhance the student's participation in learning proses ²¹. The purposes of teaching English by using puppets are to develop student's imagination and creativity, to provide opportunities for students to

¹⁹ I Hamre, *Affective Education through the Art of Animation Theatre, The Power of the Puppet*, 2012.

²⁰ Baidawi, "OKARA Journal of Languages and Literature , Vol . 1 , Tahun 1 , Mei 2016 OKARA Journal of Languages and Literature , Vol . 1 , Tahun 1 , Mei 2016."

²¹ Setiawati, "Using Puppet As Media To Increase The Children Vocabulary," *Jurnal Pendidikan* 8.2 (2016): 257–269.

share oral interpretations, and to provide a supportive environment for experimenting with voice and language.

4. Narrative Text

In this research, the shadow puppet media will be taught for narrative material. Mayers ²², states that narrative is one of the most powerful ways of communicating with others. A well-written story lets the reader respond to some event in life as if it were own. They not only understand the event, but that can almost feel it happen for them. Moreover, Anderson states that narrative is a piece of text tells a story, and in doing so, entertains or informs the reader or listeners ²³. Anderson's definition concludes that the narrative story is a story that tells us something interesting that has the purpose of amusing and entertaining the readers.

C. Research Method

In this study, the researcher used experimental research at MAK ZIWFA in the tenth grade of the 2019-2020 academic year; it uses quantitative that focused on students' achievement in the narrative text by using shadow puppet for improving their speaking skill. The school located at MAK ZIWFA Purwodadi on the Dusun Jetis, RT/RW; 01/08, Desa Nambuhan, Purwodadi. The research conducted in the second semester in the academic year 2020 on June 29, 2020.

The population is the entire group of subjects. Usually, the researcher or polling firm is not able to interview all units of the population because of the sheer size. A sampling frame consists of all units from which the sample will be drawn. Ideally, the sample frame should be identical to the population or at least closely resemble it. In reality, population and sampling 11frames frequently differ ²⁴.

In this research, the population is all students of the tenth grade of MAK Ziwfa Purwodadi in the academic year of 2019/2020. The researcher will select

²² John Dunlosky et al., "Improving Students' Learning with Effective Learning Techniques: Promising Directions from Cognitive and Educational Psychology," *Psychological Science in the Public Interest, Supplement*, 2013.

²³ Rick Churchill et al., "Con t En t S," *Teaching: Making a Difference* LVII, no. 2015 (2015): 212–253.

²⁴ Mundir, *Statistik Pendidikan(Pengantar Analisis Data Untuk Penulisan)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

two groups of students from the community as a sample. The total number of the population was 42 students would be divided into two groups. A first group is an experimental group (will be taught by using shadow puppet), and the second group (will be prepared without shadow puppet). Both of those classes have the same teacher who taught them and on the available time to teach them.

This study focuses on learning the narrative text by using a shadow puppet. Moreover, it will find that a shadow puppet can improve student's speaking skills in narrative text. The independent variable of this research is the shadow puppet media. The dependent variable of this research is student's achievement in speaking skills in narrative text. In gaining this data, the researcher attempted to employ the following methods: test and documentation.

According to Brown ²⁵, a test is a method of measuring someone's knowledge, ability, or performance in a given domain. Based on the statement, the researcher will use a pre-test and post-test for the control group and the experimental group. The purpose is to get the data of their progress in speaking skills, especially in narrative text. The researcher will collect the data from the participants. The data that will be collected are student's English score, student's attendance list, student's schedule, and the list of the teachers in MAK Ziwfa Purwodadi.

The researcher uses two types of instruments; test and documentation. The test will be twice during the research. The pre-test will be given before all of the students are provides with the treatment. The second time, the researcher will give a post-test after all of the students are gets the therapy. The second instrument is documentation from the participants.

The technique of analyzing the data is by collecting all of the results of the pre-tests that have been conducted by students (control group and experimental group) will be tested for normality by researchers using Chi-Square in the SPSS application ²⁶. After that, the data from the pre-test will also be tested for

²⁵ Daniel Stockemer, *Quantitative Methods for the Social Sciences, Quantitative Methods for the Social Sciences*, 2019.

²⁶ Daniel Stockemer, *Quantitative Methods...*

homogeneity or similarity of research variables. The final process is testing the truth hypothesis, whether the statement of the hypothesis was accepted or not by using the T-Test.

D. Finding and Discussion

1. Finding & the Result on Speaking Ability

The result of this research related to this study is the results of the student's speaking skills test. The values of speaking skills are obtained from the pre-test and post-test. The result will be presented as follows:

a) Homogeneity Test

In order to check the data, the following formula was used:

Hypothesis:

H0: Samples come from Homogeneous populations

H1: Samples come from heterogeneous (not homogeneous) populations

Decision-making requirements:

Reject H0 if Sig. < 0.05

Accepted H0, if Sig. ≥ 0.05

To help this research, the researcher used SPSS :

1) Pre-test

SPSS Uji Homogenitas Pre Test

Based on the output, the significance value based on Mean is $0.448 > 0.05$, so it can be concluded that the variance of the Pre Test group in the experimental class and the control class is the same or homogeneous. Thus, one of the requirements of the independent sample t-test is fulfilled.

2) Post-test

SPSS Uji Homogenitas Post Test

Based on the output, the significance value based on Mean is $0.691 > 0.05$, so it can be concluded that the Post Test group variance of the experimental class and the control class is the same or homogeneous.

Thus, one of the requirements of the independent sample t-test is fulfilled. Next, test the normality.

b) Normality Test

Hypothesis:

Ho: Data is normally distributed

H1: Data is not normally distributed

Decision-making requirements:

Reject Ho, if Sig. < 0.05

Accepted Ho, if Sig. ≥ 0.05

1) Pre-Test

Hasil Uji Normalitas SPSS

The results of the Shapiro Wilk and Lilliefors test. P-value (Sig) lilliefors 0.063 and 0.200 in 2 groups where > 0.05 , then based on the lilliefors test, data for each group is normally distributed. The P-value from the Shapiro Wilk test in group 1 was $0.007 > 0.05$, and in group 2, it was $0.60 > 0.05$. Because all > 0.05 , the two groups were evenly distributed based on the Shapiro Wilk test.

2) Post-Test

Hasil Uji Normalitas SPSS

The results of the Shapiro Wilk and Lilliefors test. The value of p-value (Sig) lilliefors 0.063 and 0.200 in 2 groups where > 0.05 , then based on the lilliefors test, data for each group is normally distributed. The P-value of the Shapiro Wilk test in group 1 was $0.007 > 0.05$, and in group 2, it was $0.60 > 0.05$. Because all > 0.05 , both groups are equally distributed based on the Shapiro Wilk test.

c) Hypothesis Test

1) Pre-test

Hasil Uji One One-Sample T-Test Pre Test

The significant difference between the experimental class and the control class-tested, can be analyzed by the following criteria are used:

Hypothesis:

Ho: 'There is no significant difference between students' pre-test learning outcomes taught using puppet shadow puppet media to English learning outcomes.

Ha: there is a significant difference between students' pre-test learning outcomes taught using puppet shadow media to English learning outcomes.

The test criteria for the t-test

Accept H0 if $t_{count} < t_{table}$

Reject H0 if $t_{count} \geq t_{table}$.

2) Post-test

Hasil Uji One One Sample T-Test

The significant difference between the experimental class and the control class, the following criteria are used:

Hypothesis :

Ho: 'There is no significant difference between student learning outcomes taught by using shadow puppet media to English speaking skill in narrative text.

Ha: there is a significant difference between student learning outcomes taught by using shadow puppet media to English learning outcomes.

Conclusion One sample t-test with SPSS

Based on the output of the one-sample test table above, the sig value is known. (2-tailed) is 0,000 < 0.05 , according to the fundamental decision-making above, it can be concluded that Ho is rejected and Ha is accepted. Thus it can be interpreted that the value of learning narrative text using shadow puppets is not the same as the value of learning narrative text without using shadow puppets.

Decision making by comparing the value of t

The test criteria for the t-test:

Accept H_0 if $t_{\text{count}} < t_{\text{table}}$

Reject H_0 if $t_{\text{count}} \geq t_{\text{table}}$.

By comparing t_{count} with t_{table}

$T_{\text{hitung}} = 28,055$

$T_{\text{tabel}} = 1,725$

It means that $T_{\text{count}} > T_{\text{table}}$, so H_0 is rejected or H_a is accepted

The conclusion:

From these results, $t_{\text{count}} > T_{\text{table}}$, then H_0 is rejected, it means that there is a significant difference between student learning outcomes taught by using shadow puppet media through English speaking skills.

2. Discussion

This study aims to find the use of shadow puppet media in teaching can improve a student's speaking skills. After doing several treatments, it showed the previous problems as described in the research background, encountered by the students was solved, and especially their pronunciation became better. As described in the research background, three findings may solve the problem in this study. The first is finding the right steps in using shadow puppet media in learning narrative, and steps that contribute to improving student learning outcome in MAK Ziwfa. The second is the use of shadow puppet media can improve their ability to speak in the narrative text of tenth grade in MAK Ziwfa. Moreover, the last finding is that student's responses to learning activities have increased.

Previously, in the pre-test season, several students produced incorrect pronunciation, and not fluent in speaking. They afraid of making mistakes in sentences. When the students had enough practice treatment sessions, they can solve the problems calmly in the post-test. At the time, they asked to retell a narrative story; they are more fluent than before. Meanwhile, some other students also made decent improvements in more than one aspect, including vocabulary, grammar, and expressing ideas. Some of them can create their sentences, although some of them are still

contextual. Based on the explanation, it is flawless that the implementation of shadow puppet media is increasing student's speaking skills, where the result showed statistically significant was found.

When the students had enough practice treatment sessions, they can solve the problems calmly in the post-test. At the time, they asked to retell a narrative story; they are more fluent than before. Meanwhile, some other students also made decent improvements in more than one aspect, including vocabulary, grammar, and expressing ideas. Some of them can create their sentences, although some of them are still contextual. Based on the explanation, it is flawless that the implementation of shadow puppet media is increasing student's speaking skills, where the result showed statistically significant was found.

Besides, students can enhance their speaking aspects by practicing to reconstruct the shadow puppet in another text of the narrative. Furthermore, the researchers also found that the use of shadow puppet media made the students more active in practicing speaking. For instance, the students feel a bit nervous and less confident in performing their speaking in the class.

In the last session, the researcher gives the students a questionnaire about opinion in using shadow puppet media, and the answer represents that most of the students agreed to the use of a hand puppet show as a medium in teaching speaking. They were active and interested. It is very appropriate to use it in learning speaking because this media can enhance them to speak actively in the class. Most of the students agreed that by using this media, their motivation in speaking improved. Teaching speaking by using shadow puppet show media motivated the students to study English, especially to start speaking in the class.

Therefore, students feel interested to learn to speak. They are not ashamed anymore to speak in front of the classroom, and also their anxiety is reduced. Furthermore, after applying for shadow puppet show as

learning media in teaching speaking showed most of the students agreed to respond about learning speaking by using shadow puppet as media challenged them to speak in English, make them easier to convey their ideas in speaking, increases their vocabulary, grammar, and pronunciation mastery.

The test results and the evaluation has shown that the shadow puppet is more beneficial and be satisfied among the respondents, which include the student's skill in speaking. Based on the research that had done by Toledo and Hoit (2016). In their final report found the impact of puppets on young learner's spoken interactions and motivation. The findings indicated this media motivated the students positively and made them have good interaction because one of the advantages of using puppets in teaching speaking is to allow young learners to use the target language out of the textbook context.

Based on this finding, it is clear that the use of puppets for the students in learning English provides the chance for them to get involved in speaking skills.

E. Conclusion

The researcher concluded that the shadow puppet media demonstrated improvement in students speaking achievement. There was an improvement in the student's speaking scores in each test. The first test in the pre-test mean's score was 81.5714. After treatment using shadow puppets, the average post-test score increased to 84.6667. It was different from the control class that did not use shadow puppets as learning media; the average score on the pre-test was 78.6667 and only increased slightly to 79.2381. $T_{count} > T_{table}$, so H_0 is rejected, or H_a is accepted. From these result, $t_{count} > T_{table}$, then H_0 is rejected, it means that there is a significant difference between student learning outcomes taught by using shadow puppet media through English speaking skills.

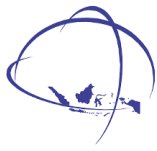
It can be concluded that the shadow puppet can improve students speaking skills in the narrative text at the tenth grade of MAK Ziwfa Purwodadi in the

2019/2020 academic year. The result of the research was proved that student's motivation in learning is by using appropriate media for teaching English class is very important. The shadow puppet also improved in pronunciation, and fluency of the students. The atmosphere of learning be more joyful than before, and it makes the teacher easy to understate the student the material and the student's skill, especially in speaking.

Reference

- Aflalo, Ester, and Eyal Gabay. "Learning Approach and Learning: Exploring a New Technological Learning System." *International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning* 7, no. 1 (2013).
- Amaral, G., J. Bushee, U. G. Cordani, KOJI KAWASHITA, J. H. Reynolds, Fernando FLÁVIO MARQUES De E ALMEIDA, F. F.M. de Almeida, et al. *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析* Title. *Journal of Petrology*. Vol. 369, 2013.
- Baidawi, Achmad. "OKARA Journal of Languages and Literature , Vol . 1 , Tahun 1 , Mei 2016 OKARA Journal of Languages and Literature , Vol . 1 , Tahun 1 , Mei 2016." *OKARA Journal of Languages and Literature* 1, no. 1 (2016): 54–65.
- Churchill, Rick, P. Ferguson, S. Godinho, Giovanni Andrea Cornia, Renato Paniccià, and Massimo Livi Bacci. "Con t En t S." *Teaching: Making a Difference* LVII, no. 2015 (2015): 212–253.
- Dunlosky, John, Katherine A. Rawson, Elizabeth J. Marsh, Mitchell J. Nathan, and Daniel T. Willingham. "Improving Students' Learning with Effective Learning Techniques: Promising Directions from Cognitive and Educational Psychology." *Psychological Science in the Public Interest, Supplement*, 2013.
- Fauzi, Syahrizal. "Sosiologi Ekonomi Islam." *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* VI, no. 1 (2017): 136–138.
- Hamre, I. *Affective Education through the Art of Animation Theatre. The Power of the Puppet*, 2012.
- Hayati, Nur Rohmah. "PERAN PESANTREN MENGHADAPI KONSTELASI ERA 4.0." *Islamic Review : Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* (2019).
- K, Yulia Shinta, Dwi Rukmini, and Sri Wuli Fitriati. "Children ' s Production of Interlanguage in Speaking English As The Foreign Language" 8, no. 4 (2018): 452–460.
- Leong, LM, SM Ahmadi - *Diario de investigación en educación en inglés*, and

- undefined 2017. “Un Análisis de Los Factores Que Influyen En La Capacidad de Hablar Inglés de Los Estudiantes.” *Ijreeonline.Com* (2017): 34–41.
- Mundir. *Statistik Pendidikan(Pengantar Analisis Data Untuk Penulisan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Sautter, Michael. “High-Impact Approaches to Teaching and Learning” (2019): 39–46.
- Sekhar, G. Raja, and Sujata Chakravorty. *TESL/TEFL: Teaching English as a Second or Foreign Language. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. Vol. 7, 2017.
- Setiawati. “Using Puppet As Media To Increase the Children Vocabulary.” *Jurnal Pendidikan* 8.2 (2016): 257–269.
- Stockemer, Daniel. *Quantitative Methods for the Social Sciences. Quantitative Methods for the Social Sciences*, 2019.
- The British Council. “The Use of the Media in English Language Teaching.” *ELT Documents* (1979): 117.
- Thituyetanh, Nguyen. “The Key Principles for Development of Speaking.” *International Journal on Studies in English Language and Literature (IJSELL)* 3, no. 1 (2015): 49–53.
- Toledo, Flor, and Steven Hoit. “Developing Speaking Skills in First Grade: The Impact of Puppets on Young Learners’ Spoken Interactions and Motivation.” *Cambridge University Press. Teacher Research Program. Accessed fromhttp://puppetools.com/Reidmillerresearch.pdf on June 12* (2016): 2016.
- Vilímec, Erik. “Developing Speaking Skills” (2006): 1–89.
- Zhou, Molly, and David Brown. *Educational Learning Theories: 2nd Edition. Education Open Textbooks*, 2017.



Pendidikan Ibadah Anak Usia Dini Dalam Kitab *Fasalatan* Karya KHR. Asnawi

Nur Khosiin

Institut Pesantren Mathali'ul Falah

n.khosiin@yahoo.co.id

Abstract

The fasalatan book is a form of Kiai Asnawi's concern for Muslims, especially for early childhood, in the context of forming a Muslim personality who always obeys and worships Allah, especially in terms of prayer. This study aims to reveal the contents of the book Fasalatan in the perspective of worship education for early childhood. This research is a library research with data collection methods through interviews and documentation and an interpretive descriptive approach. The primary data source is the book of Fasalatan, the secondary is related works. According to Kiai Asnawi, religious education in the form of prayer is important for children. He reminded the Muslims and their children to always pray five times a day because without doing the five prayers the Muslims and their children would suffer losses.

Keyword: *Worship; Children Education; Fasalatan; KHR. Asnawi*

Abstrak

Kitab fasalatan merupakan bentuk kepedulian Kiai Asnawi kepada umat Islam khususnya bagi anak usia dini, dalam rangka pembentukan kepribadian muslim yang selalu taat dan beribadah pada Allah khususnya dalam hal salat. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan kandungan isi kitab Fasalatan perspektif pendidikan ibadah bagi anak usia dini. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan metode pengumpulan data melalui interview dan dokumentasi dan pendekatan deskriptif interpretatif. Sumber data primernya kitab Fasalatan, sekundernya adalah karya-karya yang terkait. Menurut Kiai Asnawi, pendidikan ibadah yang berupa salat itu penting bagi anak. Ia mengingatkan kepada kaum muslimin beserta anak-anaknya untuk selalu menjalankan salat lima waktu karena tanpa mengerjakan salat lima waktu kaum muslimin dan anak-anaknya akan merugi.

Kata kunci: *Ibadah; Pendidikan Anak; Fasalatan; KHR. Asnawi*

I. Pendahuluan

Tata peribadatan yang termaktub dalam Fikih Islam hendaklah diperkenalkan sedini mungkin dan sedikit dibiasakan dalam kehidupan anak usia dini. Hal ini dilakukan agar kelak mereka tumbuh dan berkembang menjadi insan yang taqwa atau insan yang taat dalam melaksanakan perintah agama, terutama

tentang perintah salat.¹ Salah satunya melalui pendidikan yang merupakan upaya memenuhi berbagai tuntutan terhadap kualitas generasi bangsa, yakni tuntutan budaya, tuntutan sosial dan tuntutan perkembangan manusia atau anak. Tuntutan budaya pada pendidikan pada dasarnya adalah agar generasi bangsa kita mampu mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa, sedangkan tuntutan sosial berkaitan dengan SDM, agar setiap insan bangsa berguna bagi kehidupan diri sendiri maupun bagi masyarakat luas.

Proses pendidikan yang dijalankan masyarakat dalam membentuk karakter yang islami salah satunya dilakukan oleh pesantren. Lulusan pesantren lebih berkarakter dan mempunyai akhlak mulia daripada lulusan lembaga pendidikan umum yang lebih mementingkan aspek kognitif saja.² Pesantren menjadi lembaga pendidikan yang mampu menghadapi perubahan zaman salah satunya karena nilai-nilainya dijaga dengan baik oleh pengasuh, yakni Kiai.

KHR. Asnawi adalah salah satu kiai di daerah Kudus kulon yang mempunyai beberapa peninggalan yang masih eksis sampai sekarang, diantaranya Madrasah *Qudsiyah* dan pondok pesantren *Raudah at-Talibin* Bendan. Selain pesantren dan madrasah beliau juga mempunyai beberapa karya sastra diantaranya kitab *Fasalatan* yang sampai saat ini masih digunakan sebagai acuan kurikulum madrasah diniyah awaliyah di kawasan pantura, khususnya di daerah Kudus.

Aspek pendidikan ibadah, khususnya pendidikan salat sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 17, yang artinya: “Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah”. Ayat tersebut menjelaskan pendidikan salat tidak terbatas tentang *kaiifiyah* dimana menjalankan salat lebih bersifat *fiqhiyah* melainkan termasuk menanamkan nilai-nilai di balik salat, agar ke depannya bisa tampil sebagai pelopor *amar ma'ruf nahi munkar*.³ Maka

¹ Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). Hlm. 112

² M. Sofyan Alnashr, “Pendidikan Karakter Ala Gus Dur: Representasi Pesantren Dalam Mendidik Bangsa,” *Shabib* 4, no. 1 (2019): 57–72.

³ Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

menarik sekali mengkaji pendidikan ibadah anak usia dini yang tertulis dalam kitab *fasalatan*, serta mengetahui relevansinya dengan tujuan pendidikan Islam.

KHR. Asnawi dilahirkan di Damaran, sebuah daerah di belakang menara Kudus pada tahun 1281 H/ 1864 M, dan meninggal pada tahun 1959. Dia memiliki julukan KHR. atau Kiai Haji Raden dimana yang terakhir ini menunjukkan garis keturunan keluarga Aristokrat. Dia adalah keturunan ke-14 Sunan Kudus dan keturunan ke-5 dari Kiai Haji Mutamakin, seorang ulama terkenal yang hidup pada zaman Sultan Agung Mataram pada paruh pertama abad XVII.⁴

Pada awalnya, ia mengenyam pendidikan dari keluarganya sendiri, yaitu dari ayahnya H. Abdullah Husnin, dan ibunya R. Sarbinah. Membaca Al-Qur'an merupakan pelajaran utama yang ia pelajari setiap hari dari ayahnya. Ketika berumur 15 tahun ia dikirim ke pondok pesantren di Tulung Agung. Tradisi dalam dunia pesantren telah menjadikannya sebagai seorang santri yang memiliki hasrat besar dalam mencari ilmu.⁵

II. KHR. Asnawi dan Kitab Fasalatan

Kitab *fasalatan* adalah kitab dari pemikiran KHR. Asnawi yang telah disusun kembali oleh KH. Minan Zuhri dan diterbitkan oleh percetakan *menara Kudus* pada tahun 1954 M/ 1375 H.

Pada bagian awal di dalam *muqaddimah*nya beliau menyampaikan:

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ فَمَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ

Artinya: “Salat adalah tiang agama, barang siapa yang mendirikan salat, berarti ia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya berarti ia telah meruntuhkan agama”.

Kiai Asnawi juga mengutip Hadis yang membandingkan antara salat lima waktu dengan mandi lima kali dalam sungai yang bersih yang akan menghasilkan

⁴ Nur Khosiin, “Dakwah Akhlak Melalui Literasi (Kajian Terhadap Kitab Syiiran Nasehat Karya,” *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 4, no. 1 (2015): 77–102.

⁵ Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama Dan Tradisi* (Yogyakarta: LKiS, 2004). Hlm. 56

kebersihan diri baik secara fisik maupun spiritual.⁶ Nabi Muhammad bersabda yaitu:

لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات, هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الحديث

Artinya: “Sesungguhnya, jika sungai yang bersih di depan pintumu (lingkunganmu) digunakan untuk mandi lima kali sehari. Apakah akan tertinggal kotoran ditubuhmu? Para sahabat menjawab, tidak ada kotoran sedikitpun yang tertinggal. Nabi berkata: itu adalah perumpamaan salat lima waktu Allah akan membersihkan dari segala kotoran (dosa).

Untuk menjelaskan kedua Hadis tersebut, Kiai Asnawi mengingatkan kaum muslim khususnya daerah pantai utara supaya mereka beserta anak-anaknya selalu menjalankan salat lima waktu, lebih-lebih dengan salat berjama’ah. Tanpa mengerjakan salat kaum muslim akan merugi, sementara masjid-masjid, mushalla dan tempat-tempat yang paling mulia di muka bumi ini akan hampa. Padahal Allah telah memerintahkan umat muslim untuk memakmurkan tempat-tempat ini sebagai wujud kecintaan terhadap ajaran Islam.

Kiai Asnawi memandang bahwa salat tidak saja lebih religius, tetapi juga memiliki arti penting bagi kemaslahatan sosial dan ekonomi umat. Salat berjama’ah itu sendiri merupakan integrasi antara ke-shaleh-an dengan komunitas yang taat pada hukum. Seorang imam salat merupakan simbol yang jelas dari kepemimpinan yang dipercaya dan disepakati. Di belakangnya, para ma’mum tidak diperkenankan melakukan gerakan apapun selain mengikuti apa yang dilakukan oleh seorang imam.

Adapun topik bahasan pada kitab *fasalatan* ini, pertama adalah tentang bacaan azan, jawaban azan dan bacaan iqamah. Selanjutnya membahas tentang tata cara wudu, dan hal-hal yang membatalkan wudu. Kemudian dilanjutkan dengan tata cara salat, orang yang kewajiban salat, syarat syahnya salat, rukun-rukun salat, dzikir atau wiridan sesudah salat, dan perkara yang membatalkan salat. Lalu pembahasan tentang salat Jum’at, diantaranya niat mandi Jum’at, niat

⁶ Asnawi, *Fasalatan* (Kudus: Menara, 1954). Hlm. 4

salat jum'at dan faedah-faedah atau keutamaan pada malam hari jum'at. Kemudian di lanjutkan dengan salat-salat sunnah, mulai dari bacaan niat, tata cara salat, dan wiridan-wiridannya, diantaranya adalah salat qabliyah dan ba'diyah dalam salat fardhu, yang biasa disebut dengan salat rawatib, serta salat duha dan salat-salat yang lain.

III. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sumber data utama berupa karya tulis tokoh. Maka penelitian ini disebut juga penelitian pustaka atau studi pustaka karena mempelajari secara intensif dan mendalam tentang makna yang terkandung dalam kitab *Fasalatan*. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-interpretatif, yaitu usaha untuk menggambarkan penafsiran kitab *Fasalatan* karya KHR. Asnawi sebagai wahana dalam rangka pembentukan kepribadian seorang muslim khususnya anak usia dini yang selalu taat dan beribadah pada Allah khususnya dalam hal salat. Sumber data primernya adalah kitab *Fasalatan*. Sedangkan sumber data sekundernya adalah Buku-buku dan literatur tentang KHR. Asnawi Kudus, seperti Intelektual Pesantren, Perhelatan Agama dan Tradisi Karya Abdurrahman Mas'ud.

Adapun pengumpulan data menggunakan Metode dokumentasi, yaitu dengan mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku dan sebagainya.⁷ Pengumpulan data juga diperkuat dengan metode *interview* kepada orang-orang terdekat Kiai Asnawi Kudus, terutama keturunan dan santrinya. Analisis data menggunakan Hermeneutik Psikohistoris dan Analisis Deskriptif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah peneliti membaca, mencermati, dan memahami serta mendeskripsikan kitab *Fasalatan* karya Asnawi, lalu peneliti mencoba memberikan interpretasi terhadap pemikiran KHR. Asnawi dengan cara melihat keselarasannya dan menetapkan inti pemikiran yang secara mendasar. Serta melakukan tinjauan

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta (Jakarta: Rineka Cipta, 2012). Hlm. 65

sejarah awal munculnya kitab *Fasalatan* tersebut sebagai langkah KHR. Asnawi dalam membentuk karakter anak usia dini melalui ibadah salat.

IV. Pendidikan Ibadah dalam Kitab *Fasalatan*

Kitab *Fasalatan* adalah merupakan kitab panduan salat bagi anak/anak usia dini karenanya kitab ini diajarkan di beberapa madrasah diniyah awaliyah di kawasan pantura khususnya di daerah Kudus dan sekitarnya. Kitab ini memberikan panduan lengkap dan praktis yang berkaitan dengan bacaan-bacaan salat, do'a dan wirid yang perlu dibaca dalam berbagai kesempatan. Pada bagian awal, KHR. Asnawi menganjurkan untuk berjamaah, hal ini dapat dilihat dalam muqaddimahny dengan mengutip sebuah Hadis, "Salat berjamaah adalah dua puluh tujuh kali lebih baik dari pada salat sendirian".⁸

A. Azan, Iqamah, dan Wudu

KHR. Asnawi mengawali dengan menerangkan tentang azan, jawabnya azan, do'a sesudah azan, iqomah dan jawab iqomah. Azan adalah pemberitahuan atau pengumuman tentang masuknya waktu salat, sebagai undangan kepada kaum muslim agar mereka mengerjakan salat, baik dirumahnya masing-masing, atau lebih utama lagi mengerjakannya berjamaah di masjid atau di musholla. Karenanya azan termasuk salah satu syi'ar Islam yang oleh sebagian ulama dianggap sunnah, namun sebagian lagi menganggapnya sebagai fardu kifayah.⁹

Fasal selanjutnya, KHR. Asnawi menerangkan tentang wudu, niat wudu, do'a sesudah wudu dan perkara yang membatalkan wudu, menurut bahasa, wudu adalah perbuatan menggunakan air pada anggota tubuh, sedangkan wadhu' adalah air yang digunakan untuk berwudu. Kata ini berasal dari *wadha'ah* yang berarti baik dan bersih. Dalam istilah syara' wudu ialah perbuatan tertentu yang dimulai dengan niat.¹⁰

⁸ Asnawi, *Fasalatan*. Hlm. 3

⁹ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fikih Praktis: Menurut Al-Qur'an, AsSunnah, Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan Media Utama, 1999). Hlm. 117

¹⁰ Lahmudin Nasution, *Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2011). Hlm. 10

Menurut KHR. Asnawi bagi siapa saja yang hendak melaksanaka salat, maka ia wajib melakukan wudu, sebab menurutnya, wudu adalah menjadi bagian dari syarat syahnya salat. Adapun menurut KHR. Asnawi dalam *fasalatannya*, hal-hal yang dilakukan dalam wudu itu ada 7 yaitu:

1. Niat untuk berwudu ketika membasuh wajah atau muka.
2. Membasuh muka tiga kali, adapun batasannya adalah memanjang dari tempat tumbuh rambut sampai dengan ujung dagu dan melintang dari daun telinga kanan ke daun telinga kiri. Dalam membasuh muka, air harus mengalir pada bagian luar kulit maupun rambut yang terdapat pada wajah. Jadi bagian dalam mulut, hidung, beserta mata tidak wajib terkena basuhan air.¹¹
3. Membasuh kedua tangan sampai dengan kedua siku sebanyak tiga kali
4. Mengusap (menyapu) sebagian kepala dengan air sebanyak tiga kali.
5. Mengusap (menyapu) kedua telinga sebanyak tiga kali.
6. Membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki sebanyak tiga kali, seperti pada basuhan lainnya, disini juga wajib diperhatikan bahwa air itu harus mencapai seluruh sebagian dari kaki. Jika di kaki terdapat sesuatu yang menghalangi air, misalnya kotoran dibawah kuku atau lainnya, maka terlebih dahulu wajib membuangnya agar air benar-benar sampai ke seluruh kaki.
7. Harus tertib, maksudnya adalah melakukan rukun-rukun wudu itu sesuai dengan urutan yang tersebut pada ayat wudu diatas. Kecuali apabila menyelam di dalam air yang banyak, lalu berniat wudu, maka seketika itu juga, telah sempurna wudunya.

Selanjutnya KHR. Asnawi menambahkan bahwa sebelum mengerjakan niat, maka dianjurkan terlebih dahulu untuk membaca ta'awudh dan basmalah, dari ke tujuh rukun yang dikemukakan tersebut, nampaknya ada perbedaan yang sangat spesifik diantara golongan Syafi'iyah, yaitu tentang mengusap kedua telinga dan melakukan rukun-rukun tiga kali, karena sebagian

¹¹ Syekh Muhammad Nawawi, *Kasyifah Al-Saja* (Semarang: Toha Putra, n.d.). hlm. 18

menganggap mengusap kedua telinga dan melakukan rukun tiga kali adalah sunnah.

Kemudian KHR. Asnawi menyinggung tentang bacaan niat wudu dan do'a setelah wudu, adapun niat wudu adalah:

نويت الوضوء لرفع الحدث الاصغر فرض الله تعالى

Artinya: "Aku berniat wudu karena menghilangkan hadas kecil, fardhu karena Allah".

Sesudah itu disunahkan membaca do'a dengan menghadap qiblat, adapun do'anya adalah:

أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من
التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين سبحانك اللهم وبحمدك
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه

Kiai Asnawi menambahkan setelah membaca do'a diatas disunahkan untuk membaca surat al-Qadr tiga kali, karena hal ini menghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan, hal ini sesuai pendapat An-nazili dalam *Khozīnahnya*.¹²

Fasal selanjutnya, KHR. Asnawi menerangkan tentang perkara yang membatalkan wudu, yaitu ada 4 macam :

1. Keluarnya sesuatu dari kedua pintu pelepasan (qubul dan dubur) baik berupa zat seperti kencing, tinja, darah dan sebagainya, maupun berupa angin kentut, terkecuali air sperma (mani). Kalau air sperma tidak membatalkan wudu, tetapi mewajibkan untuk mandi.¹³
2. Hilang akal atau kesadaran yang disebabkan tidur, gila, ayun, mabuk dan lain sebagainya. Kecuali tidur dalam posisi duduk yang menutup sedemikian rupa, sehingga tidak memungkinkan keluarnya angin.
3. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan walaupun tidak sengaja. Bersentuhan itu membatalkan wudu karena dipandang sebagai *mazīnah* yang membangkitkan syahwat dan dibatasi pada:
 - a. Antara kulit dengan kulit

¹² Muhammad Haqqy An-Nazili, *Khozīnah Al Asror* (Semarang: Toha Putra, n.d.). hlm. 17

¹³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Semarang: Toha Putra, n.d.). hlm. 22

- b. Laki-laki dengan perempuan yang telah mencapai usia syahwat (dewasa).
- c. Di antara mereka tidak ada hubungan mahram.
- d. Sentuhan langsung tanpa alas atau penghalang.

Bersentuhan yang memenuhi ketentuan di atas menurut KHR. Asnawi membatalkan wudu dengan tidak membedakan apakah itu terjadi dengan sengaja atau tidak, atas kemauan sendiri atau terpaksa, benar-benar menimbulkan syahwat atau tidak, dan apakah orang yang bersentuhan itu masih menarik (syahwat) atau tidak.

- 4. Menyentuh kemaluan, bagian depan maupun belakang, dengan telapak tangan bagian dalam walaupun kemaluannya sendiri. Dalam hal ini (telapak tangan bagian dalam) menurut KHR. Asnawi cara menjelaskannya ialah dengan kedua telapak tangan, mana yang kelihatan ia namakan *dahir* (luar) dan mana yang tidak kelihatan ia namakan *batin* (telapak tangan bagian dalam).

B. Ibadah Salat

Fasal selanjutnya KHR. Asnawi menerangkan tentang salat. Salat menurut bahasa adalah do'a, sedangkan menurut istilah syara' adalah seperangkat perkataan dan perbuatan yang dilakukan dengan beberapa syarat tertentu, dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam.¹⁴ Di dalam kitab *fasalatan* ini, KHR. Asnawi menjelaskan tentang syarat wajib salat atau orang yang berkewajiban melaksanakan salat, yaitu:

- 1. Orang Islam; adapun orang kafir tidak diwajibkan untuk salat.
- 2. Orang yang sudah baligh (dewasa).
- 3. Orang berakal; adapun orang gila, ayun, mabuk tidak diwajibkan salat.
- 4. Suci dari haid dan nifas.

Sedangkan syarat syahnya salat di dalam kitab *fasalatan* itu ada enam perkara, yaitu:

¹⁴ Syekh Islam Zakaria Al-Anshori, *Tuhfat at Tullab Bi Syarh Tabrir Tanqih Al Lubab* (Semarang: Awaliyah, n.d.). hlm. 3

1. Suci dari hadas besar maupun hadas kecil
2. Suci badannya, pakaiannya dan tempatnya dari najis.
3. Menutup aurat, adapun batas-batas aurat bagi laki-laki adalah antara pusar dengan lutut, sedangkan bagi perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya.
4. Mengetahui masuknya waktu salat, salat hanya boleh dilaksanakan setelah mengetahui dengan pasti telah masuknya waktu salat masing-masing yaitu dengan mendengar azan atau berita dari orang yang dapat dipercaya, atau dengan tanda-tanda lainnya yang dapat menimbulkan keyakinan atau dengan perkiraan (perhitungan, hisab) yang tepat.
5. Menghadap kiblat atau Ka'bah salat hanya sah apabila dilaksanakan dengan cara menghadap Ka'bah (di kota Makkah) atau arahnya, yang dapat diketahui antara lain dengan *mihrab* di masjid-masjid atau pemberitahuan seorang ahli yang dapat dipercaya.
6. Harus mengetahui syarat rukunnya salat

Adapun rukun salat menurut KHR. Asnawi ada tiga belas, yaitu:

1. Niat
2. Berdiri pada salat fardu bagi yang berkuasa (mampu) berdiri. Bagi orang yang tidak mampu diperbolehkan dengan duduk, apabila tidak mampu duduk diperbolehkan sambil berbaring. Apabila masih tidak mampu, maka tiduran terlentang, dan jika masih tidak mampu maka dengan isyarat.
3. Membaca *takbirat al-ibram* (*Allahu Akbar*) sebagai pembuka salat.
4. Membaca surat al-Fatihah
5. Ruku' dengan Tuma'ninah

Sekurang-kurangnya ruku' adalah menunduk sedemikian rupa sehingga tetaplah tangannya dapat diletakkan ke lutut. Inilah yang wajib dilakukan ketika ruku', dengan menunduk sampai punggung rata dengan leher seperti selebar papan, kedua kakinya diluruskan, kedua lutut dipegang dengan telapak tangan, dan jari-jari tangannya diregangkan menghadap kiblat.

Adapun tuma'ninah maksudnya adalah bahwa anggota tubuhnya tenang dalam keadaan ruku', sehingga gerak turunnya ke ruku' itu benar-benar terpisah dari gerak naiknya untuk bangkit kembali.¹⁵

6. I'tidal dengan Tuma'ninah

I'tidal yang dimaksudkan adalah mengembalikan semua anggota tubuh kepada posisinya sebelum ruku' baik dalam salat dengan berdiri maupun dengan duduk. I'tidal termasuk rukun pendek dalam salat, oleh karena itu tidak boleh dipanjangkan, kecuali pada waktu qunut atau dalam salat tasbih, sebagian ulama berpendapat memanjangkan I'tidal yang tidak pada tempatnya dapat membatalkan salat.¹⁶

7. Sujud Dua Kali dengan Tuma'ninah

Adapun cara sujud ialah pertama meletakkan kedua lutut di atas tanah, kemudian kedua tangan, lalu dahi, dan hidung sambil merenggangkan kedua ujung kaki dengan bertuma'ninah.

8. Duduk di antara Dua Sujud dengan Tuma'ninah

Setelah sujud yang pertama, segera mengangkat kepala sambil bertakbir, lalu duduk *iftirasy*, yaitu duduk diatas mata kaki (atau telapak kaki) kiri, telapak kaki kanan ditegakkan, dan ujung jari kanan ditekuk menghadap kiblat (apabila hal itu tidak menyusahkan). Cara lain duduk *iftirasy* adalah duduk di atas kedua kaki, akan tetapi tidak dibenarkan duduk berjongkok dengan meletakkan pantat di atas kedua tumit yang ditegakkan, atau duduk sambil mengangkat kedua lutut ke atas. Duduk diantara dua sujud ini harus disertai dengan tuma'ninah. Setelah itu sujud lagi untuk kedua kakinya, sama seperti sujud yang pertama, dengan demikian selesaikan rakaat yang pertama.

9. Duduk Tahiyat Akhir

Adapun cara duduk tahiyat akhir disunnahkan dengan cara *tawarruk*, yaitu pantat diletakkan di atas tanah, kaki kiri dikeluarkan ke sebelah kanan, kaki

¹⁵ Syekh Islam Zakaria al Anshori, *Tuhfah*... hlm. 22

¹⁶ Taqiyyuddin Abi Bakr Al-Husaini, *Kifayah Al Ahyar Fi Halli Goyah Al Ikhtisor* (Jakarta: Dar Ihya' al Arabiah, n.d.). hlm. 9

kanan ditegakkan, dengan jemarinya ditebuk menghadap kiblat (apabila tidak menyusahkan). Dan telapak tangan kiri dengan kelima jari yang terbuka diletakkan di atas paha kiri, telapak tangan kanan di atas paha kanan, dengan jari yang di genggam kecuali jari telunjuk yang terbuka dan ditopang oleh ibu jari. Posisi jari telunjuk kanan tetap seperti itu, kecuali apabila sampai kepada bacaan *illallah* dari kalimat syahadat: *asyhadu Alla ilaha illallah*, diangkat sedikit (untuk menekankan ucapan kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah).

10. Membaca Tahiyat Akhir

Bacaan tasyahud (tahiyat) akhir, seperti yang terdapat dalam kitab *fasalatan* adalah:

التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته,
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً رسول الله اللهم
صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد.

11. Membaca Salawat setelah Membaca Tahiyat Akhir

12. Membaca Salam yang Pertama

Mengucapkan salam tersebut sambil memalingkan wajah ke sebelah kanan dan berniat keluar dari salat. Setelah itu disunnahkan membaca salam sekali lagi, sambil memalingkan wajah ke sebelah kiri.

13. Tertib

Pada fasal selanjutnya, KHR. Asnawi menerangkan tentang qunut, menurutnya do'a qunut hanya ada pada rakaat yang kedua salat subuh setelah membaca bacaan I'tidal atau pada salat witir yang akhir sesudah tanggal 15 Ramadhan.¹⁷ Qunut yang dimaksudkan dalam hal ini adalah do'a dan menurut Asnawi, lafadnya adalah:

اللهم اهدني فيمن هديت, وعافني فيمن عافيت, وتولني فيمن توليت, وبارك لي فيما اعطيت,
وقني شرم اقضيت, فانك تقض ولا يقض عليك, فإنه لا يذل من واليت, ولا يعز من عاديت,
تباركت ربنا وتعاليت, فلك الحمد على ما قضيت, استغفرك واتوب اليك, وصلى الله على
سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم

¹⁷ Asnawi, *Fasalatan*. Hlm. 48

Fasal selanjutnya, KHR. Asnawi menerangkan tentang perkara yang membatalkan salat, adapun perkara yang membatalkan salat menurutnya ada empat belas, yaitu:

1. Hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil
2. Terkena/ kejatuhan najis, baik badan, maupun pakaian, seperti kejatuhan kotoran cecak dan lain sebagainya, kecuali segera ditanggalkannya kotoran tersebut, dengan adanya najis pada badan atau pakaian berarti salah satu syarat shalat (taharah) tidak terpenuhi lagi dan dengan demikian salatnya menjadi batal.
3. Terbukanya aurat, kecuali ditutupinya kembali, salah satu syarat salat adalah menutup aurat. Jadi, apabila aurat terbuka, maka salat tersebut menjadi batal sebab syaratnya tidak lengkap lagi.
4. Berbicara dengan sengaja.
5. Makan atau minum, makan atau minum, walaupun sedikit membatalkan salat, sebab hal itu bertolak belakang dengan tujuan serta keadaan ibadah yang menuntut kekhusyuan.
6. Melakukan perbuatan (gerakan) tiga kali yang berturut-turut
7. Melompat atau memukul yang keras, hal ini sama dengan melakukan perbuatan yang perbuatan tersebut merusak tatanan salat serta menghilangkan kekhusyuan.
8. Mendahului imam sampai dua kali rukun, seperti imam masih ruku' ma'mum sudah I'tidal. Kalau imam I'tidal, ma'mum sudah sujud, kalau imam masih sujud, ma'mum sudah bangun dari sujud dan sebagainya.
9. Sengaja menambah rukun dalam salat, seperti ruku' dua kali dan sebagainya.
10. Tidak menghadap kiblat.
11. Tertawa terbahak-bahak dan dehem-dehem.
12. Menggantungkan putusnya salat seperti apabila sandalku di curi orang maka salatku akan saya batalkan untuk menangkap pencurinya.
13. Sengaja niat keluar dari salat

14. Murtad, atau keluar dari agama Islam

C. Tentang Salat Jumat

Kemudian setelah KHR. Asnawi menerangkan tentang salat jum'at. Menurutnya, orang yang akan melakukan salat jum'at, itu disunahkan memakai pakaian yang bagus, bersih, memakai wangi-wangian serta mandi. Ini semua dimaksudkan Asnawi, agar tidak mengganggu teman semajlis, bahkan memberi sesuatu bermanfaat, yaitu bau yang harum dan pemandangan yang indah.¹⁸ Salat jum'at diwajibkan atas setiap laki-laki muslim yang sudah baligh, berakal (tidak gila), mu'min, mampu pergi ke tempat yang diselenggarakan salat jum'at, dan tidak mempunyai alasan (udzur) tertentu yang membolehkannya meninggalkan salat tersebut.¹⁹

Adapun tata cara yang hendak dilaksanakan untuk salat jum'at menurut KHR. Asnawi adalah mandi jum'at, kemudian berangkat ke masjid, ketika mau masuk masjid dianjurkan untuk niat I'tikaf, begitu juga pada hari-hari biasa. Sesudah masuk masjid, jangan tergesa-gesa untuk duduk, tetapi hendaknya melakukan salat tahiyyah al-Masjid. Kemudian setelah azan yang pertama disunnahkan untuk salat qabliyah jum'at.

Menurut KHR. Asnawi imam salat jum'at dianjurkan untuk membaca surat-surat sesudah al-Fatihah di rakaat pertama yaitu surat al-A'la atau surat al-Jumu'ah sedangkan pada rakaat kedua adalah surat al-Ghasyiah atau al-Munafiqun. Setelah itu, ia menganjurkan pada jamaah jum'at, sesudah selesai salat jum'at untuk membaca surat al-Fatihah tujuh kali, al-Ikhlash tujuh kali, al-Falaq tujuh kali, dan an-Nas tujuh kali, dengan posisi kakinya belum berubah dari duduk tahiyyat akhir. Menurutnya, siapa yang melaksanakan hal tersebut maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya.

Adapun kewajiban melaksanakan salat jum'at itu berlaku atas orang yang memenuhi tujuh persyaratan, yaitu: (1) Islam; (2) Merdeka; (3) Baligh; (4)

¹⁸ Asnawi, *Fasalatan*. hlm. 53

¹⁹ Al-Husaini, *Kifayah Al Ahyar Fi Halli Goyah Al Ikhtisor*. Hlm. 146

Berakal; (5) Laki-laki; (6) Sehat; (7) Muqim, orang yang sedang musafir (dalam perjalanan mubah walaupun pendek) tidak dikenakan kewajiban salat jum'at.

D. Salat Sunah Rawatib dan Tarawih

Salat Rawatib yang dimaksud di sini adalah salat sunnah yang dilakukan beriringan dengan salat fardu baik sebelum atau sesudahnya. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Dua rakaat sebelum zuhur, dan dua rakaat sesudahnya.
2. Dua rakaat sesudah magrib.
3. Dua rakaat sesudah isya'.
4. Dua rakaat sebelum subuh
5. Empat rakaat sebelum asar.

Menurut KHR. Asnawi salat rawatib sebelum salat fardu dapat dilakukan setelah masuk waktu salat fardu tersebut, sedangkan rawatib sesudahnya dapat dikerjakan sesudah mengerjakan salat fardu yang bersangkutan sampai ke akhir waktu salat tersebut. Selanjutnya KHR. Asnawi menerangkan tentang salat tarawih dan salat witr. Menurutnya salat tarawih itu hanya dilakukan pada bulan ramadan, dan salat tersebut termasuk sunnah muakkad. Menurut bahasa, kata tarawih merupakan bentuk jamak dari *tarawihah* yang diambil dari Bahasa Arab: *ar-rahah*, yang artinya istirahat atau merasa senang sebagaimana yang ditulis oleh *Imam al-Asqalani* dalam kitab *Fath-Albaari (Syarah al-Bukhari)*, ia menjelaskan sebagai berikut:²⁰

التَّرَاوِيحُ جَمْعُ تَرْوِيحَةٍ وَهِيَ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الرَّاحَةِ كَالْتَسْلِيمَةِ بِمَنْ السَّلَامِ الْوَاحِدَةِ وَسُمِّيَتْ
الصَّلَاةُ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْيَالِي رَمَضَانَ التَّرَاوِيحَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَوَّلَ مَا اجْتَمَعُوا عَلَيْهَا
يَسْتَرْحُونَ كُلَّ تَسْلِيمٍ

Artinya: “Lafadh tarawih merupakan bentuk jamak dari lafad tarwihah, yang berarti sekali beristirahat (sekali merasa senang), seperti lafadh tasliimah yang berarti sekali salam. Salat berjamaah pada malam bulan ramadan dinamakan dengan salat tarawih karena mereka (*umar Ibn Khattab* dan para sahabatannya) pertama kali berjamaah dan mereka beristirahat setiap dua kali salam”.

²⁰ Ibn Hajar Al-Asqolani, *Fath Al Bari Syarah Shobih Muslim*, Juz 4. (Beirut: Dar al Maarif, n.d.). hlm. 72

Dalam jumlah rakaat salat tarawih, para ulama berbeda pendapat dikarenakan adanya perbedaan beberapa riwayat yang ada, yaitu:

1. Jumlah rakaat salat tarawih 8 (delapan) dan 3 (tiga witir) sesuai Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah:

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن انه سأل عائشة رضي الله عنهما كيف كانت صلاة رسول الله (ص) في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسئل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقلت يا رسول الله اتنام قبل ان توتر قال يا عائشة ان غيبي تنامان ولا ينام قلبي

Artinya: “Dari Abi Salamah bin Abdurrahman, ia bertanya kepada Aisyah ra. “Bagaimanakah rasulallah SAW salat pada bulan ramadhan? Lalu Aisyah menjawab: Rasulallah SAW tidak pernah menambah salatnya pada malam bulan ramadhan dan pada malam-malam yang lainnya dari sebelas rakaat. Beliau salat empat rakaat, maka jangan engkau tanyakan tentang kebaikan dan panjangnya. Kemudian beliau salat empat rakaat lagi, maka jangan engkau tanyakan tentang kebaikan dan panjangnya, kemudian beliau salat tiga rakaat. Lalu Aisyah bertanya: “wahai Rasulallah, apakah Engkau tidak tidur sebelum salat witir? Rasulallah menjawab: wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, namun hatiku tidak tidur” (HR. Bukhari Muslim).²¹

Secara eksplisit Hadis di atas menyatakan bahwa Nabi SAW tidak pernah melebihi jumlah rakaat salat malamnya dari sebelas rakaat, baik itu dilakukan di dalam bulan ramadhan maupun di luar bulan ramadhan. Pertama-tama beliau salat empat rakaat, kemudian empat rakaat lagi, lalu ditutup dengan tiga rakaat. Atas dasar Hadis riwayat Aisyah inilah kemudian para ulama menetapkan bahwa salat malam (*qiyamul lail*) pada dalam ramadhan atau salat tarawih itu jumlah rakaatnya ada delapan rakaat ditambah dengan witir tiga rakaat.

2. Jumlah rakaat salat tarawih 20 (dua puluh)

Pendapat ini telah menjadi *ijma'* para ulama (ahli *ijtihad*), baik dikalangan ulama salaf maupun khalaf, demikian juga tidak ada seorang pun ahli *fiqh* dari empat imam mujtahid yang berselisih pendapat mengenai

²¹ Ibn Hajar Al Asqolani, *Fath Al Bari*... hlm. 76

jumlah tersebut. Hal ini didasarkan atas Hadis riwayat Imam Malik dari Zaid bin Ruman:

عن زيد بن رومان انه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة

Artinya: “Dari Zaid bin Ruman bahwasanya ia berkata: adalah orang-orang itu melakukan ibadah malam (salat tarawih) dan masa Umar ibn Khattab dengan dua puluh tiga rakaat”. (HR. Imam Malik).

Dari Hadis dapat dipahami bahwa pada masa Umar bin Khattab salat tarawih dilaksanakan dengan dua puluh rakaat dan ditambah salat witir tiga rakaat, sehingga jumlah seluruhnya menjadi 23 rakaat.

3. Jumlah rakaat salat tarawih tiga puluh enam.

Jumlah ini didasarkan pada hujah dari amalan yang dilakukan oleh penduduk ahli madinah. Menurut mazhab Malikiyah bahwa jumlah rakaat salat tarawih tidak ada batasnya. Artinya, salat tarawih boleh dinamakan dalam jumlah 8, 20 atau 36 rakaat, bahkan sampai 40 rakaat sekalipun. Hal ini didasarkan dengan riwayat yang datang dari Nafi’ sebagai berikut:

روي عن نافع انه قال: ادركت الناس يقومون رمضان بتسع وثلاثين ركعة بوترون منها ثلاث

Artinya: “Diriwayatkan dari Nafi’ bahwasanya beliau berkata: saya dapati orang-orang beribadah malam di bulan ramadhan (salat tarawih) dengan tiga puluh sembilan rakaat, dari jumlah itu mereka salat witir dengan tiga rakaat.

Dari riwayat di atas dapat dipahami bahwa salat tarawih pada malam bulan ramadhan dikerjakan dengan 36 rakaat tanpa witir, dan kalau di tambah dengan witir tiga rakaat, maka jumlahnya menjadi 41 rakaat. Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa jumlah tersebut didasarkan pada amalan penduduk madinah pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz. Penambahan jumlah rakaat dalam salat tarawih tersebut dilakukan semata-mata karena mereka ingin menyamai penduduk Makkah dalam hal keutamaannya, sebab orang-orang Makkah biasa melakukan thawaf, mengelilingi Ka’bah tujuh kali putaran setiap habis dua kali salam salat tarawih. Konsekuensinya

jumlah rakaat dalam salat tarawih pun juga bertambah, yakni: tiga puluh enam rakaat.²²

Dari ketiga golongan (jumlah rakaat) diatas, KHR. Asnawi memilih jumlah rakaat salat tarawih yang 23 rakaat. Hal ini dilihat pada kitab *fasalatan* halaman 63 ia menambahkan sesudah 2 salam (4 rakaat) supaya membaca do'a:

اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

Adapun tentang salat witir di sini, adalah salat sunnah yang dilakukan dengan bilangan rakaat ganjil, satu, tiga, lima dan sebagainya. Dalam hal ini (salat witir), KHR. Asnawi menganjurkan untuk membaca do'a sesudah salat witir, adapun do'anya adalah:

سبحان الملك القدوس 3× سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح

Fasal selanjutnya, KHR. Asnawi menerangkan tentang salat dhuha, menurutnya, waktu salat dhuha pada pagi hari kira-kira jam tujuh sampai tergelincirnya matahari (masuk waktu zuhur), dan salat dhuha, dapat dilakukan sekurang-kurangnya dua rakaat. Akhirnya sampai disini KHR. Asnawi menyusun sebuah kitab yang diberi nama *fasalatan*. Hal ini merupakan bentuk kepeduliannya kepada umat Islam khususnya bagi anak usia dini, dalam rangka pembentukan kepribadian seorang muslim yang selalu taat dan beribadah pada Allah. Sastra pesantren dalam hal ini Kitab *fasalatan* menerangkan tentang pendidikan ibadah yang sangat berarti bagi masyarakat kudus pada zaman itu dan zaman sekarang.

V. Pendidikan Ibadah bagi Anak Usia Dini dalam Kitab *Fasalatan*

Menurut KH.R Asnawi pendidikan yang berupa salat itu penting sekali. Ia mengingatkan kepada kaum muslim beserta anak-anaknya untuk selalu menunaikan salat lima waktu, Karna tanpa mengerjakan salat kaum muslim akan merugi di akhirat kelak.²³ Hal inilah yang menjadikan KH.R Asnawi memberi

²² Muhammad Nur Ichwan, *Risalah Salat Tarawih, Membongkar Khilafiah Menebar Ukhunwah* (Yogyakarta: Menara Kudus, 2009). Hlm. 100

²³ Nur Khosiin, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Karya KHR. Asnawi," *Islamic Review : Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* (2018). Hlm. 88

nama dalam kitabnya dengan nama *Fasalatan* dari kata salat, karna di dalamnya hanya membahas tentang yang bersangkutan masalah salat.

Mengingat pentingnya pendidikan ibadah bagi kaum muslimin, maka proses pengajaran dan pendidikannya harus dilakukan sejak dini. Mendidik dan membiasakan anak beribadah sejak dini akan membentuk karakter yang islami. Masa anak adalah masa keemasan pembentukan karakter sehingga pendidikan ibadah yang diajarkan sejak dini akan mampu membentuk pribadi muslim yang kuat.

Karakter anak yang taat beribadah merupakan bagian dari tujuan pendidikan Islam yaitu mengembangkan manusia yang baik, manusia yang beribadah dan tunduk kepada Allah serta mensucikan diri dari dosa. Yang dimaksud dengan ibadah adalah dengan segala pengertiannya yang luas, meliputi kehidupan dengan segala kepentingan. Dalam kerangka ini, ibadah-ibadah fardu seperti salat mengandung maksud mendidik ruh dan mengarahkan pendidikan kepada orientasi akhlaki, khususnya bagi anak usia dini. Dan ibadah-ibadah tersebut merupakan daya pendorong bagi individu untuk menghadapi kehidupan nyata dengan segala problem dan rintangannya, disamping merupakan daya penggerak untuk merealisasikan kebaikan bagi dirinya dan masyarakatnya.

Tujuan pendidikan Islam dapat diukur antara lain dengan nilai isi pendidikannya, yaitu merealisasikan tercapainya keutamaan dan kesempurnaan diri dengan jalan *ma'rifat* kepada Allah dan berorientasi kepada kehidupan yang baik dan utama. Isi pendidikan tersebut mencakup kepentingan manusia di dunia dan di akhirat, seperti pendidikan tentang tata cara melaksanakan salat bagi anak usia dini.

Ajaran pesantren meskipun berasal dari ulama zaman dahulu namun banyak yang masih relevan hingga saat ini. Ajaran moral Kiai Bisri Mustofa dalam kitab *Mitero Sejati* misalnya, masih relevan bagi masyarakat muslim saat ini.²⁴ Begitu pula ajaran Kiai Asnawi dalam *Fasalatan* relevan dengan dengan tujuan pendidikan

²⁴ M Sofyan Alnashr and Amin Suroso, "The Thoughts of KH. Bisri Mustofa's Moral Education and Its Relevance with Development of Character Building," *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial* 1, no. 1 (2020).

Islam membentuk insan kamil melalui ibadah. Kitab *fasalatan* berisi tentang tata cara salat, mulai dari yang mudah sampai yang kompleks sesuai perkembangan psikis anak. Materi tersebut antara lain sunnah-sunnah sebelum salat, syarat sahnya salat, perkara yang membatalkan salat dan rukun-rukun salat.

Pendidikan ibadah bagi anak pada akhirnya akan membentuk pribadi dan karakter sesuai dengan ajaran Islam. Pribadi dan karakter yang telah terbentuk dalam diri anak akan memudahkan mereka mencapai tujuan hidup manusia. Tujuan hidup seorang muslim adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*sa'adatuddarain*) dengan menjalankan ibadah dan menjadi khalifah yang mampu memakmurkan bumi.

VI. Penutup

Kitab *Fasalatan* karya KHR. Asnawi Kudus adalah sebuah karya pesantren yang bertuliskan *arab pegon* dan memuat nilai-nilai pendidikan ibadah. Ibadah yang terdapat dalam karya ini khususnya ibadah salat untuk pemula atau anak dan masyarakat umum. Kandungan kitabnya antara lain tata cara melaksanakan ibadah salat, mulai dari sunnah-sunnah sebelum salat, syarat sahnya salat, perkara yang membatalkan salat sampai rukun-rukun salat, serta penjelasan tentang salat-salat sunnah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Menurut KH.R Asnawi pendidikan ibadah yang berupa salat itu penting diajarkan sejak dini. Tanpa mengerjakan salat kaum muslim akan merugi baik di dunia maupun di akhirat.

Daftar Pustaka

- Al-Anshori, Syekh Islam Zakaria. *Tuhfah at Tullab Bi Syarh Tabrir Tanqih Al Lubab*. Semarang: Awaliyah, n.d.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Semarang: Toha Putra, n.d.
- Al-Asqolani, Ibn Hajar. *Fath Al Bari Syarah Shobih Muslim*. Juz 4. Beirut: Dar al Maarif, n.d.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis: Menurut Al-Qur'an, AsSunnah, Dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan Media Utama, 1999.
- Al-Husaini, Taqiyyuddin Abi Bakr. *Kifayah Al Ahbar Fi Halli Goyah Al Ikhtisor*. Jakarta: Dar Ihya' al Arabiah, n.d.

- Alnashr, M. Sofyan. "Pendidikan Karakter Ala Gus Dur: Representasi Pesantren Dalam Mendidik Bangsa." *Shabih* 4, no. 1 (2019): 57–72.
- Alnashr, M Sofyan, and Amin Suroso. "The Thoughts of KH. Bisri Mustofa's Moral Education and Its Relevance with Development of Character Building." *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial* 1, no. 1 (2020).
- An-Nazili, Muhammad Haqqy. *Khozinah Al Asror*. Semarang: Toha Putra, n.d.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Asnawi. *Fasalatan*. Kudus: Menara, 1954.
- Ichwan, Muhammad Nur. *Risalah Salat Tarawih, Membongkar Khilafiah Menebar Ukhwah*. Yogyakarta: Menara Kudus, 2009.
- Khosiin, Nur. "Dakwah Akhlak Melalui Literasi (Kajian Terhadap Kitab Syiiran Nasehat Karya)." *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 4, no. 1 (2015): 77–102.
- . "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Karya KHR. Asnawi." *Islamic Review : Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* (2018).
- Mansur. *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Mas'ud, Abdurrahman. *Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama Dan Tradisi*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Nasution, Lahmudin. *Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2011.
- Nawawi, Syekh Muhammad. *Kasyifah Al-Saja*. Semarang: Toha Putra, n.d.
- Toha, Chabib. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Implementasi Manajemen Metode Qiro'ati dalam Meningkatkan Baca Tulis Al-Qur'an (Studi pada TPQ di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati)

Eni Rohmawati

IAIN Kudus

enirohmawati445@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the implementation management of the qiro'ati method in an effort to improve reading and writing of the Al-Qur'an. This type of research used qualitative research methods with data collection techniques using observation, interviews and documentation. The results of this study can be concluded that qiro'ati learning activities are carried out for one hour and fifteen minutes, the learning steps start from the line-up stage filled with prayer and memorizing short letters, followed by the teacher giving examples and the children imitating then at the final stage followed by a method of observing and repeating the material that has been presented. From these activities, it is considered capable of improving the reading and writing of the Al-Qur'an TPQ in the Jakenan sub-district, Pati Regency. Supporting and inhibiting factors include implementation, activeness, and infrastructure.

Keywords: Implementation Management; Qiro'ati Methods; Read and Write Qur'an

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi manajemen pelaksanaan metode qiro'ati dalam upaya meningkatkan baca tulis Al-Qur'an. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran qiro'ati dilakukan selama satu jam lima belas menit, langkah pembelajaran dimulai dari tahap baris-berbaris yang diisi dengan berdoa dan menghafal surat pendek, dilanjutkan dengan guru memberi contoh dan anak-anak menirukan lalu pada tahap akhir dilanjutkan dengan metode simak dan pengulangan materi yang telah disampaikan. Dari kegiatan tersebut dinilai mampu meningkatkan baca tulis Al-Qur'an TPQ se-kecamatan jakenan Kabupaten Pati. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat meliputi pelaksanaan, keaktifan, dan sarana prasarana

Kata Kunci: Implementasi Manajemen; Metode Qiro'ati; Baca Tulis Al-Qur'an.

A. Pendahuluan

Pendidikan baca tulis Al-Qur'an merupakan salah satu unsur yang dapat menciptakan kemajuan peradaban dan peningkatan kualitas dalam hidup beragama. Dalam penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an merupakan

hal yang sangat perlu diperhatikan. Beberapa kenyataan berkenaan dengan rendahnya kualitas baca tulis Al-Qur'an peserta didik sekarang. Oleh karena itu, pendidikan baca tulis Al-Qur'an secara terus menerus harus dibangun dan dikembangkan agar dari proses pelaksanaannya menghasilkan generasi yang diharapkan. Pendidikan bertujuan agar individu dapat mengembangkan segala potensi yang ada pada dirinya. Berbagai upaya dilakukan lembaga pendidikan baca tulis Al-Qur'an untuk membina perkembangan baca tulis Al-Qur'an dari segi bacaan, makhroj, tajwid, ghorib. Selain mampu membaca peserta didik juga mampu menulis dengan baik. Supaya dalam kegiatan belajar baca tulis Al-Qur'an dapat berjalan dengan lancar, maka banyak sekali solusi yang digunakan yaitu metode-metode cara cepat baca tulis Al-Qur'an diantaranya adalah dengan menggunakan Metode Iqro', Tilawati, Qiro'ati Bagdadiyah, Nahdiah, Al-Barqi dan lain-lain. Namun disini yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah menggunakan metode Qiro'ati.

Di kecamatan Jakenan termasuk banyak TPQ yang mengikuti metode Qiro'ati dalam pembelajarannya. Karena metode Qiro'ati merupakan metode cepat dan tepat dalam belajar membaca dan menulis Al-Qur'an. Selain itu metode Qiro'ati ini disiplin dalam penerapannya, bahkan metode ini banyak sekali strategi yang digunakan supaya dapat mencapai hasil yang maksimal. Akan tetapi dengan berbagai prestasi yang didapatkan TPQ yang mengikuti metode Qiro'ati sekecamatan Jakenan kurang maksimal dalam memanajemen keberhasilan kelulusan peserta didik. Dalam mengikuti metode Qiro'ati optimalnya TPQ setiap tahunnya harus mampu meluluskan 20% peserta didik dari semua keseluruhan peserta didiknya. Misalnya disebuah lembaga TPQ mempunyai peserta didik sebanyak 100 orang, maka yang lulus optimalnya 20 orang anak.

Oleh karena itu lembaga TPQ dalam penerapan pembelajaran baca tulis Al-Qur'an perlu adanya pengelolaan yang baik dan inovatif guna mendapatkan hasil belajar yang baik. Pengelolaan merupakan perencanaan, pengorganisasian pergerakan, pengawasan, dan evaluasi dalam pendidikan yang dilakukan oleh pengelola pendidikan untuk membentuk peserta didik yang berkualitas sesuai

tujuan.¹ Dalam hal ini guru sebagai pengelola berperan dalam melakukan pembelajaran dengan mengarahkan anak didiknya untuk melakukan kegiatan belajar. Guru sebagai pengelola pembelajaran memberi motivasi kepada peserta didik agar terdorong untuk belajar dengan baik dan juga semangat. Strategi pembelajaran terdiri atas metode dan teknik mengajar yang menjamin siswa mencapai tujuan pembelajaran. Disini guru bukan hanya sekedar menguasai kaidah-kaidah pembelajaran akan tetapi guru harus mampu memanajemen keadaan kelas atau menguasai peserta didik. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan meneliti tentang (1) Bagaimana implementasi manajemen pelaksanaan metode Qiroa'ti di TPQ se kecamatan Jakenan kabupaten Pati, (2) Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat manajemen pelaksanaan metode Qiro'ati di TPQ se kecamatan Jakenan kabupaten Pati, (3) Bagaimana upaya guru untuk meningkatkan keprofesionalan mutu dalam meningkatkan pendidikan baca tulis Al-Qur'an di TPQ se kecamatan Jakenan kabupaten Pati.

B. Konsep Dasar Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa Inggris *to manage*, yang berarti mengatur, mengelola, dan melaksanakan. Adapun menurut George R. Terry yaitu, manajemen merupakan proses kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan serta penilaian yang dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal dalam sebuah lembaga.² Dalam arti lain manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan, bimbingan, dan pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasi atau maksud-maksud yang nyata.

Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah *managing* atau pengelolaan, sedang pelaksananya disebut *manager* atau pengelola. Dalam kehidupan yang semakin lama semakin ketat kompetensi dalam pendidikan, kita dituntut untuk dapat mengatur segala sesuatu dengan sistematis. Dalam menjalankan suatu proses kerja seseorang harus mempunyai pengetahuan tentang

¹Daryanto, *Media Pembelajaran*, (Yogyakarta: Gavamedia, 2103), hlm. 41.

² Tantri Abeng, *Profesi Manajemen*, (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 201.

menejemen dari pekerjaan yang akan dilakukan. Adapun dalam pelaksanaan kita harus melakukan hal-hal berikut ini:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah langkah awal merumuskan strategi, dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya organisasi untuk meramalkan kesuksesan dimasa yang akan datang. Menurut UU No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spriritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.³

Perencanaan pendidik harus komprehensif yang mengandung konsep menyeluruh yang sistemik dan menyeluruh yang disusun secara teratur dan rasional sehingga membentuk satu keseluruhan yang lengkap dan sempurna. Agar perencanaan berjalan lancar dan tidak ada hambatan dikemudian hari, perencanaan harus memperhatikan nilai-nilai yang ada di masyarakat tertentu, antara lain yaitu nilai budaya setempat, moral, dan religious. Hal ini harus diperhatikan ketiga-tiganya. Karena ketiganya mempunyai nilai satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan.

2. *Organizing* (Fungsi Organisasi)

Menurut George R. Terry yang dikutip oleh Mulyono pengorganisasian adalah menyusun hubungan perilaku yaang efektif antara personalia, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh keputusan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas dalam situasi lingkungan yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu.⁴

Dalam pengertian yang lain pengorganisasian pendidikan adalah sebuah proses pembentukan sistem dalam rangka melakukan kegiatan pendidikan

³ UU No.20 tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, pasal 1 poin 1.

⁴ Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*, (Jakarta: AR-RRUZ Media, 2009),

untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.⁵ Dalam setiap lembaga pendidikan haruslah adanya struktur organisasi yang jelas. Dengan adanya struktur organisasi, kita dapat melihat komponen atau unsur-unsur apa saja yang ada dalam lembaga tersebut. Secara sederhana organisasi sekolah meliputi komite sekolah, kepala sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan siswa.

3. *Actuating* (Fungsi Pengarahan)

Actuating diartikan sebagai penggerak adalah kegiatan manajemen untuk membuat orang lain suka dan dapat bekerja secara ikhlas serta dengan rencana dan pengorganisasian. Dalam manajemen terdiri dari berbagai potensi yang dimiliki oleh staf dan pegawai lainnya. Agar potensi –potensi tersebut dapat bermanfaat secara optimal, maka perlu digerakkan oleh manajer. Pengarahan ini dilaksanakan untuk mengarahkan bawahan dengan maksud agar mereka bersedia bekerja dengan sebaik mungkin. Dan diharapkan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip rencana di awal.

Pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa aktifitas telah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Lewat fungsi pengendalian, manajer mempertahankan organisasi tetap pada jalurnya. Pengendalian sangat penting untuk meminimalisir tingkat kesalahan. Karena dengan adanya control, maka kesalahan akan cepat diperbaiki.

4. *Motivating* (Motivasi)

Motivasi merupakan faktor terpenting yang selalu mendapat perhatian didalam berbagai usaha yang ditujukan untuk mendidik dan membelajarkan manusia, baik didalam pendidikan formal, non formal, dan informal. Maka pada hakikatnya motivasi harus difahami oleh pendidik atau pihak-pihak yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Motivasi juga dilakukan untuk menumbuhkan semangat bekerja dalam memenuhi kebutuhan yang ditimbulkan. Fungsi motivasi yaitu untuk melancarkan usaha

Didin Kurniadin dkk, *Manajemen Pendidikan (Konsep & Prinsip Pengelolaan Pendidikan)*, (Depok, Ar Ruzz Media, 2013), 177.

kerja sama. Pada dasarnya motivasi dapat timbul dari diri sendiri dan orang lain.

5. *Empowering* (Pemberdayaan)

Pemberdayaan adalah usaha untuk mendayagunakan dan atau meningkatkan kondisi fisik, mental dan sikap karyawan, agar mereka, tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya sebuah organisasi. Pemberdayaan juga bisa diartikan sebagai proses membangun dedikasi dan komitmen yang tinggi sehingga organisasi itu bias jadi sangat efektif dalam mencapai tujuan-tujuannya dengan mutu yang tinggi. Karena dengan adanya pemberdayaan seseorang yang mengikuti organisasi atau sumber daya manusia yang ada disebuah organisasi sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan keterkaitan dengan tugasnya.

6. *Facilitating* (Memfasilisasi)

Menurut Mauling sarana dan prasarana adalah wahana untuk melakukan atau untuk mempermudah sesuatu. Sara dan prasarana dapat pula dianggap alat. Sarana dan prasarana juga biasanya dihubungkan dalam pemenuhan kebutuhan.⁶Sarana dan prasarana dapat juga diartikan segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha. Hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen ini adalah kerusakan yang sering dilakukan oleh siswa yang jahil.

7. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan merupakan kegiatan-kegiatan yang meliputi pengendalian, membina, dan meluruskan untuk mengendalikan mutu pendidikan. Pengawasan yang efektif, roda organisasi, implementasi rencana, kebijakan, dan upaya pengendalian mutu dapat dilaksanakan dengan baik.⁷ Oteng Sutisna berpendapat bahwa pengasan adalah proses administrasi yang bertujuan melihat bahwa segala hal dilakukan telah sesuai dengan aturan. Dalam pengawasan ini juga dilaporkan faktor penghambat dan pendukung sehingga

⁶ Tatang M.Amrin, *Manajemen Pendidikan*(Depok:Arruz media. 2013), hlm 74.

⁷Sarbini, *Perencanaan Pendidikan*, 135.

memudahkan usaha perbaikan. Jadi, pengawasan ini dilihat dari segi input, proses, output bahkan outcomenya telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan atau belum sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi kegiatan pengawasan ini sangat diperlukan.

8. *Evaluating* (Mengevaluasi)

Fungsi evaluasi merupakan alat untuk menilai berhasil atau tidaknya sebuah tujuan yang telah direncanakan. Kalau kontroling itu menilai sebuah proses, maka evaluasi adalah menilai hasil. Apakah hasil yang telah diperoleh sama dengan rencana yang telah ditetapkan atau belum. Evaluasi dilakukan dalam tiga tahap yaitu evaluasi awal, evaluasi pertengahan, evaluasi akhir.⁸ Dalam evaluasi ini adalah tugas manajer atau ketua lembaga sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan penanggungjawab yaitu sebagai pemberi ilmu atau arahan, mampu membuat keputusan dengan tegas dan tepat, mampu menumbuhkan semangat kerja untuk para anggotanya, Dan mampu mengendalikan situasi apabila ada kesalahan fahaman di organisasi. Dan mampu bersikap adil terhadap anggotanya.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis dan bersifat induktif/kualitatif yaitu penelitian yang untuk menjelaskan, memprediksikan, membandingkan, mencari hubungan dengan mengadakan manipulasi terhadap objek penelitian serta adanya kontrol.

Dalam penelitian ini peneliti sebagai human instrument dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, dan *in the dept interview*, maka peneliti harus mengenal betul orang yang memberikan data. Penelitian kualitatif dalam melakukan pengumpulan data terjadi interaksi antara peneliti data dengan sumber data.

⁸ Fatah Syukur, *Manajemen SDM Pendidikan*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), 21.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Manajemen Metode Qiro'ati

Metode Qiro'ati adalah suatu metode membaca Al-Qur'an yang langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan qoidah ilmu tajwid. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa dalam metode qiro'ati terdapat dua pokok yang mendasari yakni: membaca Al-Qur'an secara langsung dan pembiasaan pembacaan dengan tartil sesuai dengan ilmu tajwid. Membaca Al-Qur'an secara langsung maksudnya adalah dalam pembacaan jilid ataupun Al-Qur'an tidak dengan cara mengejah akan tetapi dalam membacanya harus secara langsung.

Dapat disimpulkan bahwa metode Qiroati merupakan metode yang yang bisa dikatakan metode membaca Al-Qur'an yang ada di Indonesia yang dikarang oleh kiayi Dachlan Salim Zarkasyi dari Semarang Jawa Tengah. Metode ini mengajarkan dengan mempraktikkan langsung tanpa peserta didik diberi ejaan terlebih dahulu atau sistem menuntun. Agar dapat melaksanakan metode qiro'ati dengan baik dibutuhkan tenaga pendidik yang kompeten.

Undang-Undang Sisdiknas menyebutkan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widiaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggara pendidikan.⁹ Guru adalah pendidik yang memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar, menengah maupun atas yang memiliki kompetensi paedagogik, kepibadian, professional social. Guru juga adalah orang tua kedua bagi peserta didik. Karena gurulah yang mengajarkan, dan mendidik peserta didik dengan baik dan benar sesuai aturan yang berlaku bahwa guru harus berperilaku di manapun dan kapanpun.

Tenaga pendidik qiro'ati biasa disebut dengan Ustadz/ustadzah merupakan ujung tombak dalam hal keberhasilan siswa/santri untuk membaca dengan baik, benar, dan lancar. Maka diwajibkan atau diharuskan bagi

⁹ Rusdiana, *Pengelolaan Pendidikan*, 146.

ustadz/ustadzah Qiro'ati memenuhi syarat-syarat menjadi ustadz/ustadzah. Sebagaimana disebutkan syarat-syarat menjadi ustadz/ustadzah Qiro'ati adalah:

- 1) Niat yang tulus, semata-mata karena Allah Ta'ala.
- 2) Berkemauan tinggi untuk mengajar Al-Qur'an.
- 3) Berakhlak mulia.
- 4) Lulus *tashih*.
- 5) Untuk ustadz/ustadzah yang sudah lulus, maka diharuskan untuk mengikuti pembinaan metodologi dan pengajaran Qiro'ati.
- 6) Mengikuti tadarus atau silaturrohim antar guru yang diwujudkan dalam bentuk tadarus Al-Qur'an yang diadakan minimal dua kali sebulan untuk lembaga, Sebulan satu kali untuk koordinator kecamatan dan tiga bulan sekali untuk koordinator kabupaten.¹⁰

Seperti lembaga pendidikan lainnya, lembaga TKQ/TPQ yang mengikuti metode Qiro'ati juga mewajibkan para pengajar atau ustadz/ustadzah yang mengajar di lembaga tersebut juga harus lulus ujian terlebih dahulu. Atau boleh mengajar dengan syarat mempunyai syahadah. Cara mendapatkan syahadah untuk dapat mengajar lembaga TKQ/TPQ yang mengikuti metode Qiro'ati harus mengikuti LPMQ yaitu Lembaga pendidikan untuk orang-orang yang ingin mengajar Qiro'ati.

Di lembaga ini calon guru dijarakan membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar seperti layaknya sekolah TPQ. Yaitu pembelajaran dimulai dari jilid Pra TK seperti peserta didik di TPQ sampai khatam. Yaitu dengan menghafal tajwid, ghorib dan ilmu-ilmu yang lain. Misalnya hafalan surat pendek dan cara sholat dengan baik dan benar dan do'a sehari-hari.

Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non-formal jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan bacaan, hafalan, dan

¹⁰ Koordinator TKQ/TPQ Metode Qiro'ati Cabang Pati, *Manajemen Pendidikan Sebuah Pengantar*, 3-4.

pemahaman Al-Qur'an, serta memahami dasar-dasar dinul Islam pada anak usia sekolah dasar dan atau madrasah ibtidaiah (SD atau MI).¹¹ Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) juga merupakan Suatu lembaga non formal yang sangat strategis untuk menghapus buta baca tulis al-Qur'an sesuai dengan misi utamanya, serta sebagai sarana untuk mengenalkan dasar-dasar islam dan pengalaman hidup yang islami kepada anak-anak.

TPA menjadi tempat berlangsungnya pembelajaran baca tulis Alquran dengan metode Qiroati. Pelaksanaan pembelajaran disebut juga dengan kegiatan di bidang pendidikan untuk mengajarkan peserta didik akan mampu melaksanakan tugas dan belajar dengan baik. Guru sebagai pendidik harus mampu memberi dorongan-dorongan dalam diri peserta didik yang diajarkan untuk melakukan tugas atau kegiatan yang diberikan kepadanya sesuai dengan rencana dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.

Guru harus mampu menggali potensi yang ada pada peserta didik dari segi kognitif, afektif dan psikomotorik. Maka dari itu ada faktor-faktor yang saling berhubungan yaitu: tujuan pembelajaran bagi siswa yang belajar, guru yang mengajar, bahan yang diajarkan, metode pembelajaran dan alat bantu mengajar. Dari faktor yang ada itu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, maka dari itu bagaimana seorang pengajar dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sesuai perencanaan yang telah ada.¹²

Keberhasilan pendidikan ditentukan oleh banyak faktor antara lain guru, siswa, sarana dan prasarana dan lingkungan. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah".¹³ Dari ketiga lingkungan itulah dapat muncul berbagai faktor yang mendukung dan juga menghambat pembelajaran baca tulis Al-Qur'an atau pendidikan baca tulis Al-Qur'an. Yang mana yang tadinya menjadi faktor pendukung menjadi faktor penghambat karena tidak berfungsi sebagaimana fungsinya. Adapun faktor

¹¹ Hasbi Indra, *Standarisasi Nasional Mutu Pendidikan Al Qur'an*, (Jakarta: t.p., 2012), hlm19.

¹² Abdul Wahab Rosyidi, *Media Pembelajaran Bahasa Arab*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm7.

¹³ Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1992) hlm 34.

pendukung dan penghambat yaitu antara lain guru, peserta didik, sarana dan prasarana, orangtua, dan masyarakat.

2. Implementasi Pelaksanaan Metode Qiro'ati di TPQ se-Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati

Untuk memudahkan dalam penelitian. Peneliti mengelompokkan penelitian ini menjadi tiga kelompok. Yaitu antara TPQ yang baik, cukup baik, dan kurang baik dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Kategori Keberhasilan TPQ

Kategori	TPQ
Kurang baik	Miftahul Falah
	Al Badriyah
	Mamba'ul Hikmah
	Assyafi'iyah
	Mafatihul Huda
	Asy'ariyah
	Al Falah
Cukup Baik	Nurul Hidayah
	Bustanul 'ulum
	As Salam
	Roudlotul Islah
	Darul 'Ulum
Baik	Darul Arqom
	Nurul Huda
	Nahdlotus Syu'ban
	Sirojul 'Ulwiyyah

Tabel 1.2 Indikator Penilaian

Variabel	Indikator
Waktu Pembelajaran	- 15 menit berbaris - 15 Praga/Klasikal/baca simak - 30 menit individual
Ustadzah/Guru	Semua ustadz/ustadzah sudah bersyahadah
Fasilitas	- Semua jilid mempunyai ruangan - Tersedianya WC/kamar mandi - Tersedianya meja tulis yang memadai
Peraturan	- Guru disiplin dalam kehadiran - Peserta didik disiplin dalam kehadiran

Dari hasil yang ditemukan oleh peneliti di lapangan, banyak TPQ yang belum mencapai maksimal dalam mempraktekan metode Qiro'ati dengan baik dan benar. Hal ini dikarenakan kurangnya tenaga pendidik dan fasilitas yang dimiliki sebuah lembaga pendidikan TPQ. Karena kita ketahui bahwa lembaga pendidikan TPQ tidak terlalu diperhatikan pemerintah. Dan kebanyakan bangunan adalah hasil dari sumbangan para masyarakat atau bangunan berada di tanah wakaf.

Setelah meneliti di 16 TPQ banyak hambatan yang dialami sebuah lembaga TPQ antara lain bangunan yang kurang maksimal sehingga dalam satu ruangan untuk pembelajaran dua sampai tiga jilid yang idealnya satu ruangan untuk satu jilid. Dan minimnya guru sehingga kurang maksimal dalam pembelajaran. Faktor-faktor pendukung dalam pendidikan Al-Qur'an antara lain yaitu guru, siswa, keluarga, sarana dan prasarana, dan masyarakat. Faktor pendukung tersebut akan menjadi penghambat jika tidak berperan sebagaimana fungsinya. Faktor-faktor di atas harus bekerja secara berkesinambungan untuk menghasilkan produk yang baik, terutama keluarga. Keluarga harus mendukung penuh untuk berjalannya anak didik yang berpotensi di bidang Al-Qur'an.

Guru sebagai pendidik harus mampu memberi dorongan-dorongan dalam diri peserta didik yang diajarkan untuk melakukan tugas atau kegiatan yang diberikan kepadanya sesuai dengan rencana dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran guru harus mempunyai strategi pembelajaran dan merumuskan tujuan pembelajaran dan merumuskan kriteria keberhasilan dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Agar kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan berjalan secara sistematis dan terencana.

E. Simpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen pelaksanaan metode Qiroati di TPQ se kecamatan Jakenan Kabupaten

Pati berlangsung cukup baik. Pembelajaran dilaksanakan selama satu jam lima belas menit yang dimulai dari baris yang diisi dengan berdoa dan menghafal surat-surat pendek, dilanjutkan peraga dimana guru memberi contoh dan anak menirukan, dilanjutkan baca simak anak maju satu persatu, dan terakhir pengulangan materi-materi yang sudah disampaikan. Adapun faktor pendukung dalam pembelajaran baca tulis Al-Qur'an di TPQ se kecamatan Jakenan antara lain rasio guru dan peserta didik sesuai secara kuantitas, Guru aktif dan faham cara mengajar metode Qiro'ati dengan baik, dan peserta didik yang disiplin masuk. Sementara faktor penghambatnya antara lain fasilitas yang tidak memadai antara luas bangunan dan jumlah murid.

Daftar Pustaka

- Abeng, Tantri, *Profesi Manajemen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Amirin, Tatang, *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta: UNY Press, 2011.
- Amtu, Onisimus, *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah Konsep, Strategi, dan Implementasi*, Bandung, Alfabeta, 2011.
- Daryanto, *Media Pembelajaran*, Yogyakarta: Gavamedia, 2013 .
- Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Ath-Toriq, 2012.
- Hamdani, *Strategi Belajar Mengajar*, Bandung, Pustaka Setia, 2011.
- Hamzah, M Ali, *Evaluasi Pembelajaran Matematika*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2014.
- Hasbulloh, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta, raja Grafindo Persada, 2008.
- Huda, Miftahul, *Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran*, Bandung Gavamedia, 2016.
- Indra, Hasbi, *Standarisasi Nasional Mutu Pendidikan Al-Qur'an*, Jakarta: 2012.
- Indra, Hasbi, *Pedoman Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an TKA dan Taman Pendidikan Al-Qur'an TPQ*, Jakarta, Gramedia, 2013.
- Isriani, *Strategi Pembelajaran Terpadu*, Yogyakarta, Familia, 2012.
- Iskandar, *Psikologi Pendidikan (Membantu Siswa Tumbuh dan Berkembang)*, Jakarta: Gaung Parsada Press, 2002.
- Kasdi, Abdurrohman, *The Empowerment of Productive Waqf in Egyptian Al-Azhar for Education and its Relevance to be Implemented in Indonesia*, International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET), 2018

- Koordinator TKQ/TPQ Metode Qiro'ati Cabang Pati, *Perangkat Administrasi Lembaga/ TPQ Metode Qiro'ati*, PP. Murul Qur'an, Pati, 2018.
- Kurniadin, Didin, dkk, *Manajemen Pendidikan (Konsep & Prinsip Pengelolaan Pendidikan)*, Depok, Arruz Media, 2013.
- Maftuhah A.M, *Cuplikan Risalah Tajwid*, Pati: Korcab TPQ Qiro'ati Pati, 2019.
- Muhaimin, *Arah Baru Pengembangan Islam: Pemberdayaan Pengembangan Kurikulum, Hingga Redevisi Islamisasi Pengetahuan*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2003 .
- Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*, Jakarta: Arruz Media, 2009.
- Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2007.
- Musfi'ah, Jejen, *Manajemen Kebijakan Teori dan Praktik*, Jakarta: Prenadia Group , 2015.
- Nur, Abdul Aziz Muhammad, *Mendidik Anak Bersama Nabi*, ter., Salafuddin Abu Sayyid, Solo: Pustaka Arofah, 2003.
- Sihabudin, *Panduan Kurikulum TKQ, TPQ, BADKO TPQ Provinsi Jawa Tengah*, Semarang: Pustanegara, 2015.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010.
- Subroto, Surya, *Performance Manajement*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Syukur, Fatah, *Manajemen SDM Pendidikan*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Rosyidi, Abdul Wahab, *Media Pembelajaran Bahasa Arab*, Malang: UIN Press, 2009.
- Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Quran Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1997.
- <http://www.koleksiskripsi.com/2019/04/196-deskripsi-kemampuan-mengajar-guru.html>

Partisipasi Perempuan Desa Karangsari Dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusif

Tri Hariyono

Swara Nusa Institute Kulonprogo, DIY

Email: Trie_hariyono@ymail.com

Abstract

Substantially, Law of concerning Village No. 6 of 2014 has the aim of realizing a village government that is professional, efficient, effective, open and accountable. Karangsari village, Kulonprogo DIY in managing village assets provides space for every villager, especially women, vulnerable and marginalized groups to be involved in managing village assets, especially in optimizing sustainable livelihoods. The involvement of women, vulnerable and marginalized groups can be seen through the Village Deliberation Forum (Musdes), they participate in providing input and suggestions related to village development and economic arrangement based on sustainable livelihoods. In addition, women and marginalized groups in villages also have the same opportunity to utilize assets in three sector areas, namely the agricultural sector, MSMEs, and tourism. More than that, the economic dynamics of village women not only get institutional support, such as organizing groups such as KDDK, KWT, and skills, but they also get support for marketing access that integrates the local village economy into the market for products of micro, small and medium enterprises (UMKM) are wider.

Keywords: Inclusive Development; Women; Village Asset Management

Abstrak

Secara substansial, Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa mempunyai tujuan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka dan bertanggung jawab. Desa Karangsari, Kulonprogo DIY dalam pengelolaan aset desa memberikan ruang bagi setiap orang warga desa terutama perempuan, kelompok rentan dan marjinal terlibat dalam pengelolaan aset desa terutama dalam mengoptimalkan penghidupan berkelanjutan. Keterlibatan perempuan, kelompok rentan, dan marjinal ini bisa dilihat melalui Forum Musyawarah Desa (Musdes) mereka berpartisipasi ikut memberikan masukan dan usulan terkait dengan pembangunan desa dan penataan ekonomi berbasis penghidupan berkelanjutan. Di samping itu perempuan dan kelompok marjinal di desa juga memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan aset dalam tiga sektor area yaitu sektor pertanian, UMKM, dan Pariwisata. Lebih dari itu, dinamika ekonomi perempuan desa tidak hanya mendapatkan dukungan kelembagaan, seperti pengorganisasian kelompok seperti KDDK, KWT, dan bekal keterampilan, tetapi mereka juga mendapatkan dukungan akses pemasaran yang mengintegrasikan ekonomi lokal desa ke dalam pasar produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang lebih luas.

Kata Kunci: Pembangunan Inklusif; Perempuan; Tata Kelola Aset Desa

A. Pengantar

Pembangunan di Indonesia selama ini masih menfokuskan perhatian pada pertumbuhan yang mengandalkan investasi besar,¹ namun kurang mengikutsertakan rakyat kecil sebagai subyek dan bagian utama dari pembangunan. Pembangunan sosial masih dipandang sebelah mata dan hanya dianggap sebagai sesuatu yang bersifat *residual*. Padahal, di negara-negara berkembang lainnya, pembangunan sosial sudah mulai menjadi bagian integral dari pembangunan ekonomi dan kedua elemen ini saling mendukung.² Akibat dari mengabaikan pembangunan sosial ini sering terjadi eksklusi pembangunan pada masyarakat bawah, rakyat miskin mengalami ketertutupan akses serta tertinggal dalam setiap proses pembangunan.

Dalam peta pembangunan, selama ini sering terlena oleh sekian janji bahwa paradigma pertumbuhan sebagaimana disinggung di atas, akan memakmurkan semua anggota masyarakat melalui *trickel-down*. Namun faktanya pertumbuhan ekonomi tidak serta merta menciptakan lapangan pekerjaan dan menambah lapangan pekerjaan, apalagi menanggulangi kemiskinan.³ Paradigma ini menghalalkan penyitaan sebagian hasil pembangunan oleh mereka yang telah mapan dan menyisakan sebagian kecil hasil pembangunan “diteteskan” kepada mayoritas rakyat. Untuk itu, diperlukan paradigma pembangunan baru yang secara adil dan merata melibatkan seluruh masyarakat secara aktif sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Pelibatan seluruh masyarakat secara aktif tersebut, memunculkan istilah pembangunan inklusif.⁴

¹ Bulan Juli 2010, Japan Credit Rating Agency Ltd (JCR), misalnya, memperbaiki peringkat Indonesia hingga mencapai *Investment grade* (level investasi). Tidak mengherankan, investor portofolio membanjiri pasar keuangan domestik sejak akhir 2010 hingga 2011.

² Untuk kajian lebih dalam terkait dengan isu pembangunan sosial di negara berkembang, lihat Riant Nugroho, *Kebijakan Sosial untuk Negara Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014). Soetomo, *Masalah Sosial, Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).

³ Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist Press, 2001), hlm.70

⁴ A Prasetyantoko, Sugeng Bahagiyo, dan Setyo Budiantoro, Prolog “Prospek dan Tantangan Pembangunan Inklusi di Indonesia”, dalam A Prasetyantoko, Sugeng Bahagiyo, dan Setyo Budiantoro ed. *Pembangunan Inklusif: Prospek dan Tantangan Indonesia*, (Jakarta: LP3ES dan Prakarsa, 2012), hlm.3

Secara sederhana, pembangunan inklusif bisa dimaknai sebagai pembangunan untuk semua lapisan masyarakat tanpa ada satupun yang ditinggalkan yang hendak meraih kemajuan dan kemakmuran bersama dengan pergulatan kerakyatan, kemartabatan dan kemandirian”.⁵ Tema tentang pembangunan inklusif dewasa ini kian menarik perhatian dan dianggap penting, terutama setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa). UU Desa ini melahirkan struktur kesempatan yang memungkinkan desa tumbuh berkembang menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Kedudukan desa, dengan asas rekognisi dan subsidiaritas, berubah menjadi subyek pembangunan, memiliki kewenangan dan anggaran yang cukup guna mengurus aset desa dalam upaya mengoptimalkan penghidupan berkelanjutan.⁶

Berbicara tentang pengelolaan aset desa terutama dalam mengoptimalkan penghidupan berkelanjutan, seringkali dibatasi hanya urusan laki-laki, sementara perempuan desa dianggap cukup berperan diranah domestik saja, seperti mengurus rumah tangga, mengantarkan makanan ke ladang atau ke sawah, serta mencari air bersih untuk kebutuhan rumah tangga. Akibatnya, keterlibatan perempuan dalam pengelolaan aset untuk kepentingan ekonomi maupun dalam kerangka menemukan penghidupan berkelanjutan tidak banyak diungkap.

Tulisan ini hendak menjawab terkait permasalahan dimaksud, yaitu dengan memanfaatkan perspektif *sustainable livelihoods*, bagaimana perempuan di desa Karangsari, Kulonprogo keluar dari *stereotype* dan mulai melibatkan diri dalam pengelolaan aset untuk kepentingan ekonomi maupun terlibat dalam pengelolaan aset desa dan memanfaatkannya dalam konteks pengembangan sumber penghidupan.⁷ Lalu, mengapa perempuan dan desa Karangsari sebagai *evidence-*

⁵ Adi Sasono, *Menjadi Tuan Di Negeri Sendiri: Pergulatan Kerakyatan, Kemartabatan, dan Kemandirian* (Jakarta: Grafindo Books Media, 2013).

⁶ Sutoro Eko, *et.al. Desa Membangun Indonesia* (Yogyakarta: FPPD, 2014), hlm.45-46.

⁷ *Sustainable livelihoods* atau sumber penghidupan berkelanjutan adalah sebuah konsep yang mengombinasikan antara kemampuan, keadilan, dan keberlanjutan dalam menjaga aset (baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat) guna memperoleh kehidupan yang lebih baik dan berkesinambungan. Penghidupan dikatakan memiliki dimensi *sustainable* atau berlanjut jika mampu bertahan menghadapi berbagai goncangan maupun tekanan. Lihat Chambers, R., & Conway, G.

based practice?⁸ Perempuan desa adalah aktor berwajah ganda. Pada satu sisi perempuan desa adalah komponen kelompok warga desa yang miskin dan rentan dipinggirkan secara sosial, ekonomi, dan politik. Tetapi, di sisi lain, perempuan desa merupakan kekuatan utama di desa, terutama dalam hal mengelola dan memanfaatkan aset desa. Penguasaan aset dan adanya akses tentu membutuhkan keberlanjutan. Inilah yang disebut strategi penghidupan. Secara ringkas, strategi penghidupan adalah portofolio penghidupan berkelanjutan seseorang yang bisa ditempuh melalui strategi pertanian, non-pertanian dan/atau melakukan migrasi, bahkan berorganisasi.⁹ Disamping itu, berbekal perspektif penghidupan berkelanjutan, tulisan ini juga ingin memperlihatkan bahwa perempuan desa adalah profil warga aktif yang mampu mencari dan mengoptimalkan aset desa serta mengembangkan penghidupan berkelanjutan untuk keluar dari kesulitan ekonomi. Para perempuan desa ini memilih berorganisasi sebagai salah satu strategi nafkah dalam rangka mengembangkan penghidupan berkelanjutan.

Ada beberapa hal yang menarik sehingga perlu dilakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan strategi penghidupan di desa Karangsari ini, *pertama*, selain desa Karangsari merupakan desa yang cukup banyak memiliki potensi, baik potensi alam, sosial maupun budaya, juga menjadi desa pertama di kabupaten Kulonprogo yang dinobatkan sebagai desa teknologi informasi dimana setiap aktivitas dan potensi desa bisa diakses melalui jaringan internet.¹⁰ *Kedua*, Pemerintah desa Karangsari dalam pengelolaan aset desa serta penganggaran pembangunan desa sudah mulai melibatkan masyarakat terutama perwakilan dari kelompok perempuan. Melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) mereka berpartisipasi ikut memberikan masukan dan usulan terkait dengan pembangunan

Sustainable rural livelihoods: practical concepts for the 21st century. Institute of Development Studies (UK), 1992.

⁸ Praktek-praktek pekerjaan sosial dengan memadukan antara teori dan praktek dalam berbagai studi kasus *evidence-based practice* bisa di lihat tulisannya Carol L. Langer dan Cynthia A. Lietz, *Applying Theory to Generalist Social Work Practice: A Case Study Approach* (Canada: Wiley, 2015).

⁹ Sutoro Eko, dkk, *Mutiara Perubahan: Inovasi dan Emansipasi Desa dari Indonesia Timur*, (Yogyakarta: IRE dan ACCESS Phase II, 2013), hlm.5

¹⁰ Laporan Assesment, "Problem-Problem Tata Kelola Aset Desa yang Inklusif dan Memihak Kaum Rentan di Desa Karangsari Kulonprogo", (Kulonprogo: Swara Nusa Institute, 2017), hlm.2

desa dan penataan ekonomi berbasis penghidupan berkelanjutan. *Ketiga*, hadirnya *Non Government Organization* (NGO) seperti Swara Nusa Institute¹¹ turut memberikan kontribusi positif baik untuk Pemerintah Desa maupun untuk pengembangan masyarakat Karang Sari.

B. Desa Karang Sari dan Pengelolaan Aset

Desa Karang Sari di Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulonprogo semula merupakan gabungan dari 3 (tiga) Kelurahan, yaitu Kelurahan Josutan, Kelurahan Kopat dan Kelurahan Kedungtangkil pada Tahun 1947. Desa dengan luas 1.169,91 Hektare ini memiliki topografi yang berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 20 m di atas permukaan laut.¹² Jumlah penduduk per tahun 2016 sebanyak 10,687 jiwa atau 2.769 KK yang tersebar di dua belas pedukuhan yaitu Padukuhan Kopat, Padukuhan Cekelan, Padukuhan Dukuh, Padukuhan Josutan, Padukuhan Sendang, Padukuhan Gunung Pentul, Padukuhan Suruhan, Padukuhan Ringinardi, Padukuhan Blumbang, Padukuhan Kedung Tangkil, dan Padukuhan Kamal.

Pada dasarnya kehidupan warga Karang Sari masih bercorak agraris, hal itu dapat dilihat dari pola kehidupan masyarakat petani yang dipengaruhi oleh kebudayaan dan keagamaan.¹³ Mayoritas masyarakat Karang Sari bermata pencaharian sebagai petani baik petani pemilik lahan maupun buruh tani. Mereka menanam tanaman pangan seperti padi, jagung, macam-macam ubi, cabai dan sebagainya. Selain itu lahan pekarangan warga banyak tumbuh pohon kelapa sebagai pemasukan bulanan, belum banyak warga yang memanfaatkan pekarangan yang dimiliki untuk menanam buah-buahan (seperti mangga, rambutan), hanya ada pohon pisang dan belum dikembangkan menjadi pertanian produktif, hanya

¹¹ Swara Nusa Institute (SNI) merupakan sebuah organisasi masyarakat sipil (CSO) yang koncern dalam kerja-kerja pemberdayaan komunitas, pengorganisasian dan advokasi kebijakan bagi kelompok rentan dan marjinal di wilayah Propinsi DIY dan Jawa Tengah. Isu-isu seputar inklusi sosial, demokrasi lokal, partisipasi politik warga terutama kelompok rentan dan marjinal dalam proses pembangunan desa dan kabupaten masih menjadi perhatian utama dari kerja-kerja Swara Nusa Institute yang dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain; (1) riset-advokasi kebijakan; (2) peningkatan kapasitas kelompok rentan dan marjinal; (3) Publikasi dan Seminar.

¹² Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 2019-2024, hlm.5

¹³ Nur Khoiriyah, "Pandangan Sosial Ekonomi dan Keagamaan Masyarakat Petani Di Jawa", dalam *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. VI No.2 Tahun 2017, hlm. 233

sekedar mengisi lahan kosong sesekali dapat dijual untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak ada data pasti tentang berapa luas kepemilikan lahan secara riil di desa. Namun kita dapat melihat komposisi tenaga kerja di sektor pertanian sebanyak 1.504 orang warga yang merupakan petani, sementara 48 orang sebagai buruh tani. Kondisi ini menunjukkan betapa sektor pertanian menjadi sebagian besar warga untuk mencari penghidupan.¹⁴

Kondisi alam yang berbukit-bukit dan bebatuan serta lahan pertanian sempit dan kurang produktif ini akhirnya banyak warga Karangsari mencoba beralih profesi sebagai buruh harian lepas, komposisinya sekitar 971 orang warga, baik menjadi buruh bangunan maupun pekerjaan lainnya disekitar desa maupun keluar dari kecamatan. Kondisi tersebut mengonfirmasi corak kemiskinan di desa yang disebabkan oleh ketiadaan kepemilikan aset produktif, yakni lahan pertanian sehingga mereka terpaksa beralih profesi menjadi buruh harian lepas. Disamping beralih menjadi buruh harian lepas, warga desa sebagian lainnya juga beralih ke profesi sebagai wiraswasta, komposisi sebanyak 1.956 orang warga, namun dalam skala memiliki usaha peternakan, kerajinan, warung dan toko kelontong yang menyediakan kebutuhan sehari-hari.¹⁵

Desa Karangsari merupakan desa yang cukup banyak memiliki potensi, baik potensi alam, sosial maupun budaya. Untuk potensi alam, ada dua tempat wisata yang dijadikan rintisan wisata yaitu terowongan gua batu di Gunung Pentul dan rintisan Kampung Wisata Sejarah dan etnik di pedukuhan Kamal. Potensi industri kerajinan wilayah Karangsari ada kerajinan Parut di pedukuhan Dukuh, kerajinan Iru di pedukuhan Kopat, kerajinan fiber di padukuhan Kamal, serta potensi UMKM lainnya seperti olahan emping melinjau, emping pisang, anyaman bambo di padukuhan Suruhan dan Sendang.¹⁶ Sedangkan Potensi sosial berupa gotong royong, arisan, senam lansia maupun potensi seni budaya seperti Keroncong, jatilan, dan Teater Alugoro kesemua potensi masih melekat dan menjadi bagian dari identitas warga Karangsari. Sementara dari sisi aset desa

¹⁴ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 2019-2024, hlm.6

¹⁵ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 2019-2024, hlm. 6

¹⁶ Data potensi desa dan UKM 2017 dokumentasi Bumdes Binangun.

sebagai sumber penghidupan, desa Karangsari hendak meraih kemajuan dan kemakmuran bersama dengan melibatkan seluruh pelaku pengembangan ekonomi desa baik pemerintah desa, swasta dan masyarakat melalui pergulatan dengan dimasukkan ketiga pelaku tersebut kedalam delapan indikator kunci meliputi (1) Indikator Kerangka Politik dalam desa; (2) Indikator Kelembagaan Desa; (3) Indikator Peluang pengembangannya; (4) Indikator Kultur Masyarakatnya, (5) Indikator Jaringan Kerjasama; (6) Indikator Sinkronisasi Global; (7) Indikator Penguasaan teknologi, dan; (8) Indikator Sosial yang Inklusi.¹⁷

Dalam pergulatan para pelaku pengembangan ekonomi desa tersebut kemudian diberikan peran masing-masing, dimana pemerintah desa mengambil peran dalam indikator: (1) Kerangka Politik yaitu kebijakan Kades dalam hal kebijakan membawa kondisi desa dalam masa pemerintahannya dibawa kearah mana kemajuan desa, dan (2) Kelembagaan Desa yang terlibat seperti LPMD dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya. Sesuai dengan bidang LKD. Sedangkan dari pihak swasta dapat mengambil peran sebagai pelaku pengembangan ekonomi desa dalam indikator: (1) Mencari peluang pengembangan ekonomi desa dengan bekerjasama dengan pihak pemerintah desa dan masyarakat. (2) Pihak swasta dapat membantu pihak pemerintah desa dalam hal mencarikan jaringan atau membantu hal mengembangkan Jaringan pemerintah desa dalam mengembangkan ekonomi desa. (3) Pihak swasta juga berperan dalam hal sinkronisasi program desa dengan program pihak lain, serta (4) Pihak swasta juga berperan dalam penyediaan Teknologi bagi pengembangan ekonomi desa.

Sedangkan dari pihak masyarakat dapat mengambil peran sebagai pelaku pengembangan ekonomi desa dalam (1) menjaga kultur atau adat istiadat yang ada dalam kehidupan masyarakat desa, sebagai indentitas, bahwa kemajuan desa tidak boleh menghilangkan kultur khas desa. Dan (2) dalam pengembangan ekonomi desa harus berdasarkan pada sosial inklusi yaitu keterlibatan masyarakat dari berbagai macam lapisan, bahkan melibatkan kaum perempuan, kaum rentan

¹⁷ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 2019-2024.

maupun difabel sebagai aktor perubahan desa, sehingga tidak satupun warga masyarakat desa yang merasa ditinggalkan oleh pemerintah desa.¹⁸

C. Aset Desa, Perempuan dan Kelompok Marjinal

Dalam sebuah Workshop *Membangun Visi Perubahan Pengelolaan Aset Desa yang Inklusif Desa Karangsari* diselenggarakan oleh Pemerintah Desa bersama Swara Nusa Institute (SNI) pada tanggal 18-20 Januari 2018 terdapat beberapa rumusan yang menjadi kesepakatan antara perwakilan dari perempuan, kelompok rentan dan difabel dengan pemerintah desa Karangsari. Beberapa rumusan kesepakatan tersebut adalah (1) Pemerintah desa akan memfasilitasi terbentuknya KKD (Kelompok Difabel Desa) Karangsari, (2) mengalokasikan APBDesa untuk kegiatan pemberdayaan perempuan, kelompok rentan dan marjinal, (3) menerbitkan SK untuk keberadaan KDDK, dan (4) memfasilitasi sarana untuk kelompok rentan dan marjinal dengan menyediakan 1 (satu) kios desa untuk menampung kerajinan yang dihasilkan oleh kelompok difabel dan kaum rentan.¹⁹ Rumusan bersama ini merupakan momentum bagi perempuan desa, kelompok rentan dan marjinal untuk bersama-sama dengan pemerintah desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset desa sebagai basis penghidupan berkelanjutan yang inklusif. Komitmen dari pemerintah desa ini merupakan bagian dari amanah UU Desa bahwa tidak ada satupun warga yang ditinggalkan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.²⁰

Apa yang menjadi komitmen bersama ini baik dari pemerintah desa, perempuan desa, dan warga kelompok rentan adalah menjadi tonggak sejarah baru di dalam tata kelola pengelolaan aset desa, dimana perempuan desa, kelompok rentan diberikan akses atas aset desa dan pengelolaannya untuk dijadikan sumber penghidupan berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan pengelolaan aset desa yang inklusif, diperlukan suatu langkah-langkah strategis terutama yang berkaitan

¹⁸ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 2019-2024

¹⁹ Dokumentasi Swara Nusa Institute, Laporan Workshop Membangun Visi Perubahan Pengelolaan Aset Desa yang Inklusif di Desa Karangsari, 18-20 Januari 2018.

²⁰ Dokumentasi Swara Nusa Institute, Rekap proses "Pelatihan Aktor Perubahan: Program Tata Kelola Aset Desa Yang Inklusif", Kulonprogo 13-15 Juli 2018.

dengan pengelolaan aset desa agar bisa bermanfaat secara sosial dan ekonomi bagi warga desa terutama bagi perempuan, kelompok rentan dan marjinal.

Salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah melakukan analisa sosial atau pemetaan situasi dan kondisi sosial serta permasalahan sosial yang ada di desa sebagai dasar bagi sebuah perencanaan pengelolaan aset desa yang inklusif.²¹ Tanpa mengenali dan memahami situasi, kondisi dan permasalahan sosial yang ada di desa maka bisa dipastikan perencanaan desa yang terkait dengan pengelolaan aset desa tidak akan mampu menjawab permasalahan sosial yang ada di desa.

Berdasarkan hasil pemetaan situasi atau kondisi sosial terkait dengan kondisi perempuan desa, kelompok rentan dan marjinal mereka mengalami kerentanan disebabkan beberapa hal; *pertama* mereka kurang mendapatkan akses terhadap informasi, meskipun mereka tidak mempunyai aset berupa finansial, mereka mempunyai kemampuan berupa ketrampilan maupun keahlian namun belum terbuka dan diketahui, Menurut Iskandar Gunawan Direktur BUMDesa Binangun, banyak contoh warga yang hanya berpendidikan sampai Sekolah Dasar (SD) saja, dan mereka mempunyai kemampuan membuat produk bahkan bisa diekspor ke luar negeri. Namun kemampuan ini belum bisa dikelola dengan baik dan belum terbuka dan diketahui oleh orang banyak yang pada akhirnya masih berkutat ditingkat lokal saja.

Sebab *Kedua*, dalam hal pekerjaan kelompok rentan tidak mempunyai penghasilan tetap karena pekerjaan mereka bergantung pada proyek bagi buruh bangunan, maupun bergantung pada musim panen atau tanam bagi buruh tani. Mereka pada akhirnya tidak mendapatkan penghasilan yang pasti dikarenakan bergantung pada orang lain yang mempekerjakan mereka. Sebab *ketiga*, mereka mengalami kerentanan karena lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan tidak mempunyai ketrampilan yang bisa diandalkan. Menurut Kades Karangsari Mujirin, Kebanyakan kelompok rentan di desa ini pendidikan di bawah Sekolah Tingkat

²¹ Tri Hariyono dan Iranda Yudhatama, *Analisis Sosial dalam Pengelolaan Aset Desa yang Inklusif*, (Kulonprogo: Swara Nusa Institute dan VOICE, 2018), hlm. 5-6

Atas (SLTA), tentu ada dampak dari globalisasi dan sebagainya, manusia butuh pengetahuan dan ketrampilan karena sebenarnya banyak kemampuan yang dimiliki mereka misalnya dikampung Gunung Pentul ada warga difabel dan bekerja di percetakan batako dimana setiap harinya mampu mencetak batako lebih dari 200 buah, kalau itu diberi peningkatan kapasitas mereka akan mandiri.²²

Sedangkan dalam pandangan pemerintah desa yang diidentifikasi kelompok rentan adalah keluarga miskin, difabel, perempuan rentan sosial ekonomi, dan lansia. Sedangkan kelompok penghayat tidak ada berdasarkan data agama saja, untuk LGBT belum ada datanya kemungkinan ada namun belum diinventarisir. Data Pemerintah Desa Karangsari menyebutkan bahwa Kelompok rentan ini masuk dalam kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berjumlah 367 orang warga yang terbagi: (1) kelompok difabel 140 orang warga, (2) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 72 orang warga, keluarga Rumah Tidak Layak Huni 104 orang warga, dan (4) lansia 151 orang warga.²³

Setelah dapat ditemukan siapa, apa kelompok rentan dan marjinal di desa Karangsari berikut dengan permasalahan utama yang dihadapi, langkah selanjutnya adalah melakukan pemetaan terhadap para pihak (*stake holder*) desa yang terkait dengan pengelolaan aset desa seperti, pemerintah desa, BUMDes, dan kelompok rentan.²⁴

Berdasarkan hasil pemetaan situasi para pihak desa mensepakati untuk: *Pertama*, pihak Pemerintah desa memfasilitasi terbentuknya kelompok difabel desa, dengan melakukan aktivitas: (a) pendataan kelompok difabel dan perempuan miskin yang melibatkan jurnalis karang taruna dan kader sosial desa, (b) pertemuan pembentukan forum KDDK (Kelompok Difabel Desa Karangsari), dan memfasilitasi pertemuan rutin kelompok difabel dan perempuan miskin; (c) Menganggarkan APBDesa, aktivitas yang dilakukan terkait dengan tahapan ini adalah Pemdes menerbitkan SK Forum KDDK, dan menganggarkan kegiatan pelatihan dan studi banding untuk Forum KDDK; (d) Peningkatan kapasitas

²² Laporan Assesment, "Problem-Problem Tata Kelola Aset Desa yang Inklusif", hlm.3-4

²³ Data diperoleh dari ibu Saptariningsih Kasie Kemasyarakatan Desa Karangsari 2017.

²⁴ Tri Hariyono dan Iranda Yudhatama, *Analisis Sosial dalam Pengelolaan Aset*, hlm.6

Pendes, aktivitasnya adalah pendes yang terdiri dari 25 perangkat desa terlibat dalam pelatihan tentang hak-hak kaum difabel dan kelompok rentan; (e) Program pendidikan dan pelatihan untuk kelompok rentan; (f) Menfasilitasi sarana kios untuk kelompok difabel dan perempuan miskin, yaitu pembes menfasilitasi 1 kios desa yang nantinya digunakan untuk menampung hasil usaha ekonomi kreatif tersebut.

Kedua, dalam hal kelembagaan ekonomi (BUMDesa) Karang Sari melakukan; (a) Program pelatihan untuk peningkatan kapasitas BUMDesa, dengan melakukan aktivitas pelatihan pengelolaan aset desa yang inklusi dan pelatihan bisnis plan, pesertanya adalah direksi dan karyawan BUMDesa; (b) BUMDesa menfasilitasi pemasaran usaha kelompok difabel dan perempuan miskin dengan membuat branding hasil usaha kelompok tersebut dengan target agar penamaan produk serta bisnis plan. Sedangkan pihak perempuan dan kelompok rentan, dengan melakukan : (a) Pendataan kondisi dan kebutuhan kelompok rentan dan perempuan miskin, dengan aktivitas melakukan pendataan kelompok difabel desa karangsari dan perempuan miskin; (b) Peningkatan kapasitas berupa pendidikan dan pelatihan; (c) Pembentukan organisasi/kelompok difabel desa dan unit usaha kelompok dengan target dibulan februari akhir sudah terbentuk forum KDDK dan unit usaha ekonomi kreatif; (d) Penguatan organisasi dengan melakukan pertemuan rutin Forum KDDK dilakukan setiap 2 (dua) bulan sekali, serta mengelola unit usaha bersama.²⁵

Apa yang menjadi kesepatan bersama antar para pihak tersebut merupakan suatu langkah yang positif menuju pada pengelolaan aset desa yang Inklusi (PADI). Inisiasi program PADI di desa Karang Sari tersebut menghasilkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Munculnya kesadaran dari kelompok rentan dan marjinal akan arti pentingnya memperjuangkan kepentingan mereka melalui wadah organisasi di tingkat desa;

²⁵ Dokumentasi Swara Nusa Institute, Laporan Workshop Membangun Visi Perubahan Pengelolaan Aset Desa yang Inklusif di Desa Karang Sari, 18-20 Januari 2018.

2. Terbentuknya Kelompok Difabel Desa (KDD) Karangsari yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa Karangsari dan Swara Nusa Institute serta diakuinya KDD sebagai lembaga kemasyarakatan desa (LKD);
3. Kelompok Difabel Desa, Kelompok Perempuan Tani, dan pemuda berpartisipasi aktif dalam Musyawarah Desa dan mulai mengartikulasikan kepentingannya dalam forum tersebut;
4. Pemerintah desa Karangsari mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan difabel dan Kelompok Tani Perempuan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dalam APBDes;
5. BUMDesa Karangsari membantu memasarkan produk-produk hasil olahan kelompok difabel dan kelompok tani perempuan;
6. Meningkatkan pendapatan kelompok rentan dan marjinal desa.²⁶

D. Pengembangan Ekonomi Lokal Bagi Perempuan Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa secara substansi telah mengamanatkan bahwa peran aktif atau partisipasi masyarakat dan responsivitas pemerintahan desa dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan adalah faktor kunci keberhasilan pembangunan di desa dengan mendayagunakan segala potensi dan aset yang ada di desa seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan potensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa atau dengan kata lain aset desa yang ada dapat dikelola dan dirasakan manfaatnya secara inklusif. Pada intinya pengelolaan aset desa yang inklusif adalah terwujudnya tata kelola aset desa yang memberikan ruang bagi setiap orang warga desa terutama kelompok rentan dan marjinal terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan tidak ada hambatan apapun bagi mereka untuk mengakses serta mengontrol sumberdaya yang ada untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak.²⁷

²⁶ Iranda Yudhatama, Tri Hariyono dan Porcarius Mahi, “Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Melalui Pengelolaan Aset Desa yang Inklusi (PADI)”, *Policy Brief SNI 2019*, hlm.3

²⁷ Terdapat tiga ruang inklusi sosial dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa, didasarkan pada sasaran kelompok marjinal. Bentuk *pertama* berupa pengakuan atas masyarakat hukum adat untuk menyelenggarakan pemerintahan yang didasarkan pada hak asal-usul dan susunan asli (subsidiaritas). Pengakuan tersebut memberi kesempatan pada masyarakat hukum adat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Bentuk *kedua* inklusi sosial dalam UU Desa berupa pemberian kesempatan kepada kelompok miskin dan

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa desa Karangsari hendak meraih kemajuan dan kemakmuran bersama dengan melibatkan seluruh pelaku pengembangan ekonomi desa baik pemerintah desa, swasta dan masyarakat melalui delapan indikator kunci dimana para pelaku pengembangan ekonomi desa tersebut kemudian diberikan peran masing-masing, tidak ketinggalan perempuan desa, kelompok rentan dan marjinal yang merupakan bagian dari warga masyarakat desa bahu-membahu ikut terlibat dan mengorganisasikan diri sebagai salah satu strategi nafkah dalam rangka mengembangkan kehidupan berkelanjutan. Keterlibatan mereka dalam pengelolaan aset desa nampak terlihat dalam tiga sektor area yaitu sektor pertanian, UMKM, dan Pariwisata.

Di sektor pertanian ini, perempuan desa, kelompok rentan dan marjinal terwadahi dalam Kelompok Wanita Tani (KWT) Sendang Rejeki dipadukukan Sendang, dan KWT Lestari di Padukuhan Kamal. Di KWT Sendang ini disediakan aset tanah pelungguh dari kepala dukuh Sendang, seluruh anggota yang sebagian besar adalah kelompok rentan di padukuhan Sendang bersama-sama mengelola lahan tersebut secara kolektif. Lahan kolektif ditanami sayur-sayuran dan hasilnya dipasarkan melalui pasar desa dan sebagian lainnya dipasarkan secara langsung kepada konsumen (warga padukuhan sendang) dan sekitarnya. Disamping itu juga anggota KWT dengan memanfaatkan pekarangan yang ada dirumahnya mengelola dan menanam sayuran dengan sistem *polybag*. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Keberadaan KWT Sendang Rejeki ini juga mendapatkan perhatian dari BPPT Kecamatan pengasih, dimana anggota KWT diberikan bantuan berupa ternak ayam dengan skema bantuan KUBE (Kelompok usaha bersama) dan bantuan ayam ini bisa dikembangkan dalam artian berkelanjutan melalui telur yang dihasilkan oleh induk ayam kube ini. Dan kegiatan ini menurut Ibu Purwati, salah

perempuan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan penyelenggaraan desa, serta pembangunan desa. Sedangkan bentuk *ketiga* inklusi sosial dialamatkan kepada semua warga desa, termasuk kelompok marjinal, untuk berpartisipasi dalam penataan desa, perencanaan desa, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Lebih lanjut lihat Ricardo Simarmata dan R. Yando Zakaria, "Perspektif Inklusi Sosial dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Kebijakan dan Tantangan Implementasi", *Jurnal Wacana: Meretas Jejak Kesejahteraan Desa*. Nomor 37/Tahun XIX/2017, hlm.10

satu anggota KWT dan juga merupakan aktor perubahan desa Karangsari menuturkan bahwa; “kita diberi bantuan itu untuk mencukupi kebutuhan gizi warga dan meningkatkan ekonomi juga mempunyai tujuan supaya desa mandiri pangan itu bisa terwujud di Karangsari dimana pelopornya adalah ibu-ibu/kelompok perempuan termasuk didalamnya ada kelompok rentan seperti kami ini”.²⁸

Apa yang dilakukan oleh KWT Sendang Rejeki ini merupakan salah satu bagian dari bagaimana aset desa bisa dimanfaatkan sebagai basis penghidupan ekonomi yang berkelanjutan dengan pengembangan tanaman pangan dan juga produksi ayam serta telur. Hal ini berarti telah menggunakan aset desa yang dimiliki oleh masyarakat dengan membentuk perkumpulan ekonomi kolektif dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehat dan peningkatan ekonomi kelompok melalui pengembangan dan pengelolaan kebun kolektif tersebut dengan harapan agar desa mandiri pangan di desa Karangsari segera tercapai dan kesejahteraan serta peningkatan ekonomi warga desa terutama kelompok rentan yang terlibat dalam kegiatan KWT Sendang Lestari terangkat penghidupan ekonominya.

Adapun KWT Lestari padukuhan Kamal yang sebagian anggotanya juga warga kelompok rentan, didalamnya adalah petani miskin dan buruh tani perempuan dimana keberadaanya di desa Karangsari ini masih banyak dijumpai. Melalui kegiatan bersama yang dihimpun oleh kelompok perempuan secara kolektif ini bersama-sama mengelola dan mengembangkan kebun TOGA (Tanaman obat Keluarga), dipekarangannya mereka menanam jenis empon-empon, jahe, dan sebagainya untuk dijadikan bahan olahan Jamu dan minuman sehat. Disamping itu juga dengan bantuan dari BPP Kecamatan Pengasih, juga mendapatkan bantuan berupa penggemukan kambing dengan skema KUBE, tujuan dari kegiatan adalah untuk memanfaatkan waktu luang petani perempuan

²⁸ Dokumentasi Swara Nusa, Diskusi Komunitas seri ke-5, KWT Sendang Rejeki: Menuju Tata Kelola Aset Desa yang Inklusif, 26 Nopember 2018.

ketika tidak pergi ke ladang tetangga untuk buruh *tandur* (menam padi), *matun* (menyiangi gulma di sawah pada tanaman padi), dan panen ketika musim padi.²⁹

Sedangkan akses yang diberikan oleh pemerintah desa dalam kerangka mendukung kegiatan ekonomi pertanian sebagai basis penghidupan berkelanjutan untuk KWT Sendang difasilitasi pendidikan ketrampilan dengan pengelolaan dan manajemen pemasaran, disamping itu juga untuk ketersediaan air dalam memenuhi kebutuhan produksi sayuran difasilitasi sarana air untuk pengairan dan penyiraman tanaman. Sedangkan untuk KWT Lestari pemerintah desa memberikan dukungan berupa pelatihan untuk pasca panen yaitu proses kemasan produk dan pemberian bantuan alat untuk memproduksi Jamu yang dihasilkan dari Tanaman obat keluarga (TOGA) bersama kelompok KWT Lestari. Disamping itu juga KWT Lestari bersama dengan UPT Dinas pertanian Kecamatan Pengasih merancang untuk kegiatan pangan lokal yang inklusif.

Di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bersama dengan BUMDesa Binangun melakukan pemetaan terkait dengan keberadaan UMKM yang ada di desa Karangsari. Hasil pemetaan tersebut kemudian menjadi dasar bagi BUMDesa untuk melakukan berbagai kegiatan terkait dengan pemasaran produk dan juga pelatihan manajemen serta kapasitas bagi pelaku UMKM. Selain itu difasilitasi berupa Lapak untuk berjualan di area pasar tiban (Pasar Inovasi Desa) di Gua Batu Jonggol yang berada dipadukuhan Gunung Pentul. BUMDesa menyelenggarakan Pasar Inovasi desa disetiap bulan di hari Minggu Kliwon. Warga desa Karangsari terutama di daerah wisata tersebut diberikan akses lokasi untuk berjualan hasil UMKM mereka. Berkaitan dengan akses untuk para pelaku UMKM ini menurut Bapak Iskandar Selaku Direktur BUMDesa menjelaskan; “Pasar Inovasi Desa (Pasar Sor So) yang dilakukan setiap minggu kliwon terdapat sekitar 25 UKM yang terlibat, dibulan Maret 2018 sampai hari ini sudah bertambah menjadi 50 UKM yang ikut berjualan dipasar tersebut dengan demikian memberikan *income* tambahan bagi para UKM, dan ini menjadi berita gembira bagi

²⁹ Dokumentasi Swara Nusa Institute, Diskusi Komunitas ke-3 KWT Lestari, Desa Mandiri Pangan yang Inklusif, 10 Oktober 2018

BUMDesa karena kegiatan tersebut mendapat antusiasme yang tinggi dari warga Karangsari”.³⁰

Dengan demikian, warga masyarakat juga merasakan kemanfaatan terkait dengan kegiatan Pasar Inovasi Desa tersebut, dengan memberikan kontribusi ekonomi bagi warga masyarakat terutama kelompok rentan desa. Kehadiran para perempuan desa ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa di bidang wirausaha dan memiliki jiwa kepedulian terhadap sesama sangat diharapkan untuk dapat memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat desa pada skala sosial ekonomi. Harapannya adalah memberikan jalan keluar agar dapat menguraikan dan mereduksi kemiskinan yang tengah dihadapi masyarakat saat ini.³¹

Di sektor Pariwisata bersama dengan Pokdarwis mengelola paket wisata desa, misalnya di wisata alam *Tangkil Kliff* yang berada di padukuhan Kedungtangkil, wisata kedung Gender Josutan dan wisata alam dan perkemahan di padukuhan kamal serta wisata goa batu Jonggol dipadukuhan Gunung pentul, warga masyarakat desa dan juga kelompok rentan diikutkan dalam pengelolaan wisata tersebut. Sedangkan kontribusi pemerintah desa dengan memberikan dukungan berupa bantuan sarana dan prasarana penunjang wisata seperti sarana air bersih dan penyediaan Kamar mandi dan toilet. Dari pemdes hanya meminta bagi hasil retribusi masuk wisata saja, sedangkan untuk retribusi lainnya dikelola oleh pokdarwis dan juga warga setempat. Inilah beberapa aset desa yang pengelolaannya melibatkan perempuan desa, kelompok rentan dan marjinal. Mereka diberikan akses, serta kontrol dalam pengelolaan aset desa dengan didukung oleh kelembagaan ekonomi desa (BUMDesa) dengan tujuan untuk mereka menjadi mandiri melalui pengelolaan aset desa yang inklusif.

E. Penutup

Bahasan di atas menunjukkan bahwa aset desa memiliki peran signifikan dalam menopang dan menggerakkan sumber penghidupan warga. Pemetaan aset

³⁰ Dokumentasi Swara Nusa, Hasil Kunjungan Lapangan BUMDesa Karangsari, tanggal 06 Maret 2018.

³¹ Linda Indriyarti Putri, “Reduksi Kemiskinan Melalui Sociopreneurship”, dalam *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. VI No.2 Tahun 2017, hlm. 48

desa menjadi penting untuk menjadi instrumen perluasan sumber penghidupan warga dan desa. Perlu menjadi catatan adalah ketika melakukan pemetaan aset desa, sebaiknya juga menyinggung soal faktor kepemilikan dan akses terhadap aset desa tersebut. Hal ini terutama untuk memastikan bahwa perempuan dan kelompok marjinal di desa juga memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan aset desa. Lebih dari itu, dinamika ekonomi perempuan desa, sebagaimana kasus desa Karangari, memerlukan tidak hanya dukungan kelembagaan, seperti pengorganisasian kelompok dan bekal keterampilan, tetapi juga diperlukan dukungan akses pemasaran yang mengintegrasikan ekonomi lokal desa ke dalam pasar produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) integrasi usaha warga ke dalam lembaga desa semacam BUMDesa tentu akan memberikan keuntungan lebih besar kepada pemerintah desa.

Beberapa agenda yang bisa dilakukan studi lanjut terhadap tulisan ini adalah diantaranya (1) penting mendalami regulasi pemerintah kabupaten maupun desa untuk mengalokasikan APBD maupun APBDesa yang diperuntukan bagi pengembangan ekonomi desa yang inklusif. (2) Mengoptimalkan peran BUMDesa sebagai institusi ekonomi desa yang mampu meningkatkan PADesa dan kemanfaatan bagi kelompok rentan melalui pengelolaan potensi dan aset desa secara inovatif.

Daftar Pustaka

- Chambers, R., & Conway, G. Sustainable rural livelihoods: practical concepts for the 21st century. Institute of Development Studies (UK), 1992.
- Eko, Sutoro, dkk, *Mutiara Perubahan: Inovasi dan Emansipasi Desa dari Indonesia Timur*, Yogyakarta: IRE dan ACCESS Phase II, 2013.
- _____, et.al. *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta: FPPD, 2014.
- Fakih, Mansour, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist Press, 2001.
- Hariyono, Tri, dan Iranda Yudhatama, *Analisis Sosial dalam Pengelolaan Aset Desa yang Inklusif*, Kulonprogo, Swara Nusa Institute dan VOICE, 2018.

- Khoiriyah, Nur, "Pandangan Sosial Ekonomi dan Keagamaan Masyarakat Petani Di Jawa", dalam *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. VI No.2 Tahun 2017.
- Langer, Carol L. dan Cynthia A. Lietz, *Applying Theory to Generalist Social Work Practice: A Case Study Approach*, Canada: Wiley, 2015.
- Laporan Assesment, "Problem-Problem Tata Kelola Aset Desa yang Inklusif dan Memihak Kaum Rentan di Desa Karangsari Kulonprogo", Kulonprogo: Swara Nusa Institute, 2017.
- Nugroho, Riant, *Kebijakan Sosial untuk Negara Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Prasetyantoko A., Sugeng Bahagiyo, dan Setyo Budiantoro, Prolog "Prospek dan Tantangan Pembangunan Inklusi di Indonesia", dalam A Prasetyantoko, Sugeng Bahagiyo, dan Setyo Budiantoro ed. *Pembangunan Inklusif: Prospek dan Tantangan Indonesia*, Jakarta: LP3ES dan Prakarsa, 2012.
- Putri, Linda Indriyarti, "Reduksi Kemiskinan Melalui Sociopreneurship", dalam *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. VI No.2 Tahun 2017
- Sasono, Adi, *Menjadi Tuan Di Negeri Sendiri: Pergulatan Kerakyatan, Kemartabatan, dan Kemandirian*, Jakarta: Grafindo Books Media, 2013.
- Simarmata dan R. Yando Zakaria, "Perspektif Inklusi Sosial dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Kebijakan dan Tantangan Implementasi", *Jurnal Wacana: Meretas Jejak Kesejahteraan Desa*. Nomor 37/Tahun XIX/2017
- Soetomo, *Masalah Sosial, Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Swara Nusa Institute, Laporan Workshop Membangun Visi Perubahan Pengelolaan Aset Desa yang Inklusif di Desa Karangsari, 18-20 Januari 2018.
- _____, Diskusi Komunitas ke-3 KWT Lestari, Desa Mandiri Pangan yang Inklusif, 10 Oktober 2018
- _____, Diskusi Komunitas seri ke-5, KWT Sendang Rejeki: Menuju Tata Kelola Aset Desa yang Inklusi, 26 Nopember 2018.
- _____, Rekam proses "Pelatihan Aktor Perubahan: Program Tata Kelola Aset Desa Yang Inklusi", Kulonprogo 13-15 Juli 2018.
- Yudhatama, Iranda, Tri Hariyono dan Porcarius Mahi, "Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Melalui Pengelolaan Aset Desa yang Inklusi (PADI)", *Policy Brief SNI 2019*

Studi Terhadap Program *Housing* Bagi Kawasan Terdampak Perusahaan Tambang

Zainal Fadri

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Batusangkar

zainalfadri@iainbatusangkar.ac.id

Abstract

Housing and its policy become an interesting issue for the study of social development programs. The CSR program in the housing sector is a form of company involvement in fulfilling access to housing needs as a social responsibility for the impact of company activities on the surrounding community. The method used in this paper is the method of literature or library research, namely by collecting reading material from books, as well as research journals on CSR programs in the housing sector, then analyzing with a qualitative approach so as to produce conclusions as a closing paper. The conclusions in this paper describe the CSR program in the housing sector of PT. Aneka Tambang was carried out in the Nanggung, sub-district of Bogor district. CSR activities are carried out through the home improvement competition program and the implementation of a healthy home improvement. CSR program in the housing sector by PT. Aneka Tambang is a form of company involvement in improving people's welfare as a joint commitment between the government, the private sector and the community.

Keywords: CSR; Housing Program; PT. Antam

Abstrak

Perumahan (housing) dan kebijakan perumahan (housing policy) menjadi isu yang menarik untuk kajian program-program pembangunan sosial. Program CSR bidang perumahan merupakan bentuk keterlibatan perusahaan dalam pemenuhan akses kebutuhan perumahan sebagai tanggungjawab sosial atas dampak aktivitas perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Metode yang digunakan dalam paper ini adalah metode kepustakaan atau library research, yaitu dengan mengumpulkan bahan bacaan dari buku, maupun jurnal penelitian mengenai program CSR bidang perumahan, kemudian dilakukan analisis dengan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan kesimpulan sebagai closing paper. Kesimpulan dalam paper ini menggambarkan program CSR bidang perumahan PT. Aneka Tambang yang dilaksanakan di kecamatan Nanggung kabupaten Bogor. Kegiatan CSR dilaksanakan melalui program lomba perbaikan rumah dan pelaksanaan perbaikan rumah sehat. Program CSR bidang perumahan oleh PT. Aneka Tambang merupakan bentuk keterlibatan perusahaan atas peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat sebagai komitmen bersama antara pemerintah, swasta dan komunitas masyarakat.

Kata Kunci: CSR; Program Housing; PT. Antam

A. Pendahuluan

Kemiskinan dapat dikatakan sebagai awal munculnya persoalan perumahan tidak layak huni. Keluarga dalam pengertian ini adalah masyarakat yang memiliki tempat tinggal tidak layak huni terkesan memiliki keterbatasan ekonomi sehingga alasan yang sering dikeluarkan kepada publik adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup akan perumahan. Masyarakat yang berkekurangan, hidup dengan keadaan seadanya dan tempat tinggal yang jauh dikatakan sebagai tempat tinggal dengan layak kesehatan maupun yang telah memenuhi standar keamanan.

Kemiskinan yang melanda sebagian besar masyarakat tidak lepas dari peranan krisis yang terjadi di dalam suatu negara. Krisis menyebabkan suatu kemiskinan berlanjut bahkan terdapat indikasi ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara¹ sehingga masyarakat miskin lebih memilih untuk menjalani hidup dengan cara mereka sendiri. Banyak masyarakat yang memenuhi kebutuhan perumahan hanya dengan menggunakan bahan-bahan bekas dan sangat tidak layak dikatakan sebagai terpenuhinya kebutuhan papan untuk kelangsungan kehidupan.

Pemenuhan kebutuhan perumahan pada masyarakat sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dengan laju angka yang tinggi sehingga kebutuhan akan papan merupakan kebutuhan mendesak untuk dipenuhi. Permasalahan yang sering ditemui adalah ketidakseimbangan laju penduduk dengan ketersediaan bahan maupun modal untuk membangun perumahan, sehingga banyak masyarakat yang hidup dengan kondisi rumah tidak layak. United Nation Statistical Office pernah melakukan tinjauan laju penduduk di beberapa kawasan dalam rentang waktu 20 tahun (tahun 1990-2010), di dalam data tersebut memperlihatkan perkembangan penduduk yang sangat signifikan² yaitu:

¹ Nanik Sudarwati, *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan*, (Malang: Intimedia, 2009), Hal. 87

² Orville F. Grimes, *Housing for Low-Income Urban Families*, (New York: The World Bank, 2001), Hal. 5

Tabel.1 Perkembangan Urban Population 20 Tahun

<i>Developing Region</i>	<i>Urban population (millions of persons)</i>		<i>Average Annual Growth</i>
	1990	2010	
Africa	112	289	4.8
Asia	646	1.365	3.8
Latin America	237	464	3.4
Total	995	2.118	3.8

Sumber: U.N. Statistical Office, 2019

Data di atas menunjukkan laju penduduk dalam rentan 20 tahun rata-rata memiliki peningkatan hingga dua kali lipat. Termasuk di Indonesia sebagai bagian kawasan Asia dan memiliki jumlah penduduk yang besar. Jumlah penduduk yang banyak menjadikan persoalan perumahan (*housing*) menjadi pemasalahan dasar yang harus diselesaikan.

Tabel.2 Perkembangan Populasi di Indonesia

<i>Provinsi dengan Populasi Tertinggi</i>	<i>Jumlah Populasi (juta orang)</i>		<i>Rata-rata Perkembangan</i>
	1990	2010	
Jawa Barat	38.5	43.1	1.9
Jawa Timur	34.8	37.5	1.5
Jawa Tengah	31.2	32.4	1.1
Sumatera Utara	11.8	13.0	1.4
Banten	8.1	10.6	1.2

Sumber: Indonesia Investment, 2019

Perkembangan populasi Indonesia yang begitu pesat menjadi patokan dalam menyelesaikan persoalan dalam meningkatkan *problem solving* terutama di bidang perumahan atau *housing*. Dari data di atas terlihat bahwa perkembangan populasi masyarakat di Indonesia tertinggi terdapat pada Jawa Barat, sehingga program yang akan dilaksanakan oleh PT. Antam merupakan sebuah jawaban atas persoalan yang dimiliki provinsi.

Permasalahan yang selalu timbul adalah perumahan yang tidak memiliki standar sesuai dengan aturan maupun regulasi yang diturunkan sebagai batasan dan aturan minimal terhadap perumahan yang dapat dianggap layak. Perumahan yang dapat dianggap layak dengan menyesuaikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu keluarga atau suatu masyarakat tertentu akan menjadikan suasana tentram dan damai pada suatu lingkungan yang disebut rumah. Persoalan di Indonesia

masih banyak rumah atau perumahan yang belum dapat dikatakan layak sebagai standar minimum rumah untuk dikatakan sebagai rumah sehat dan nyaman.

Kekurangan sanitasi layak dan air layak minum memperlihatkan perumahan belum menjadi tempat tinggal yang aman dan nyaman untuk masyarakat dalam beraktivitas³. Aktivitas masyarakat menjadi terganggu karena tempat tinggal yang dimiliki tidak memiliki standar kesehatan. Banyak ancaman dan tantangan untuk kesehatan maupun kelangsungan hidup suatu rumah tangga untuk menjalani kehidupan dan aktivitas. Namun jauh dari pada itu sudah banyak terdapat komitmen-komitmen baik secara global maupun nasional yang memperjuangkan mengenai perumahan layak, termasuk kelayakan dalam pemenuhan kepemilikan atas rumah.

Secara global hak untuk mendapatkan rumah dan perumahan yang layak disampaikan dalam deklarasi HAM ke-25 (*Declaration of Human Rights-25*) yang menyebutkan:

“Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing, and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age, or other lack of livelihood in circumstances beyond his control”.

Deklarasi ini berbicara mengenai hak seseorang atau suatu keluarga dalam memiliki tempat tinggal sesuai standar yang dapat menunjang kegiatan untuk penghidupan yang lebih baik.

Komitmen untuk perumahan juga telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 yang berbunyi “Rumah merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga, sedangkan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan”, serta ditegaskan dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Pasal 40 yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.”

³ A. Zaenurrossyid & Ahmad Nuruddin, “Modal Sosial Pesantren Jawa Pesisiran Utara dalam Pemberdayaan Masyarakat”, *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 8(1), 2019

Komitmen yang dideklarasikan dalam bentuk Undang-Undang ataupun dalam bentuk *Community Declaration* merupakan bentuk nyata dalam mengupayakan dalam pemenuhan kebutuhan yang menjadi landasan kebijakan diturunkannya persebaran perumahan yang layak bagi seluruh masyarakat. Bentuk komitmen secara umum yang dideklarasikan adalah regulasi tahap awal dalam proses pemilikan dan penggunaan perumahan sehingga dapat menunjang kehidupan yang lebih baik, meskipun keadaan di lapangan belum mencapai seluruh tujuan tersebut. Banyak peraturan maupun perundang-undangan yang mengatur dan mengarahkan pada hak dan kepemilikan rumah dengan segala standar seringkali hanya merupakan bentuk formal yang tidak terlihat pelaksanaannya.

Peran negara sangat diperlukan dalam urusan kedaulatan⁴ perumahan yang akan menjadikan masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak dan memiliki standar sesuai dengan kesehatan yang akan menunjang aktivitas dan kehidupan sehari-hari. Peran negara terhadap jaminan masyarakat atas hak dalam memiliki perumahan dapat diwujudkan dengan menggali persoalan yang terdapat pada persoalan perumahan ditambah dengan menjamin ketersediaan serta kebijakan yang pro terhadap masyarakat,⁵ sehingga menciptakan keamanan dan kesehatan sebagai bentuk jaminan atas masyarakat dari suatu negara. Jaminan keamanan dan ketersediaan rumah menjadi bentuk pemeliharaan masyarakat sebagai warga negara terhadap kemungkinan bentuk eksistensi pemerintah suatu negara dalam berhubungan dengan warga negara.⁶

Perumahan menjadi persoalan yang menarik untuk dibahas dalam permasalahan kedaulatan warga masyarakat sebagai model jaminan dari negara. Jaminan yang diberikan negara belum mencapai tingkat kepuasan dalam pengelolaan maupun dalam menjalankan program sesuai dengan komitmen yang

⁴ Zainal Fadri, "Tabuik: Local Wisdom as an Alternative for Suppressing the Impact of Structural Change in Pariaman", *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 3(1), 2019, Hal. 98

⁵ Aprodicio A. Laquian, *Basic Housing: Policies for Urban Sites, Services, and Shelter in Developing Countries*, (Ottawa: International Development Research Center, 1983), Hal. 147

⁶ Peter Malpass, "Housing Policy and the Housing System", dalam *Implementing Housing Policy*, (Buckingham: Open University Press, 1993), Hal. 24

diberikan. Komitmen-komitmen negara yang belum mencapai tahap maksimal⁷ meninggalkan model perumahan yang tidak layak baik dari kesehatan maupun keamanan, menjadi suatu persoalan yang harus diselesaikan dengan segera. Permasalahan muncul ketika negara tidak mampu menjangkau persoalan perumahan maka pihak swasta atau *private sector* menjadi suatu instansi mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pihak swasta dalam persoalan ini adalah perusahaan yang memiliki aktivitas di sekitar kehidupan warga masyarakat memiliki kewajiban untuk menunjang kehidupan warga sebagai bentuk tanggungjawab sosial atas kegiatan yang dilakukan.

Salah satu kegiatan tanggungjawab sosial (CSR) dapat dilakukan dengan program perumahan atau sering juga disebut dengan istilah bedah rumah. Program bedah rumah dengan metode-metode khusus sesuai dengan visi misi perusahaan menjadi bentuk suatu komitmen bersama yang dijalankan dalam menciptakan suatu keadaan kehidupan masyarakat menjadi aman dan damai terutama di bidang perumahan dan lingkungan tempat tinggal. Rumah yang memiliki standar kesehatan dan keamanan menjadi tujuan utama dari program CSR bidang perumahan. Program CSR yang diambil pada tulisan ini adalah program yang dilakukan PT. Aneka Tambang Tbk. yang telah menjalankan program bedah rumah disekitar aktivitas perusahaan dengan berbagai metode, sehingga diharapkan masyarakat dapat menikmati kehidupan dan tempat tinggal yang layak sebagai tempat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Program *Housing* PT. Aneka Tambang Tbk.

PT. Aneka Tambang Tbk. merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fokus pada aktivitas pertambangan yang pada awalnya merupakan gabungan dari PT. Nikel Indonesia, PT. Tambang Bauksit Indonesia, PN Logam Mulia, BPU Perusahaan Tambang Umum Negara, Proyek Pertambangan Intan Martapura Kalimantan Selatan, PN Tambang

⁷ Zainal Fadri, "Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Yogyakarta", *Komunitas*, 10(1), 2019, Hal. 5

Emas Cikotok, dan Proyek Emas Logas. PT. Aneka Tambang didirikan pada tanggal 5 Juli 1968. PT. Aneka Tambang memiliki lokasi perindustrian dan aktivitas pertambangan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, namun pada persoalan ini, PT. Aneka Tambang dilihat dari program CSR melalui kegiatan bedah rumah yang dilaksanakan di daerah Jawa Barat, lebih tepatnya di kecamatan Nanggung kabupaten Bogor.

Pelaksanaan CSR oleh perusahaan merupakan suatu langkah ideal yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan tanggungjawab etis, ekonomi dan *society* untuk kehidupan serta hubungan yang lebih baik antara perusahaan dan masyarakat. Standar yang dikeluarkan sebagai landasan CSR dengan pengelolaan bisnis untuk profit tanpa mengesampingkan persoalan masyarakat serta menjunjung tinggi persoalan lingkungan hidup⁸ yang sering dikenal dengan istilah *profit*, *planet* dan *peoples*. PT. Aneka Tambang melaksanakan program CSR melalui kegiatan bedah rumah yang dilaksanakan di kecamatan Nanggung, kabupaten Bogor sebagaimana daerah tersebut merupakan daerah tempat beroperasinya aktivitas pertambangan PT. Aneka Tambang.

Secara umum pelaksanaan program CSR PT. Aneka Tambang di bidang perumahan berawal dari keresahan yang dirasakan pihak pengelola yang didorong oleh pemerintahan setempat. Kecamatan Nanggung kabupaten Bogor merupakan daerah yang langsung berhubungan dengan aktivitas pertambangan sehingga kemungkinan dampak yang diberikan oleh PT. Aneka Tambang akan dirasakan langsung oleh sebagian besar masyarakat. Pelaksanaan program CSR dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik antara masyarakat sekitar dengan perusahaan akibat pertambangan.⁹ Konflik yang terjadi diyakini dapat menimbulkan suatu reaksi dari masyarakat sehingga dapat menjalar pada kelompok yang lebih besar dalam aksi yang kemudian akan

⁸ Amartya Sen, "Economics, Business Principles, and Moral Sentiments", dalam *Business Ethics: Vol I, Ethical Theory, Distributive Justice, and Social Responsibility*, (London: SAGE Publication Inc. 2006), Hal. 266

⁹ Tom L. Beauchamp, *Cause Studies in Business, Society, and Ethics*, (New Jersey: Englewood Cliffs. 1989) Hal. 190

menciptakkan suatu hubungan yang tidak nyaman antara perusahaan dan masyarakat.

Program CSR bidang perumahan PT. Aneka Tambang dilaksanakan dengan berbagai model kegiatan. Kegiatan yang paling terlihat hasilnya adalah melalui program bedah rumah dengan model lomba perbaikan rumah dan program perbaikan rumah sehat. Kegiatan lomba perbaikan rumah merupakan konsep bedah rumah yang diselenggarakan oleh PT. Aneka Tambang dengan metode perbaikan rumah yang dilakukan oleh masyarakat serta pemilik rumah dengan harapan tercipta kerjasama dan gotong-royong antar warga masyarakat dalam melakukan bedah rumah. Sementara perbaikan rumah sehat merupakan program PT. Aneka Tambang dalam memperbaiki rumah yang menempati posisi *urgent* untuk dilakukan bedah rumah, terutama untuk persoalan sanitasi dan kesehatan.

a. Lomba Perbaikan Rumah

Lomba perbaikan rumah antar desa yang dilaksanakan oleh PT. Aneka Tambang merupakan salah satu program dari Bina Lingkungan (BL) yang disusun oleh Satuan Kerja Pengembangan Masyarakat yang terdapat dalam program CSR PT. Aneka Tambang cabang pertambangan Pongkor. Program lomba perbaikan rumah dilaksanakan untuk peningkatan mutu kesehatan serta kepedulian terhadap rumah layak¹⁰ yang akan menjadi suatu model tempat tinggal dan tempat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Lomba perbaikan rumah sebagai program CSR PT. Aneka Tambang di bidang perumahan memiliki alur layaknya hibah dalam suatu pembangunan perumahan. Masyarakat yang akan memperbaiki rumah sesuai dengan program harus melakukan beberapa hal,¹¹ yaitu:

- 1) Pengajuan proposal terlebih dahulu sebagai bentuk permintaan pengajuan perbaikan rumah.

¹⁰ Musrifah, *Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) bidang Perumahan pada Wilayah Binaan PT. Aneka Tambang Tbk. di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), Hal. 66

¹¹ Musrifah, *Penerapan Corporate...* hal. 66

- 2) Proposal yang masuk akan dilaksanakan uji validasi dan survai lokasi. Survai dilakukan dalam rangka melihat lokasi tempat dilaksanakan pembangunan dan perbaikan rumah serta melihat apakah rumah yang akan dilakukan perbaikan telah memenuhi kriteria untuk pelaksanaan lomba perbaikan rumah.
- 3) Proses validasi juga dilakukan dengan model sosialisasi terhadap program yang dilaksanakan oleh PT. Aneka Tambang mengenai lomba perbaikan rumah. Sosialisasi juga mencakup perihal program CSR serta pengajuan rencana perbaikan rumah, baik dari segi material untuk pembangunan maupun dari tenaga kerja dan desain rumah.
- 4) Setelah validasi dan sosialisasi, dilaksanakan pencairan dana untuk biaya perbaikan rumah.
- 5) Pelaksanaan perbaikan rumah serta melakukan monitoring dan penilaian atas kinerja perbaikan rumah. Kinerja perbaikan rumah dinilai dari segi ketepatan waktu, dana, serta keterlibatan masyarakat dalam menjalankan program perbaikan rumah.
- 6) Pengumuman hasil lomba dan pemberian apresiasi terhadap pemenang lomba perbaikan rumah.

Program CSR bidang perumahan PT. Aneka Tambang melalui lomba perbaikan rumah menjadi salah satu program andalan karena menggabungkan beberapa aspek dalam pelaksanaan suatu program. Lomba perbaikan rumah mengedepankan aspek gotong-royong sebagai bentuk *community development* dalam suatu pelaksanaan program. Keberhasilan lomba perbaikan rumah akan terlihat pada efektivitas pelaksanaan perbaikan rumah karena modal yang diberikan relatif tidak cukup jika diserahkan dalam bentuk kerja tukang atau kerja proyek. Pengelolaan perbaikan rumah pada lomba perbaikan rumah diserahkan sepenuhnya kepada Kepala Desa yang akan mengatur pelaksanaan dan tata kelola pengerjaan perbaikan rumah.

Musrifah¹² menyatakan bahwa pemenang untuk lomba perbaikan rumah mendapatkan penghargaan atau hadiah sesuai dengan juara masing-masing. Pemenang pertama mendapatkan hadiah Rp. 12.500.000, pemenang kedua mendapatkan hadiah Rp. 7.500.000, dan pemenang ketiga mendapatkan hadiah Rp. 5.000.000. Selain hadiah untuk para pemenang, pihak perusahaan juga memberikan sanksi bagi desa yang tidak dapat melaksanakan perbaikan rumah sesuai dengan peraturan yang telah disepakati. Sanksi diberikan dengan mengembalikan biaya perbaikan rumah sebesar Rp. 10.000.000.

b. Perbaikan rumah sehat

Program pelaksanaan perbaikan rumah sehat dilaksanakan oleh Kepala Desa. Program perbaikan rumah sehat mensyaratkan tiga rumah sebagai satuan minimal untuk dilakukan perbaikan. Penentuan penerima bantuan dilaksanakan oleh Kepala Desa yang diawali dengan musyawarah dengan warga setempat. Perbaikan rumah sehat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa sehingga menjadikan program atau bentuk bantuan yang diturunkan tidak sama antara desa satu dengan yang lainnya. Musrifah¹³ menyatakan ada beberapa program perbaikan rumah sehat yang dilakukan oleh PT. Aneka Tambang tersebar pada 10 desa.

Perbaikan rumah sehat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang telah disesuaikan dengan kesepakatan pada musyawarah tingkat desa. Kebutuhan yang telah disepakati menjadi hal yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan dalam menjalankan program perbaikan rumah sehat dengan upaya penyerapan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan. Proses pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah sehat dipantau langsung oleh pihak perusahaan dengan laporan-laporan kegiatan yang diberikan oleh Kepala Desa selaku pengelola program bantuan perbaikan rumah sehat.

¹² Musrifah, *Penerapan Corporate...* hal. 67.

¹³ Musrifah, *Penerapan Corporate...* Hal. 49.

Kriteria penerima bantuan program CSR PT. Aneka Tambang di bidang perumahan ditentukan berdasarkan kondisi sosial yang dialami oleh masyarakat penerima bantuan. Kondisi sosial masyarakat penerima bantuan dilaksanakan dengan pendekatan aspek menurut usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, jumlah anggota dan lama tinggal.¹⁴ Penerima bantuan untuk perbaikan rumah rata-rata masyarakat yang memiliki keterbatasan di bidang ekonomi sehingga memenuhi standar rumah yang sehat merupakan suatu tanggungan berat yang tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat. Dari persoalan itulah program CSR PT. Aneka Tambang hadir sebagai bentuk kepedulian terhadap perbaikan rumah guna menunjang kesehatan terutama keluarga masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan aktivitas pertambangan.

2. Pelaksanaan Program *Housing* di Kabupaten Bogor

Program CSR di bidang perumahan yang dilaksanakan oleh PT. Aneka Tambang di kecamatan Nanggung kabupaten Bogor merupakan salah satu bentuk tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar aktivitas pertambangan. Sukses atau tidaknya program CSR yang dijalankan terlihat dari keadaan peningkatan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat menjadi rekan bisnis dalam bentuk hubungan sosial yang baik menandakan suatu program CSR perusahaan dapat dikatakan berjalan, dan sebaliknya jika keadaan komunikasi antara masyarakat dan perusahaan buruk dapat dicurigai sebagai bentuk kegagalan program CSR yang akan berdampak lebih besar untuk kegiatan pertambangan yang lebih panjang.

Kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada program CSR merupakan bentuk analisis dari program yang dilaksanakan. PT. Aneka Tambang melalui program CSR di bidang perumahan, baik dalam bentuk lomba perbaikan rumah maupun pelaksanaan perbaikan rumah sehat merupakan suatu bentuk kegiatan yang menjadikan PT. Aneka Tambang sebagai lembaga yang paham terhadap persoalan masyarakat di sekitar aktivitas pertambangan terlepas dari penilaian terhadap program-program yang dilaksanakan. Program perumahan dalam

¹⁴ Musrifah, *Penerapan Corporate...* hal. 76.

CSR PT. Aneka Tambang menjadi salah satu contoh konkret tanggungjawab sosial yang dilaksanakan dan dapat digunakan sebagai contoh bagi perusahaan lain, baik dengan aktivitas serupa maupun dengan model lain sesuai dengan visi misi perusahaan yang mengelola.

Di samping keberhasilan program CSR perusahaan PT. Aneka Tambang di bidang perumahan, terdapat beberapa catatan dan pembelajaran yang dapat dianalisis dan dapat dijadikan sebagai bentuk evaluasi sebagai tindak lanjut dari program CSR yang akan dilaksanakan oleh perusahaan lain. Beberapa hal yang dapat dipetik adalah keterlibatan masyarakat atau *community* dalam pelaksanaan program, dan implementasi program yang dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal lain yang dapat dikaji dari program CSR PT. Aneka Tambang adalah peran negara dan perusahaan sebagai *private sector*, dominasi pembangunan perumahan dari segi fisik, serta penilaian terhadap performa perusahaan PT. Aneka Tambang dalam melaksanakan program CSR di bidang perumahan (*housing*).

a. Peran Negara dan Swasta dalam Pemenuhan Kebutuhan Perumahan

Program CSR bidang perumahan PT. Aneka Tambang bergerak mengingat lemahnya peran negara dalam menjamin ketersediaan perumahan layak bagi masyarakat yang berada di sekitar kecamatan Nanggung kabupaten Bogor. Perumahan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat dalam menjalani kehidupan merupakan suatu hal yang sulit untuk dipenuhi dengan alasan keterbatasan ekonomi yang menjadikan masyarakat tidak mampu mengakses rumah sesuai dengan standar kesehatan maupun standar keamanan. Kehadiran PT. Aneka Tambang dalam melaksanakan program CSR bidang perumahan mengingat tanggungjawab sosial perusahaan melakukan aktivitas dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang menjadi tanggungjawab perusahaan atas kesejahteraannya.

Jaminan masyarakat untuk mengakses perumahan sesuai standar kesehatan dan keamanan semestinya merupakan tanggungjawab negara

sebagai bentuk perlindungan warga negara terhadap kesejahteraan. Negara memiliki kebijakan yang mengatur tata kelola perumahan serta standar minimum untuk rumah sebagai tempat tinggal sehat dan aman serta menjamin keberlangsungan kehidupan yang terdapat di dalamnya¹⁵. Masih banyak warga masyarakat yang belum memiliki akses untuk mendapatkan tempat tinggal dengan standar kesehatan dan keamanan yang layak dapat dikatakan sebagai salah satu program pemerintah yang kurang berfokus pada kesejahteraan sosial masyarakat. Negara masih didominasi oleh kegiatan perekonomian untuk mengejar ketertinggalan serta stabilitas dalam ranah internasional.

Murie¹⁶ mengatakan bahwa negara bertindak sebagai kontrol terhadap kelangsungan kehidupan warga masyarakat serta sebagai instrumen dalam penyelesaian persoalan yang dihadapi pada kehidupan masyarakat. Permasalahan keterbatasan akses perumahan sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan menjadi jaminan negara dalam menjaga kelangsungan hidup warga negara sehingga menciptakan kesejahteraan dalam jangka panjang. Berbeda halnya yang terjadi di daerah sekitar pertambangan PT. Aneka Tambang. Sebagian besar masyarakat hidup dengan kondisi rumah yang dapat dikatakan tidak layak huni, sehingga mengharuskan program CSR dilaksanakan di bidang perumahan.

Pelaksanaan program CSR perusahaan yang yang dominan pada suatu tatanan masyarakat tertentu dalam jangka panjang dapat menjadikan suatu ketimpangan pandangan terhadap keberadaan negara sebagai penjamin kesejahteraan kehidupan warga negara¹⁷. Tarik menarik program perbaikan rumah yang banyak dilakukan swasta (perusahaan) menjadikan komunikasi antara masyarakat dan perusahaan menjadi intens sehingga tidak jarang

¹⁵ H. Hikmah & L. Dharmawan, "Peran Corporate Secretary Dalam Rangkaian Event Hut Ke-22 PT. Pertamina Patraniaga", *Jurnal Resolusi Konflik, CSR dan Pemberdayaan (Care)*, 4(1), 2019, Hal. 58.

¹⁶ Alan Murie & Peter Malpass, *Housing Policy and Practice*. (London: MacMillan Education Ltd. 1987), Hal. 47

¹⁷ M. A. Abdullah & A. Firmansyah, "Manajemen Kesehatan Ternak Sapi Potong di Desa Sugihwaras, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan", *Jurnal Resolusi Konflik, CSR Dan Pemberdayaan (CARE)*, 2(2), 2019, Hal. 15

terjadi pergolakan politik oleh sebagian elite tertentu yang tidak berpihak untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Kehadiran perusahaan sebagai penjamin ketersediaan akses perumahan yang layak dan sesuai standar kesehatan dapat dijadikan alat untuk pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat sebagai bentuk upaya pengurangan program yang dilakukan oleh pemerintah. Kemungkinan beberapa oknum dan aparat negara dalam hal ini adalah pemerintah maupun perangkat desa menjadikan perusahaan sebagai ladang untuk mengambil keuntungan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pelaksanaan program CSR bidang perumahan sebaiknya menjadikan perusahaan sebagai penunjang jaminan sosial untuk akses perumahan bagi masyarakat yang terkena dampak aktivitas sekitar pertambangan. Harapan dari program CSR tidak menjadikan negara lepas tangan dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, namun yang diharapkan dari kegiatan program tersebut adalah terciptanya komunikasi yang baik antara pihak pemerintah dan swasta dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, terutama mengenai akses perumahan layak.

b. Program *Housing* dengan Pendekatan Komunitas

Program CSR PT. Aneka Tambang di bidang perumahan yang dilaksanakan di kecamatan Nanggung kabupaten Bogor menggunakan pendekatan komunitas dalam menjalani program-program yang diturunkan oleh perusahaan. Pelaksanaan program melalui pendekatan komunitas terlihat dari model pelaksanaan lomba perbaikan rumah dan perbaikan rumah sehat mengedepankan asas musyawarah. Penentuan penerima bantuan perbaikan rumah ditentukan oleh Kepala Desa dengan persetujuan masyarakat yang terdapat di desa tersebut.

Pelaksanaan perbaikan rumah dilaksanakan dengan bergotong-royong antar sesama warga mengingat biaya yang diturunkan tidak memadai jika seluruh perbaikan dilakukan oleh tukang, apalagi dengan model tender proyek. Kegiatan bersama yang dilaksanakan masyarakat mencerminkan

suatu bentuk kehadiran masyarakat atau *society* dalam pelaksanaan program CSR, sehingga diharapkan kesadaran masyarakat tentang *community development* akan terus berlanjut meskipun perusahaan sudah tidak melaksanakan aktivitas pertambangan.

Kegiatan *community development* yang dilaksanakan masyarakat dalam program lanjutan CSR dapat menghadirkan sikap dan etos kerja yang sesuai dengan tatanan nilai yang telah dianut oleh masyarakat setempat. Pelaksanaan kegiatan bersama akan menjadi suatu jalan dalam mengatasi persoalan kemiskinan, kejahatan dan meningkatkan kerjasama serta jaringan komunikasi yang terdapat dalam hubungan masyarakat.¹⁸ Hubungan baik yang terjalin pada masyarakat menjadi modal dalam pembangunan berkelanjutan termasuk sebagai salah satu jaminan atas warga masyarakat dalam memperoleh akses rumah sesuai standar kesehatan dan keamanan, baik dari negara maupun dari pihak swasta sebagai bentuk kegiatan CSR perusahaan.

c. Implementasi Program dan Kecenderungan Performa

Implementasi program CSR sebagai tanggungjawab perusahaan memiliki tujuan sebagai jaminan atas kesejahteraan masyarakat yang bertempat tinggal serta memiliki aktivitas yang bersinggungan dengan aktivitas pertambangan. *Mainstreaming* CSR menjadi suatu landasan bagi pelaksanaan dan perencanaan program yang akan dilakukan. *Mainstreaming* CSR mengharapakan suatu program CSR berasal aspirasi dari masyarakat sebagai penerima bantuan dan perusahaan sebagai pemberi bantuan, serta pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk tantangan yang diberikan kepada pelaksana maupun pada penerima bantuan.¹⁹

Program CSR bidang perumahan PT. Aneka Tambang dalam pelaksanaan lomba dan perbaikan rumah sehat menjadi suatu acuan bahwa

¹⁸ John J. Egan dkk., *Housing and Public Policy: A Role for Mediating Structures*. (Cambridge: Ballinger Publishing Company. 1981), Hal. 16

¹⁹ F. Maon dkk., "Mainstreaming Corporate Social Responsibility: A Triadic Challenge from A General Management Perspective", dalam *Professionals perspectives of Corporate Social Responsibility*, (New York: Springer, 2009), Hal. 76

program yang dilaksanakan merupakan tindakan atas aspirasi yang berasal dari masyarakat. Pada program perumahan di sekitar perusahaan PT. Aneka Tambang lebih banyak berasal dari *mainstreaming* perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab sosial dalam bentuk jaminan atas akses rumah sehat bagi warga yang terkena aktivitas pertambangan. *Mainstreaming* CSR dalam menerima aspirasi masyarakat tidak terlihat dalam pelaksanaan program perumahan dan perbaikan perumahan yang dilakukan oleh PT. Aneka Tambang, karena program yang dilaksanakan merupakan bentuk *mandating* bagi perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan dan dituntut melaksanakan program CSR sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan.

Program CSR sebagai *mandating* sesuai dengan regulasi yang diturunkan kepada perusahaan yang memiliki aktivitas di bidang pertambangan merupakan suatu bentuk performa PT. Aneka Tambang dalam menjalankan program CSR. *Mandating* yang dimaksud adalah keharusan atau suatu tanggungjawab bagi perusahaan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat serta mendukung peningkatan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat setempat. Performa CSR PT. Aneka Tambang secara *mandating* dapat juga dikatakan sebagai kesepakatan atas aturan yang diturunkan negara dalam hal ini merupakan kesepakatan yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan aktivitas perusahaan.

Berbeda halnya, jika PT. Aneka Tambang melakukan pelaksanaan program CSR bidang perumahan atas dasar bentuk hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Kegiatan CSR yang didasari dengan hubungan baik sebagai jaminan atas keberlangsungan kegiatan dan aktivitas pertambangan merupakan bentuk performa perusahaan dalam meraup keuntungan yang bersifat ekonomis. Program CSR dilaksanakan dengan harapan terbukanya jalan yang lebih baik untuk aktivitas perusahaan sehingga program pemberdayaan masyarakat menjadi suatu bentuk hubungan bisnis yang tentunya akan menguntungkan pihak perusahaan.

d. Dominasi Pembangunan Fisik atas Program *Housing*

Persepsi dalam pembangunan dan pelaksanaan program CSR bidang perumahan sering didominasi oleh pembangunan fisik rumah. Pelaksanaan program perumahan diukur dengan konstruksi pembangunan perumahan, kombinasi material dan jenis pembangunan yang dilakukan, serta level kesulitan pembangunan rumah hingga menuju penyelesaian suatu bentuk rumah yang siap untuk digunakan.²⁰ Pembangunan perumahan (*housing*) identik dengan pembangunan fisik sebagai pelaksanaan program menjadi bentuk nyata yang memudahkan dalam pelaporan serta pertanggungjawaban program yang diturunkan, baik oleh perusahaan maupun pihak pemerintah.

Pembangunan perumahan dengan dominasi pembangunan fisik menjadikan program pemberdayaan masyarakat terkesan sebatas proyek yang harus segera ditunaikan sebagai tanggungjawab, dan sangat jarang untuk menjadikan suatu pemberdayaan sebagai pembangunan berkelanjutan. *Sustainable development* sangat dibutuhkan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan masyarakat mampu menciptakan suasana lingkungan rumah sebagai tempat ideal untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Rumah diartikan sebagai tempat tinggal dan tempat menjalani aktivitas masyarakat, sehingga pembinaan serta jaminan keamanan menjadi suatu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup sehingga menjadikan kenyamanan atas kehidupan masyarakat.

Program CSR bidang perumahan oleh PT. Aneka Tambang sekilas masih terlihat sebagai program pembangunan dan perbaikan rumah dalam bentuk fisik. Data-data perbaikan perumahan yang didapatkan berupa perubahan material dan bentuk susunan rumah serta pemenuhan kebutuhan dan prasarana penunjang rumah memperlihatkan program CSR

²⁰ Orville F. Grimes, *Housing for Low-Income Urban Families*, (New York: The World Bank, 2001), Hal. 3

bidang perumahan PT. Aneka Tambang masih belum sampai pada taraf pembangunan perumahan model pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan basis *sustainable development*. Program CSR bidang perumahan semestinya juga didominasi oleh pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, peningkatan mutu, dan jaminan keamanan dalam menjalani kehidupan di keluarga serta jaminan sosial dalam regulasi perumahan sebagai tempat berlangsungnya aktivitas masyarakat.²¹

Pelaksanaan program CSR di bidang perumahan tanpa dominasi pembangunan fisik rumah, namun juga pembangunan berkelanjutan atas kehidupan dan peningkatan kesejahteraan keluarga diharapkan memunculkan suatu langkah pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Pembangunan perumahan menjadi tolak ukur keberhasilan program CSR bidang perumahan, sehingga diharapkan akan tercipta masyarakat yang mandiri dan memiliki akses dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga pasca dilaksanakan kegiatan CSR oleh perusahaan. Pembangunan yang berkelanjutan di bidang perumahan merupakan bentuk jaminan atas kesejahteraan warga masyarakat dalam menjalani kehidupan untuk jangka panjang.

C. Kesimpulan dan Rekomendasi

Perusahaan dalam program CSR bidang perumahan hadir sebagai upaya mengisi kekosongan yang tidak dapat dipenuhi oleh negara dalam menjamin akses perumahan bagi masyarakat. Perusahaan memiliki tanggungjawab sosial untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi yang terkena dampak aktivitas perusahaan. PT. Aneka Tambang dalam hal ini menjadi suatu perusahaan yang melaksanakan program CSR di bidang perumahan. Program CSR bidang perumahan PT. Aneka Tambang dilaksanakan di kecamatan Nanggung kabupaten Bogor dengan melaksanakan beberapa kegiatan program pembangunan perumahan. Program yang dilakukan oleh PT. Aneka Tambang adalah lomba perbaikan rumah dan pelaksanaan perbaikan rumah sehat yang

²¹ Orville F. Grimes, *Housing for...* hal. 5.

menjadi tolak ukur atas jaminan akses perumahan bagi masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan.

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk perbaikan program CSR bidang perumahan PT. Aneka Tambang adalah dengan memperhatikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh PT. Aneka Tambang dalam melaksanakan program pembangunan perumahan. (1) Program CSR yang dilakukan perusahaan baik di bidang perumahan maupun yang lain dalam rangka menunjang kesejahteraan hidup masyarakat tidak menjadikan perusahaan sebagai pengganti peran negara dalam penjamin kesejahteraan masyarakat, karena jaminan kesejahteraan merupakan tanggungjawab negara, sementara perusahaan menjadi pendukung atas program-program yang dilaksanakan. (2) Peningkatan pelibatan komunitas dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk jaminan sosial jangka panjang. (3) Peningkatan performa perusahaan dalam menjalankan program CSR menjadi bagian yang akan menunjukkan keterlibatan perusahaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar aktivitas perusahaan. (4) Selain melaksanakan pembangunan fisik, dominasi pembangunan sosial juga menjadi tujuan program CSR bidang perumahan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Program-program yang direkomendasikan sebagai kegiatan berkelanjutan dapat didesain dengan penggalan lebih dalam terhadap persoalan masyarakat secara mendasar. Banyak program yang dilakukan beberapa instansi yang memiliki fokus dalam peningkatan kesejahteraan tidak bertahan lama karena terkendala dengan program yang hanya sebatas *charity*. Seperti kegiatan perbaikan rumah dapat digolongkan ke dalam program fisik yang tentunya akan sulit untuk dilaksanakan dalam jangka panjang. Rekomendasi yang dapat diadopsi atas penyempurnaan program ini seperti: (1) *Program desa mari* (maju dan mandiri), kegiatan ini bertujuan untuk bagaimana menumbuhkan keinginan masyarakat tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perumahan. (2) *Program lomba rumah bersih*, kegiatan ini bertujuan untuk monitoring terhadap perbaikan rumah yang sudah diberikan program perbaikan, dengan harapan masyarakat memiliki kesadaran sendiri untuk

melanjutkan program, dan (3) *Program rumah goro* (gotong royong), kegiatan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan perbaikan rumah dilakukan dengan kekuatan kebersamaan meskipun tetap disokong oleh perusahaan dari segi pendanaan, sehingga masyarakat memiliki komitmen bersama untuk mewujudkan perumahan atau housing yang berimbang.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. A., & Firmansyah, A. Manajemen Kesehatan Ternak Sapi Potong di Desa Sugihwaras, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. *Jurnal Resolusi Konflik, CSR Dan Pemberdayaan (CARE)*, 2(2). 2019. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalcare/article/view/26292>
- Beauchamp, Tom L., *Cause Studies in Business, Society, and Ethics*. New Jersey: Englewood Cliffs. 1989.
- Egan, John J., dkk. *Housing and Public Policy: A Role for Mediating Structures*. Cambridge: Ballinger Publishing Company. 1981.
- Fadri, Zainal. Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Yogyakarta. *Komunitas*, 10(1), 1-19. 2019.
- Fadri, Zainal. Tabuik: Local Wisdom as an Alternative for Suppressing the Impact of Structural Change in Pariaman. *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 3(1). 97-109. 2019
- Grimes, Orville F. *Housing for Low-Income Urban Families*. New York: The World Bank. 2001.
- Handayani, Yohana Lilis., Sujaymoko, Bambang & Sutikno, Sigit. Implementation of Rapid Sand Filter for Groundwater Treatment in Kulim Tenaya Raya Pekanbaru. *Jurnal Sinergitas PKM & CSR*, 1(2). 2017.
- Hikmah, H., & Dharmawan, L. Peran Corporate Secretary Dalam Rangkaian Event Hut Ke-22 Pt Pertamina Patraniaga. *Jurnal Resolusi Konflik, Csr Dan Pemberdayaan (Care)*, 4(1), 56-60. 2019.
- Kho, Katherine., Aslanzadeh, Soimaz., Muslimatun, Siti & Devanthi, Putu Virginia Partha. Latihan Manajemen Pengolahan Sampah bagi Masyarakat Kelurahan Cempaka Putih, Jakarta. *Jurnal Sinergitas PKM dan CSR*, 4(1). 2019.
- Laquian, Aprodicio A. *Basic Housing: Policies for Urban Sites, Services, and Shelter in Developing Countries*. Ottawa: International Development Research Center. 1983.

- Malpass, Peter. Housing Policy and the Housing System. dalam *Implementing Housing Policy*. Buckingham: Open University Press. 1993.
- Maon, F., dkk., Mainstreaming Corporate Social Responsibility: A Triadic Challenge from A General Management Perspective. dalam *Professionals perspectives of Corporate Social Responsibility*. New York: Springer. 2009.
- Murie, Alan dan Malpass, Peter. *Housing Policy and Practice*. London: MacMillan Education Ltd. 1987.
- Musrifah. *Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) bidang Perumahan pada Wilayah Binaan PT. Aneka Tambang Tbk. di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor*. Semarang: Universitas Diponegoro. 2010.
- Putri, M., & Maknun, I. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Lingkungan di PAUD Alam Al Firdaus, Desa Muktijaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Karawang. *Jurnal Resolusi Konflik, CSR Dan Pemberdayaan (CARE)*, 3(1). 2019.
- Sen, Amartya. Economics, Business Principles, and Moral Sentiments. dalam *Business Ethics: Vol I, Ethical Theory, Distributive Justice, and Social Responsibility*. London: SAGE Publication Inc. 2006.
- Sudarwati, Nanik. *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan*. Malang: Intimedia. 2009.
- Syarifah, N. L. Program Pengembangan Pertanian Terpadu untuk Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Operasi PT Pertamina EP Asset 2 Field Adera. *Jurnal Resolusi Konflik, CSR Dan Pemberdayaan (CARE)*, 2(2). 2019.
- Zaenurrossyid, A. & Nuruddin, Ahmad. Modal Sosial Pesantren Jawa Pesisiran Utara dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 8(1). 2019.
- Zaenurrossyid, A. & Sulikhah, Siti. Paradigma Fiqh Sosial Atas Kemiskinan dalam Gerakan Empowering Menuju Kemakmuran Umat. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 6(1). 2017.

